BERITA DAERAH
KOTA SUKABUMI

TAHUN 2026 NOMOR 21

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 24 JUNI 2026

NOMOR : 21 TAHUN 2026

TENTANG : RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2025-2029

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2026

SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali

jdih.sukabumikota.go.id

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7035);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);

jdih.sukabumikota.go.id

7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);

8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 278);

10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 66);

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 75);

13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 79);

jdih.sukabumikota.go.id

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 2

(1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif yang memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD.

(2) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
a. program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD untuk dipercepat capaian target programnya;
b. hasil koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan;
c. isu strategis yang berkembang;
d. kebijakan nasional; dan
e. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Gambaran Umum dan Kondisi Riset dan Inovasi di Daerah;
c. BAB III : Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi Daerah;
d. BAB IV : Analisis Kesenjangan Kebijakan Berbasis Bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;

jdih.sukabumikota.go.id

e. BAB V : Strategi Riset dan Inovasi di Daerah
f. BAB VI : Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah; dan
g. BAB VII : Penutup.

(2) Uraian Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

(1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan Inovasi Daerah.

(2) Rencana aksi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.

(3) Rencana aksi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*); dan
b. program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi Daerah.

(4) Rencana aksi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

jdih.sukabumikota.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 24 Juni 2026

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 24 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ANDANG TJAHJANDI

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2026 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,

YUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

jdih.sukabumikota.go.id

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 21 TAHUN 2026
TENTANG : RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045, salah satu sasaran visi Indonesia Emas 2045 adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia. Hal ini dilakukan melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, Inovasi dan kreativitas, dan kesejahteraan. Upaya untuk mendorong pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kontribusi Riset bagi ekonomi telah dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah, dengan menerbitkan sejumlah regulasi dan kebijakan.

Namun, dalam mewujudkan hal tersebut, bangsa Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan, antara lain: 1) lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan Inovasi; 2) lemahnya komitmen pemerintah, terutama dari segi anggaran yang hanya mencapai 0,28% dari Produk Domestik Bruto (PDB); 3) lemahnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) peneliti; 4) ekosistem Riset dan Inovasi masih lemah, tercermin dari hasil Riset yang tidak aplikatif; 5) lemahnya kerja sama lembaga Riset dan industri; 6) terbatasnya kerja sama lembaga Riset domestik dan internasional.

Persoalan ini berdampak tidak hanya pada lingkup nasional tetapi juga pada tingkat daerah, termasuk di Kota Sukabumi. Dinamika perkembangan di tingkat Provinsi Jawa Barat, nasional, maupun global akan mempengaruhi perkembangan Kota Sukabumi. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi Kota Sukabumi dalam meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat harus didukung oleh kebijakan Pemerintah Daerah yang kreatif, inovatif, dan solutif. Oleh karena itu, Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi memiliki peran strategis dalam menghasilkan Riset dan Inovasi yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan inovatif dan solutif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Sukabumi.

Pelaksanaan Riset dan Inovasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi memerlukan sinkronisasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia, serta dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan lembaga penelitian perguruan tinggi. Sinkronisasi ini diperlukan untuk memastikan pelaksanaan RPJMD Kota Sukabumi yang mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi, sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan Inovasi, memiliki

tanggung jawab untuk memastikan bahwa Riset dan Inovasi yang dilakukan bersifat menyeluruh dalam pengelolaan sumber daya ekonomi Daerah.

Untuk mengoptimalkan kinerja kelitbangan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa BRIN Daerah, baik yang berdiri sendiri maupun yang diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah atau penelitian dan pengembangan daerah, harus menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID).

Berdasarkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, RIPJPID merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang sistemik, komprehensif, dan partisipatif. Dokumen ini memuat peran ilmu pengetahuan, teknologi, Riset, dan Inovasi dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah. RIPJPID disusun untuk jangka waktu lima tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. RIPJPID disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD atau (Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dengan tujuan mempercepat capaian target program. Penyusunannya juga memperhatikan rencana induk dan peta jalan pemajuan Iptek di tingkat provinsi, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD atau RPD.

Fungsi Riset dan Inovasi di Daerah mencakup kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023. Fungsi ini bertujuan untuk: 1) meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2) memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah; 3) memberdayakan dan melibatkan peran serta masyarakat; 4) meningkatkan daya saing daerah; dan 5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan Riset bertujuan untuk menindaklanjuti hasil penelitian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban. Pengkajian merupakan proses analisis dan perekayasaan yang meliputi pengujian, pengembangan teknologi, rancang bangun, dan pengoperasian. Proses penerapan wajib dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian, dengan tujuan mendorong Inovasi untuk meningkatkan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui alih teknologi, intermediasi teknologi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta komersialisasi teknologi.

Untuk meningkatkan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kelitbangan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, perlu disusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Kota Sukabumi Tahun 2025-2029. Penyusunan RIPJPID dilakukan dengan memperhatikan arahan dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi melalui kajian analisis kebijakan dan kondisi faktual yang terjadi di Kota Sukabumi. RIPJPID ini merupakan dokumen yang memberikan arah kebijakan Riset dan Inovasi serta pemanfaatannya guna peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kualitas kebijakan berbasis bukti, ekosistem Riset dan Inovasi, serta daya saing daerah.

Mempertimbangkan aneka urgensi tersebut, RIPJPID Tahun 2023 direvisi untuk disesuaikan dengan visi-misi, sasaran dan prioritas RPJMD Tahun 2025-2029. Mengingat secara makro RIPJPID Tahun 2023 telah mengandung beberapa aspek yang selaras dengan RPJMD Tahun 2025-2029, revisi ini hanya akan

berkonsentrasi pada beberapa aspek berikut. Pertama, revisi RIPJPID meng*update* semua data empiris untuk "memotret" perkembangan Kota Sukabumi Tahun 2023-2026. Kedua, revisi RIPJPID akan mereposisi program prioritas dari produk unggulan perikanan dan pertanian ke ekonomi kreatif dan berkelanjutan. Ketiga, revisi RIPJPID akan mengintegrasikan salah satu misi RPJMD Tahun 2025-2029 untuk menjadikan Kota Sukabumi sebagai kota yang agamis dan berkebudayaan inklusif. Keempat, derajat kesehatan yang menjadi bagian krusial dari peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing di Kota Sukabumi di dalam RPJMD akan juga diintegrasikan ke dalam revisi RIPJPID Tahun 2025-2029. Kelima, revisi RIPJPID akan diakhiri dengan "memotret" potensi Riset dan Inovasi di Kota Sukabumi, serta mengusulkan rencana aksi nyata dari Riset dan Inovasi tersebut.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan RIPJPID merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan daerah yang didasarkan pada urgensi penyusunan kebijakan berbasis evidens (*evidence based*). Karena itu, urgensi dan keberadaan dokumen RIPJPID dilandasi beberapa peraturan perundang-undangan dan turunannya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7035);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);

7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);

8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 278);

10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 66);

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 75); dan

13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 79).

1.3 Tujuan dan Sasaran

Dokumen RIPJPID disusun untuk mengarahkan alur kerja pemerintah dengan kebijakan berbasis *evidens*, memetakan kondisi *existing*, tantangan dan peluang, serta proyeksi penanganan (*policy response*). Karena itu RIPJPID disusun dengan tujuan dan sasaran khusus.

1.3.1 Tujuan

Penyusunan RIPJPID memiliki beberapa tujuan yaitu:
a. menganalisis gambaran umum dan kondisi Riset dan Inovasi Kota Sukabumi;
b. menganalisis permasalahan utama pembangunan Kota Sukabumi dan potensi pemecahannya;
c. menganalisis tema prioritas Riset dan Inovasi Kota Sukabumi;
d. menganalisis tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di Kota Sukabumi;
e. menganalisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem Riset dan Inovasi Kota Sukabumi;
f. menyusun strategi Riset dan Inovasi di Kota Sukabumi; dan
g. menyusun peta jalan program kegiatan prioritas Riset dan Inovasi daerah Kota Sukabumi yang relevan, terpadu, dan selaras dengan RPD Kota Sukabumi.

1.3.2 Sasaran

Adapun sasaran dari RIPJPID yaitu:
a. penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di Kota Sukabumi;

b. peningkatan peran penelitian untuk kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; perbaikan tata kelola pemerintahan daerah; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; peningkatan daya saing daerah; dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c. peningkatan peran pengembangan sebagai tindak lanjut dari penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban;
d. peningkatan peran pengkajian;
e. pengembangan invensi dan inovasi yang merupakan fasilitasi pemanfaatan, adopsi, inkubasi, kemitraan, penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan daerah, promosi, dan pemanfaatan hasil Invensi dan Inovasi dalam program pembangunan secara berkelanjutan; dan
f. pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di Kota Sukabumi.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Daerah

Untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai potret Kota Sukabumi, RIPJPID perlu memetakan Kota Sukabumi berdasarkan beberapa aspek, yakni geografis, kependudukan, ketenagakerjaan, kesejahteraan masyarakat, dan produk unggulan daerah. Berikut adalah ulasan rinci mengenai Kota Sukabumi dari beberapa aspek tersebut.

2.1.1 Aspek Geografis

Aspek geografis mencakup dua hal penting, yaitu posisi strategis dan potensi pengembangan wilayah Kota Sukabumi.

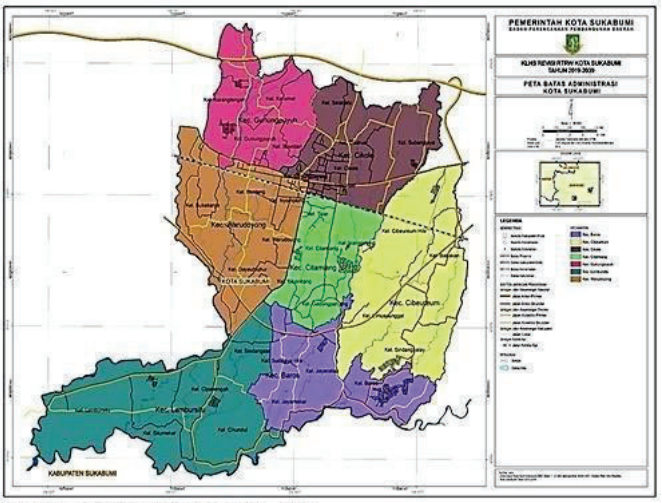
A. Posisi Strategis

Kota Sukabumi merupakan sebuah kota terkecil ketiga (setelah Kota Cirebon dan Kota Cimahi) di Provinsi Jawa Barat. Kota Sukabumi dengan luas 48,33 km² berada di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang berada pada ketinggian 584 meter di atas permukaan laut. Adapun batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi;
c. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi; dan
d. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.

Secara administratif, Kota Sukabumi terdiri dari 7 kecamatan dan 33 kelurahan. Adapun luas dataran masing-masing kecamatan, yaitu Baros (5,58 km²), Lembursitu (10,69 km²), Cibeureum (9,12 km²), Citamiang (4,01 km²), Warudoyong (7,56 km²), Gunung Puyuh (5,15 km²), dan Cikole (6,22 km²). Meskipun terletak di kaki gunung, Kota Sukabumi memiliki posisi strategis karena berada di jalur penghubung antara Ibu Kota Provinsi Jawa Barat dan Ibu Kota Negara. Secara historis, Kota Sukabumi didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai *Burgerlijk Bestuur*.

Pada tahun 1914 dengan status *GEMEENTERAAD VAN SUKABUMI*, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada orang-orang Belanda dan Eropa yang mengelola perkebunan di wilayah Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan Lebak. Dalam konteks perekonomian regional pada masa itu, Kota Sukabumi sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti pergudangan, perbengkelan, serta jaringan transportasi seperti kereta api dan jalan raya yang memiliki akses langsung ke pelabuhan samudra di Jakarta.



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2019

Gambar 1. Peta administrasi Kota Sukabumi
Sumber: BAPPEDA (2019, DIOLAH)

Posisi strategis Kota Sukabumi tetap dipertahankan hingga saat ini. Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, Kota Sukabumi berperan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Jawa Barat yang berada di jalur lintasan Jabodetabek dan Bandung Raya. Kota ini memiliki peran signifikan dalam pengembangan sektor ekonomi dan sosial di kawasan tersebut. Oleh karena itu, Kota Sukabumi memiliki peluang besar dalam pengembangan perekonomian daerah dan masyarakatnya. Selain itu, Kota Sukabumi juga dapat memainkan peran lebih besar dalam memenuhi kebutuhan investasi, konsumsi, dan distribusi bagi wilayah sekitarnya atau *HINTERLAND*.

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Sebagai kota dengan luas wilayah yang relatif kecil, Kota Sukabumi masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara optimal. Pola penggunaan lahan di Kota Sukabumi pada tahun 2018, berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan interpretasi foto citra, didominasi oleh kegiatan pertanian sawah, bangunan permukiman kota, kebun campuran, serta bangunan industri, perdagangan, dan perkantoran. Penggunaan lahan terbesar adalah untuk bangunan permukiman kota, yang mencakup 1.736,63 hektare atau 35,93 persen dari total luas wilayah. Penggunaan lahan untuk sawah mencapai 1.661,03 hektare, atau 34,37 persen dari total luas wilayah. Sementara itu, lahan yang digunakan untuk bangunan industri, perdagangan, dan perkantoran mencakup 340,66 hektare atau 7,05 persen dari total luas wilayah. Berdasarkan RTRW Kota Sukabumi Tahun 2022-2042, pengembangan wilayah dalam konteks kawasan budidaya direncanakan untuk:

1. kawasan pertanian tanaman pangan;
2. kawasan perikanan budidaya;
3. kawasan peruntukan industri;
4. kawasan pariwisata;

5. kawasan permukiman;
6. kawasan perdagangan dan jasa;
7. kawasan perkantoran;
8. kawasan transportasi; dan
9. kawasan pertahanan dan keamanan.

Dari rencana pengembangan kawasan budidaya tersebut, terdapat 2 (dua) kawasan yang menjadi fokus utama dalam mencapai tujuan RTRW Kota Sukabumi, yaitu:

1. Pengembangan Kawasan Pariwisata
   Direncanakan mencakup area seluas kurang lebih 20 hektar. Persebaran kawasan pariwisata ini meliputi beberapa kecamatan, yaitu Warudoyong, Citamiang, Lembursitu, Gunung Puyuh, dan Cikole. Kawasan ini akan dikembangkan dengan tujuan menarik wisatawan, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendukung pelestarian budaya dan lingkungan.

2. Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa
   Kawasan ini akan mencakup seluruh kecamatan di Kota Sukabumi dengan luas total kurang lebih 695 hektar. Pengembangan ini bertujuan untuk memperkuat peran Sukabumi sebagai pusat ekonomi regional, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung pertumbuhan industri kecil dan menengah. Pengembangan tersebut mencakup sistem pusat kegiatan, jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan.

Untuk mewujudkan rencana struktur dan pola ruang kota, terdapat beberapa mega proyek yang sedang dan akan dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan. Pembangunan mega proyek tersebut tentunya akan memperkokoh posisi strategis Kota Sukabumi dan dapat menjadi pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi kota. Beberapa mega proyek tersebut, antara lain:
1. pembangunan Jalan Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi);
2. pembangunan jalan lingkar selatan;
3. pembangunan jalur ganda Kereta Api Bogor-Sukabumi dan Sukabumi-Cianjur-Bandung;
4. pembangunan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM);
5. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan skema KPBU;
6. pengembangan Kawasan Wisata Cikundul; dan
7. fasilitasi *Refused Derived Fuel* (RDF) persampahan.

2.1.2 Aspek Kependudukan

Penduduk Kota Sukabumi mencapai 373,189 per 30 Juni 2025. Populasi Kota Sukabumi konsisten mengalami kenaikan setiap tahun. Lonjakan drastis terjadi pada tahun 2020, mencapai 5,37%. Hal ini diduga karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan penduduk kembali ke Kota Sukabumi dengan berbagai pertimbangan.



Gambar 2. Jumlah penduduk Kota Sukabumi 2019– 2025

Sumber: BPS (2025, DIOLAH)

Jumlah penduduk Kota Sukabumi pada Tahun 2025 mencapai 360.644 jiwa. Penduduk usia produktif (15–64 tahun) Tahun 2025 belum dirilis, tetapi Tahun 2024 mencapai 64,87% atau 238,35 ribu jiwa, turun dari Tahun 2023 sebanyak 248.291 jiwa atau 68,85% dari total populasi. Jumlah populasi produktif yang besar mengindikasikan bahwa Kota Sukabumi sedang berada dalam fase bonus demografi, yang berarti populasi usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan kelompok usia nonproduktif.

Tingkat kepadatan penduduk di Kota Sukabumi pada Tahun 2025 tercatat sebesar 7.773 jiwa per kilometer persegi. Jika dirinci menurut kecamatan, Kecamatan Citamiang merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi, sedangkan Kecamatan Lembursitu memiliki kepadatan terendah. Selain itu, rasio jenis kelamin penduduk Kota Sukabumi berada di kisaran 101, yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Struktur demografi ini mengindikasikan bahwa Kota Sukabumi berpotensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dengan adanya dominasi usia produktif yang dapat dioptimalkan melalui kebijakan tenaga kerja dan pendidikan.

2.1.3 Aspek Ketenagakerjaan

Pada Tahun 2025, jumlah angkatan kerja di Kota Sukabumi mencapai 186,15 ribu jiwa, yang terdiri atas 106,06 ribu laki-laki dan 64,85 ribu perempuan. Dari jumlah tersebut, 91,47% telah bekerja, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 8,19% (lihat Tabel 1), turun dari 8,53% pada tahun 2023, dan 8,34% pada tahun 2024. Angka ini mencerminkan bahwa mayoritas angkatan kerja di Kota Sukabumi telah terserap ke dalam lapangan pekerjaan, meskipun masih terdapat tantangan dalam mengurangi jumlah pengangguran. Optimalisasi potensi angkatan kerja, khususnya perempuan, dapat menjadi fokus dalam kebijakan ketenagakerjaan ke depan.

Tabel 1. Tingkat pengangguran terbuka Kota Sukabumi 2025

Jenis Kelamin	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran
Laki-Laki	115,64	106.06	8.7 (8,26%)
Perempuan	70,51	64.85	6.5 (8,06%)
Jumlah	186.15	170.91	15.24
TPT (%)			8,19

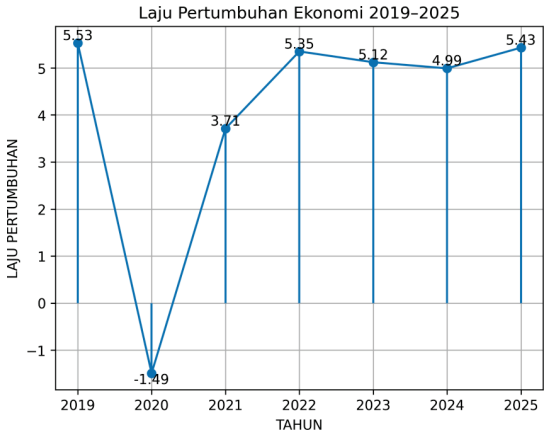
Penurunan TPT di Kota Sukabumi tidak terlepas dari aktivitas perekonomian yang semakin dinamis, terutama dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor tersier seperti perdagangan, angkutan dan komunikasi, keuangan, serta jasa. Peningkatan ini juga berhubungan dengan pertumbuhan masyarakat yang memilih untuk berusaha sendiri sebagai pekerjaan utama, yang meningkat sebesar 24,01% pada Tahun 2025. Meskipun TPT Kota Sukabumi mengalami penurunan, angka TPT pada Tahun 2025 masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat maupun secara nasional. Kondisi ini mengindikasikan adanya masalah struktural, seperti ketidakseimbangan antara jumlah lapangan kerja yang tersedia dengan jumlah angkatan kerja. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam mengintegrasikan kebutuhan dunia usaha dengan keterampilan dan kualifikasi angkatan kerja di Kota Sukabumi.

2.1.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mengevaluasi dan menakar kesejahteraan masyarakat, beberapa indikator penting perlu disoroti: laju pertumbuhan ekonomi, indeks gini, kemiskinan, pembangunan manusia dan prevalensi *stunting*. Bagian berikut mengulas beberapa indeks ini untuk melihat pengaruh setiap indeks terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Sukabumi.

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) adalah indikator yang mengukur pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Perhitungan ini mencerminkan perubahan agregat pendapatan dari suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. LPE menggambarkan dinamika ekonomi suatu daerah, menunjukan peningkatan atau penurunan aktivitas ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga. Dengan menggunakan harga konstan, LPE memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pertumbuhan riil ekonomi dari waktu ke waktu.



Gambar 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2019 – 2025
Sumber: BPS (2025, DIOLAH)

Berdasarkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Tahun Dasar 2010, PDRB Kota Sukabumi pada Tahun 2024 mencapai Rp 16,37 triliun. Distribusi PDRB tertinggi atas dasar harga berlaku pada Tahun 2024 berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 36,83%, diikuti oleh sektor transportasi dan pergudangan sebesar 11,78%, serta jasa keuangan dan asuransi sebesar 11,67%.

LPE Kota Sukabumi pada Tahun 2025 tercatat sebesar 5,43%, naik dari LPE Tahun 2024 yang mencapai 4,99%. Selama tujuh tahun terakhir, LPE tertinggi tercatat pada Tahun 2019 sebesar 5,53%, sementara LPE terendah terjadi pada Tahun 2020 sebesar -1,49% akibat dampak pandemi COVID-19. Penurunan LPE di Tahun 2020 mencerminkan dampak negatif pandemi terhadap perekonomian, sedangkan LPE tertinggi menunjukkan kondisi makro ekonomi yang stabil dan sehat.

B. Indeks Gini

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah alat ukur untuk menilai tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Nilai indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Angka 0 menunjukkan pemerataan sempurna, di mana setiap individu memiliki pendapatan yang sama, sedangkan angka satu (1) menunjukkan ketimpangan sempurna, di mana semua pendapatan terkonsentrasi pada satu individu atau kelompok kecil. Perhitungan Indeks Gini didasarkan pada distribusi pendapatan, kurva Lorenz, dan pendapatan rata-rata. Selama empat tahun terakhir, Indeks Gini di Kota Sukabumi menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2025, indeks Gini tercatat sebesar 0,371, yang menunjukkan peningkatan pemerataan dibandingkan tahun sebelumnya (lihat Gambar 4). Berdasarkan nilai ini, tingkat ketimpangan di Kota Sukabumi berada dalam kategori sedang atau moderat, yaitu antara 0,3 dan 0,5. Meskipun terdapat ketimpangan dalam pendapatan antar individu atau rumah tangga, situasi ini masih berada dalam batas yang dapat diatasi melalui kebijakan publik yang tepat.



Gambar 4. Indeks Gini 2019 – 2025
Sumber: BPS (2025, DIOLAH)

Ketimpangan moderat menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pendapatan antar kelompok masyarakat di Kota Sukabumi. Meskipun tidak begitu ekstrim, hal ini tetap mencerminkan adanya ketimpangan dalam akses pendidikan, ketidaksetaraan kesempatan kerja, konsentrasi kekayaan, serta distribusi kebijakan ekonomi yang belum merata. Faktor lain seperti urbanisasi, perkembangan teknologi, dan globalisasi juga turut berperan dalam memperkuat ketimpangan.

Kondisi ini membutuhkan intervensi kebijakan yang tepat. Kebijakan diarahkan pada pemerataan akses terhadap pendidikan dan peluang kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta redistribusi kekayaan.

C. Kemiskinan

Kategori kemiskinan didasarkan pada kriteria pengeluaran per kapita per bulan. Masyarakat dianggap miskin apabila pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan, yaitu kategori minimum yang mampu memenuhi kebutuhan dasar makan sebanyak 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Di Kota Sukabumi, kemiskinan mengalami peningkatan signifikan dari Tahun 2019 hingga Tahun 2021. Pada Tahun 2019, dengan total penduduk sebanyak 348.945 jiwa, tercatat sebanyak 21.870 jiwa atau sekitar 6,2% penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Tahun 2020, jumlah tersebut meningkat menjadi 7,2%, dan pada Tahun 2021 naik lagi menjadi 7,69%. Namun, pada Tahun 2022, terjadi sedikit penurunan sebesar 0,3%, sehingga jumlah penduduk miskin turun menjadi 7,39% dari total penduduk. Pada Tahun 2023, kinerja Pemerintah Kota Sukabumi menunjukkan perbaikan yang cukup baik dengan penurunan angka kemiskinan menjadi 6,84%. Tren menurun ini konsisten pada dua tahun berikut: 7,20% pada Tahun 2024 dan 6,9% pada Tahun 2025. Perkembangan ini dapat dilihat lebih rinci pada Gambar 5, yang memperlihatkan tren penurunan kemiskinan secara visual.

Meskipun angka kemiskinan di Kota Sukabumi pada Tahun 2025 mengalami penurunan, persentasenya masih relatif tinggi. Untuk terus menekan angka kemiskinan, upaya yang perlu dilakukan adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar makanan, yang menjadi acuan utama, serta kebutuhan nonpangan seperti sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan akan

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sementara peningkatan kondisi tempat tinggal (papan) serta akses terhadap pakaian (sandang) juga merupakan bagian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah Kota Sukabumi perlu merancang kebijakan yang efektif dan berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi sosial- ekonomi masyarakat miskin, dengan fokus pada pengembangan infrastruktur dasar dan peningkatan layanan publik.



Gambar 5. Jumlah Penduduk Miskin 2019 – 2025
Sumber: BPS (2025, DIOLAH)

D. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran yang menggambarkan kemajuan pembangunan manusia dengan mempertimbangkan tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Dalam konteks kesehatan, angka harapan hidup digunakan sebagai indikator utama untuk melihat perkembangan jangka panjang. Untuk mengevaluasi kemajuan pembangunan manusia, terdapat 2 (dua) aspek yang penting yaitu kecepatan pembangunan dan status pencapaian. Pertumbuhan nilai IPM dari waktu ke waktu mencerminkan kecepatan pembangunan manusia yang menunjukkan hasil dari berbagai upaya peningkatan kesejahteraan. Sementara itu, status pencapaian IPM menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan manusia dalam satu periode tertentu.

IPM Kota Sukabumi terus meningkat setiap tahun. Pada Tahun 2025, IPM Kota Sukabumi mencapai 78,23, yang tergolong dalam kategori tinggi (Gambar 6). Nilai ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Sukabumi tergolong baik, dengan sedikit ketimpangan sosial. Kenaikan IPM tersebut didorong oleh peningkatan 3 (tiga) indikator utama, yaitu:

a. Kesehatan
   Diukur melalui angka harapan hidup yang merefleksikan peningkatan kualitas hidup dan akses layanan kesehatan.
b. Pendidikan
   Dilihat dari indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, yang menunjukkan peningkatan akses dan partisipasi pendidikan.
c. Standar Hidup
   Diukur dari pengeluaran per kapita yang mengindikasikan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat.



Gambar 6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi Tahun 2019-2025
Sumber: BPS (2025, diolah)

Jika dilihat perkembangan dari Tahun 2019-2025, IPM Kota Sukabumi masih lebih baik jika dibandingkan IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Diantara kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat, IPM Kota Sukabumi Tahun 2025 berada di peringkat ke-7. Perbandingan ini dapat digunakan untuk evaluasi keberhasilan kebijakan pembangunan dan untuk merencanakan intervensi yang lebih efektif. Dimana IPM ini dapat membandingkan kinerja daerah dan mengidentifikasi ketimpangan sosial dan ekonomi, sehingga pemerintah dapat fokus pada daerah tertinggal.



Gambar 7. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional 2019 – 2025

Sumber: BPS (2025, DIOLAH)

Berdasarkan Gambar 7, perkembangan IPM Kota Sukabumi dari Tahun 2019-2025 masih lebih baik dibandingkan IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Diantara kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat, IPM Kota Sukabumi Tahun 2025 berada di peringkat ke-7. Perbandingan ini dapat digunakan untuk evaluasi keberhasilan kebijakan pembangunan dan untuk merencanakan intervensi yang lebih efektif.

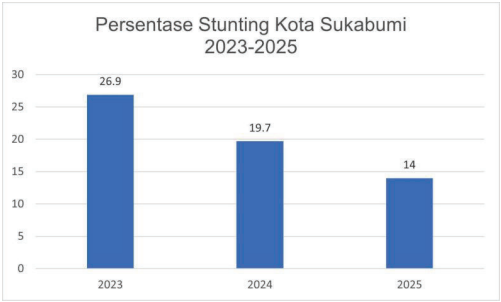
IPM Kota Sukabumi masih bisa ditingkatkan dengan memperhatikan komponen pembentuk IPM-kesehatan (usia harapan hidup), pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah), dan standar hidup (pengeluaran per kapita)-diintervensi dengan tepat dan dilaksanakan oleh lintas urusan. Dari komponen tersebut, fokus utama yang perlu diintervensi adalah pada komponen rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat. Dengan peningkatan yang efektif di komponen ini, diharapkan IPM Kota Sukabumi dapat menunjukkan kemajuan yang lebih signifikan serta mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.

E. Prevalensi *Stunting*

Indikator penting untuk mencerminkan kondisi kekurangan gizi pada anak-anak adalah prevalensi *stunting*, yaitu persentase anak di bawah 5 tahun yang memiliki tinggi badan rendah dibandingkan dengan standar WHO. *Stunting* merupakan masalah kesehatan serius yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, serta menjadi salah satu agenda utama dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, *stunting* di Kota Sukabumi pada Tahun 2025 mencapai 14%, turun dari 19,75 pada Tahun 2024, dan 26,9% pada Tahun 2023. Meskipun angka *stunting* di Kota Sukabumi mengalami penurunan setiap tahunnya, upaya percepatan penurunan *stunting* harus terus dilakukan. Hal ini melibatkan optimalisasi cakupan intervensi berbasis bukti, termasuk memastikan bahwa warga mendapatkan asupan gizi yang memadai dan melakukan pendataan yang akurat untuk mendeteksi serta mengatasi masalah kesehatan terkait *stunting*. Dengan perhatian dan tindakan yang tepat, diharapkan angka *stunting* dapat terus menurun dan mendukung pencapaian generasi unggul di masa depan.

Upaya untuk mengurangi *stunting* di Kota Sukabumi perlu terus ditingkatkan. Kolaborasi dalam intervensi kasus yang tepat akan mempercepat penurunan *stunting* di Kota Sukabumi. Berbagai langkah yang dapat diambil untuk menurunkan prevalensi *stunting* meliputi peningkatan kesehatan dan kualitas hidup generasi mendatang. Permasalahan ini memerlukan pendekatan holistik yang mencakup perbaikan gizi, akses air bersih, sanitasi yang baik, pendidikan kesehatan, serta peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penurunan *stunting* merupakan agenda utama dalam pembangunan berkelanjutan (*SUSTAINABLE Development GOALS*/SDGs).



Gambar 8. Jumlah Stunting di Kota Sukabumi 2023-2025
Sumber: BPS (2025, DIOLAH)

2.1.5 Aspek Produk Unggulan Daerah

Produk unggulan Daerah merupakan hasil atau sektor yang memiliki potensi yang cukup untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian lokal, daya saing, serta kesejahteraan masyarakat. Analisis produk unggulan Kota Sukabumi Tahun 2023 ditunjukkan pada matrik kuadran berikut.

Tabel 2. Matriks Kuadran Sektor PUD

LQ (LOCATION QUOTIENT)	SSA (SHIFT SHARE ANALYSIS)	
	Negatif (-)	Positif (+)
>1	**Kuadran II** a. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	**Kuadran I** a. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang b. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor c. Transportasi dan Pergudangan d. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum e. Jasa Keuangan dan Asuransi f. Jasa Perusahaan
<1	**Kuadran III** -	**Kuadran IV** a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan b. Industri Pengolahan c. Pengadaan Listrik dan Gas d. Konstruksi e. Informasi dan Komunikasi f. Real Estate g. Jasa Pendidikan h. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial i. Jasa lainnya

Sektor-sektor yang berada di Kuadran I dan IV dapat dianggap sebagai sektor yang potensial untuk terus didorong, menunjukkan potensi pertumbuhan yang kuat dan layak dijadikan fokus utama dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Sementara sektor-sektor di Kuadran II dan III meskipun memiliki kontribusi penting, memerlukan upaya lebih untuk meningkatkan daya saing dan mempercepat pertumbuhannya agar bisa bersaing di masa depan, terutama jika berperan dalam penyerapan tenaga kerja atau berpotensi menjadi sektor basis di masa depan.

Salah satu bidang unggulan di Kota Sukabumi, berdasarkan hasil analisis, adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada subsektor pertanian pangan, komoditas unggulan Kota Sukabumi adalah padi, yang menjadi andalan dalam mendukung ketahanan pangan Daerah. Sementara itu, pada subsektor perikanan, komoditas utama yang berkembang di wilayah ini adalah ikan nila dan lele, yang memiliki prospek pasar yang cukup baik. Selain itu, pengembangan Pusat Unggulan Daerah (PUD) Kota Sukabumi juga didorong melalui penguatan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat daya saing Daerah di tingkat nasional.

Kota Sukabumi dengan karakteristik geografis dan kewilayahannya, hanya memiliki potensi kekayaan alam terutama pada sektor pertanian yang didominasi oleh wilayah pinggiran. Keragaman pertanian masih terbatas pada sub sektor tanaman pangan dan hortikultura. Produksi hasil pertanian Kota Sukabumi menunjukkan penurunan yang signifikan di Tahun 2022, yaitu berkurang sekitar 2.176 ton, namun meningkat pada Tahun 2024 sebesar 20.882 ton, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun

mengalami kenaikan hasil produksi, ancaman terhadap luas lahan cukup besar. Oleh karena itu, langkah strategis untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas pertanian perlu dilakukan, antara lain dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menggalakan *URBAN FARMING*.

Ketersediaan sumber daya alam yang mendukung pengembangan PUD di Kota Sukabumi Tahun 2024, terutama dengan luas wilayah yang mencakup sektor pertanian dan perikanan, antara lain:

a. pertanian padi, dengan luas lahan mencapai 1.295 hektar dan total produksi pertanian mencapai 20.882 ton pada Tahun 2024, menunjukkan produktivitas hasil pertanian yang sangat positif. Meskipun demikian, ketersediaan lahan tentu masih menjadi tantangan yang perlu diberi perhatian serius melalui kebijakan strategi untuk memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menggalakan *urban farming*.
b. perikanan, dengan total capaian produksi perikanan (tangkap dan budidaya) mencapai 100,20 ton pada Tahun 2024, mendukung produksi ikan yang berkelanjutan dan dapat memenuhi permintaan pasar domestik serta kebutuhan industri pengolahan perikanan.

Adapun ekonomi kreatif Kota Sukabumi menunjukkan kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Didukung dengan generasi produktif Kota Sukabumi sebesar 68,8%% (251.460) di Tahun 2024, maka jumlah pelaku ekonomi kreatif sudah meningkat lebih dari 500 pelaku yang terdata. Dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang teraktivasi, terdapat 4 subsektor yang yang paling potensial, yaitu kuliner, musik, seni pertunjukan, dan kriya.

Dengan kombinasi potensi sumber daya alam yang melimpah dan dukungan sektor kreatif serta pariwisata, Kota Sukabumi memiliki peluang besar untuk mengembangkan PUD sebagai motor penggerak ekonomi Daerah yang lebih maju dan berkelanjutan.

2.2 Gambaran Umum Riset dan Inovasi Daerah

Inovasi memainkan peran krusial dalam meningkatkan daya saing daerah untuk menghadapi persaingan di tingkat regional, nasional, dan global. Dalam era global saat ini, pembangunan harus mengedepankan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) serta Inovasi sebagai faktor kunci pembentuk daya saing atau yang dikenal dengan istilah *INNOVATION-DRIVEN development*. Strategi pembangunan yang efektif harus tidak hanya fokus pada efisiensi tetapi juga pada pengembangan Inovasi dengan memanfaatkan Iptek secara optimal.

Riset dan Inovasi di Kota Sukabumi diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai pelaksana Riset dan Inovasi daerah. Sesuai dengan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, Pasal 2 ayat (2) menetapkan bahwa Riset dan Inovasi di tingkat kabupaten/kota harus diselenggarakan oleh BRIDA kabupaten/kota. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa pembentukan BRIDA kabupaten/kota dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan dan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang mengelola urusan penelitian dan pengembangan Daerah.

Bappeda Kota Sukabumi menjalankan fungsi Riset dan Inovasi berdasarkan RPJMD dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Struktur kelitbangan di Pemerintah Kota Sukabumi berada pada tingkat bidang (eselon 3) di Bappeda, yaitu bidang penelitian dan pengembangan (litbang). Saat ini, bidang litbang terdiri dari satu kepala bidang, dua kepala subbidang, dan satu pelaksana yang juga diberi tugas tambahan sebagai bendahara pengeluaran pembantu. Berikut merupakan gambaran ekosistem Riset dan Inovasi Kota Sukabumi:

1. Hasil Riset dan Inovasi

Riset yang dilakukan di Kota Sukabumi pada periode Tahun 2017 hingga Tahun 2023 tercatat sebanyak 60 kajian dengan berbagai fokus utama yang mencakup berbagai sektor pembangunan Daerah. Fokus utama dari Riset tersebut meliputi pemetaan potensi ekonomi dan lingkungan, perencanaan pengembangan kota, serta kajian terkait sektor infrastruktur, sosial, dan ekonomi kreatif. Tabel berikut menyajikan rincian kajian Riset yang dilakukan di Kota Sukabumi selama periode tersebut.

Tabel 3. Kajian Riset Kota Sukabumi Tahun 2017-2025

No	Tahun	Kajian Riset	Jumlah Kajian
1	2017	Pemetaan Potensi Ekonomi dan Lingkungan, Pengaruh Pembangunan Tol Bocimi, dan *Smart City*	4
2	2018	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Kelitbangan, Proyeksi Perparkiran, Roadmap Tunjangan Jabatan, Penyelenggaraan HKI, Budhi Praja, Manajemen Persampahan, Pengembangan Pariwisata, Perumda, *Public Private Partnership,* Ekonomi Kreatif, dan Kota Layak Huni.	21
3	2019	Pengelolaan *Database*, Kajian Pentahelix, Pemetaan Sumber Daya Manusia, Kota Layak Huni, Pengembangan Ipteks, dan *Updating* e-Litbang.	9
4	2020	Kajian Kota Layak Huni, Pembangunan Kependudukan, Sumber Air Baku, dan Naskah Akademik Inovasi Daerah	4
5	2021	Analisa Standar Biaya, Kajian Aset Pemerintah, Perpajakan, dan *Legal Opinion*.	4
6	2022	Kajian Peningkatan Kualitas SDM, Tambahan Penghasilan Pegawai, Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA), Komuter Penduduk, *City Branding*, Pengembangan Perdagangan dan Jasa, dan Kepuasan Kinerja Pemerintah.	10
7	2023	Optimalisasi Pendapatan Pajak Bumi Bangunan Kelurahan dan Perkotaan, *Background Study* RPJPD Kota Sukabumi bidang ekonomi, infrastruktur wilayah, kesehatan, pemerintah, pendidikan, dan sosbud trantibum, serta Kebijakan Inovasi.	8
8	2024	Kajian Modal Sosial dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Sukabumi; Kajian Pemetaan Ekonomi Kreatif di Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024; Kajian Pengendalian Inflasi melalui Penguatan Sektor Non-Pangan: Strategi Pengembangan Ekonomi Kota Sukabumi; Kajian Produk Unggulan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024; Kajian Rekomendasi Kebijakan Inovasi di Kota Sukabumi; Kajian Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) Kota Sukabumi Tahun 2025–2029	6
9	2025	Kajian Penyusunan Obyek Pemajuan Kebudayaan sebagai Warisan Budaya Takbenda Kota Sukabumi (Provinsi dan Nasional); Kajian Penyusunan Pola Distribusi Sembako (Fokus Komoditas Beras dan Minyak Goreng) Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2025; Kajian Pemetaan Potensi Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Perhotelan serta Makanan dan Minuman Kota Sukabumi Tahun 2025; Kajian Audit Eksternal terhadap PD Waluya Kota Sukabumi; Kajian Respons Publik terhadap Tata Batas Kota Sukabumi melalui Survei Publik dan Stakeholder Forum; Kajian Pengembangan Wilayah Kota Sukabumi.	6
		Total	72

Pada Tahun 2024, Kota Sukabumi berhasil mencatat sebanyak 305 Inovasi dan penghargaan Kota Terinovatif dalam ajang *Innovative Government Award* (IGA) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Capaian ini

meningkat signifikan dari prestasi Tahun 2023 yang berjumlah 258 Inovasi. Inovasi ini tersebar di berbagai lembaga dan unit, dengan rincian sebagai berikut: perangkat daerah menyumbang 35 Inovasi, RSUD mendapat 28 Inovasi, UPTD Labkesda dan Puskesmas menghasilkan 149 Inovasi, Kecamatan menciptakan 20 Inovasi, Kelurahan berkontribusi 63 Inovasi, Sekolah mencatat 8 Inovasi, dan BUMD meraih 2 Inovasi. Dari segi jenis, Inovasi terbagi ke dalam Inovasi NonDigital sebanyak 197 dan Inovasi Digital berjumlah 108.

2. Kelembagaan dan Struktur

Bappeda berdasarkan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 155 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan. Peraturan Wali Kota ini menetapkan susunan organisasi sebanyak 5 (lima) bidang salah satunya adalah bidang penelitian dan pengembangan yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda dalam urusan penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi, dan pemerintahan, serta penelitian dan pengembangan pembangunan, inovasi, dan teknologi. Oleh karena itu, struktur kelitbangan di Pemerintah Kota Sukabumi berada pada tingkat bidang (eselon 3) di Bappeda, yaitu bidang penelitian dan pengembangan (litbang). Saat ini, Bidang litbang terdiri dari satu kepala bidang, dua kepala subbidang, dan satu pelaksana yang juga diberi tugas tambahan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu. Bidang penelitian dan pengembangan memiliki fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang penelitian dan pengembangan berdasarkan program kerja Bappeda serta petunjuk Kepala Bappeda sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
c. penyiapan bahan serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
d. pelaksanaan pengkajian kebijakan dan pengkajian peraturan;
e. fasilitasi dan pelaksanaan Inovasi Daerah;
f. penyusunan rencana kerja lingkup bidang penelitian dan pengembangan;
g. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
h. pengelolaan data terkait penelitian dan pengembangan, Inovasi dan teknologi;
i. pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat daerah, instansi atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
j. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang penelitian dan pengembangan; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Pendanaan dan Sumber Daya

Dalam rangka pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan, Bappeda Kota Sukabumi mengalokasikan anggaran pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang diturunkan pada 2 (dua) kegiatan yaitu (i) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, serta (ii) Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Berikut adalah realisasi anggaran Program Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap APBD Kota Sukabumi:

Tabel 4. Realisasi APBD terhadap Anggaran Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sukabumi

KETERANGAN	TAHUN					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Realisasi APBD (Rp)	1.202.030.934.576	1.201.051.026.976	1.251.736.198.234	1.277.025.782.658	1.330.988.720.211	1.322.623.000.000
Realisasi Anggaran Program Litbang (Rp)	411.951.400	673.478.800	988.031.816	1.202.749.680	1.231.797.000	1.007.715.800
Realisasi Anggaran Litbang terhadap APBD (%)	0,034	0,056	0,079	0,094	0,92	0.076

Dalam tiga tahun terakhir, persentase anggaran Program Litbang terhadap APBD mengalami penurunan. Dalam hal ini, anggaran terhadap kebijakan Inovasi berbasis Riset perlu mendapat dukungan untuk keberlanjutan Riset dan Inovasi Daerah.

4. Infrastruktur dan Teknologi

Secara umum infrastruktur bagi Riset dan Inovasi di Kota Sukabumi masih belum tersedia, baik berupa kebun raya, Kawasan Sains dan Teknologi (KST), Inkubator maupun pusat Inovasi. Namun demikian terdapat beberapa laboratorium penunjang tugas fungsi beberapa perangkat daerah yang kedepannya memungkinkan untuk dikembangkan bagi daya dukung kegiatan Riset dan Inovasi sebagai berikut:

Tabel 5. Laboratorium Tahun 2019-2022

URAIAN	PERANGKAT DAERAH/BUMD	STATUS	SDM LABORAN	JENIS LAYANAN
Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)	Dinas Kesehatan	Terakreditasi penuh	15	• Laboratorium patologi klinik • Laboratorium mikrobiologi • Laboratorium kimia • Biomolekuler
Gedung Uji Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Terakreditasi B	15	Pengujian dan pemeriksaan dimensi dan fisik kendaraan
Lab Perumda Tirtabumi Wibawa	PDAM	Belum terakreditasi	3	Pengujian air bersih layak minum
UPTD Laboratorium dan Alat Berat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belum terakreditasi	1	Uji beton
Lab Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Belum terakreditasi	4	Pengujian Lingkungan Hidup (air dan udara)

a. Labkesda, milik pemerintah Kota Sukabumi yang memiliki kemampuan pemeriksaan meliputi bidang patologi klinik, mikrobiologi, dan kimia lingkungan. Pemeriksaan yang bisa dilakukan adalah mendeteksi penyakit, menentukan risiko, memantau perkembangan penyakit, dan memantau perkembangan pengobatan;
b. Laboratorium/Gedung Uji Kendaraan Bermotor mendorong transportasi publik yang aman dan nyaman;
c. Lab Perumda Tirtabumi Wibawa, merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Sukabumi yang bergerak dalam bidang penyediaan air bersih, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya

Sukabumi Nomor 3/PD/1975 tanggal 28 Agustus 1975, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomr 5 Tahun 2019 menjadi Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi. Fasilitas yang tersedia meliputi *FLOCCULAR*, *turbidity meter*, *HANDHELD colorimeter*, komparator pendeteksi klor dan pH, analisis mikrobiologi dengan metode Most Probable Number (MPN);

d. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Laboratorium dan Alat Berat, bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang laboratorium dan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Dinas PUTR) Kota Sukabumi. Armada alat berat yang ada saat ini sebanyak 5 unit, yakni 2 mesin gilas 4 ton (Sakai SW 500), 1 mesin gilas 2,5 ton (Sakai SW 330), 1 mesin gilas 6 ton (Barata), dan 1 kendaraan dump truck. Tak hanya itu, ada alat pemadat kodok (mesin stamper) 2 unit, alat pemadat kuda (mesin stamper) 1 unit; dan
e. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi memiliki fasilitas untuk pengujian air sungai untuk perhitungan IKLH, pengujian air limbah terkait pertek dan pemantauan), serta pemasangan alat ukur udara ambien metode *PASSIVE SAMPLER*.

5. Kebijakan dan Regulasi

Dalam rangka mendorong budaya Inovasi pada Pemerintah Kota Sukabumi telah menerbitkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 66);
b. Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/227-BAPPEDA/2021 tentang Daftar Inovasi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021;
c. Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/190-BAPPEDA/2022 tentang Daftar Inovasi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022;
d. Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/153-BAPPEDA/2023 tentang Daftar Inovasi Daerah Tahun 2023;
e. Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/190-BAPPEDA/2024 tentang Daftar Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;
f. Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/110-BAPPEDA/2025 tentang Daftar Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi; dan
g. Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/389-BAPPEDA/2025 tentang Daftar Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

Adapun regulasi ataupun ketentuan terkait penelitian dan pengembangan secara umum masih belum disusun secara khusus dan spesifik sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah. Pelaksanaan kelitbangan di Pemerintah Kota Sukabumi saat ini masih mengacu secara langsung pada regulasi yang lebih tinggi baik provinsi maupun pusat.

6. Kolaborasi dan Kemitraan

Dalam pelaksanaan kelitbangan utamanya terkait Riset, dikarenakan tidak adanya sumber daya manusia peneliti disamping keterbatasan jumlah personel yang ada, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah melakukan kesepakatan bersama dengan beberapa perguruan tinggi sebagai berikut.

Tabel 6. Daftar Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI	NOMOR MoU	PERIHAL	MASA BERLAKU
1	Universitas Nusa Putra	02/MoU/Pem/2021 02/MOU/UNsP/ II/2021	Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	5 tahun
2	Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD	04/MoU/Pem/2021	Peningkatan Pembangunan di Kota Sukabumi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Transportasi Darat Indonesia (STTD)	5 Tahun
3	Institut Teknologi Nasional Bandung	19/PKS/Pem/2021	Kerja Sama Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Serta Jasa Keprofesian Pendidikan.	3 tahun
4	Universitas Padjadjaran	07/MoU/Pem/2021 351/UN6.RKT/ MOU/2021	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Sukabumi melalui Tridarma Perguruan Tinggi	5 Tahun
5	Institut Teknologi Nasional Bandung	11/MOU/ Pem/2021 024/M.I.03.04/ Rektorat/ Itenas/ VI/2021	Kerja Sama di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian/ Pengkajian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Jasa Keprofesian Pendidikan	3 tahun
6	Institut Teknologi Nasional Bandung	11/MoU/Pem/2021	Kerja Sama di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian/ Pengkajian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Jasa Keprofesian Pendidikan	5 Tahun
7	Institut Teknologi Nasional Bandung	19/MPKS/ Pem/2021 0943/M/01.01/ FTSP/ Itenas/X/2021	Program Magang dan Penelitian dalam Rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	2 tahun
8	Universitas Muhammadiyah Sukabumi	075/1294/ Bappeda/2 021 2034/III.3/F/2021	Implementasi kerja sama bidang penelitian	5 tahun
9	Yayasan Buana Pratama Sukabumi	03/kesber/ pem/2022 019/ K01.YBP/ KESBER. VI.2022	Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kota Sukabumi	5 Tahun

Di samping itu, guna menunjang kebutuhan penyediaan kajian sebagai dasar perumusan kebijakan. Terdapat beberapa kajian yang dihasilkan dari kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki tenaga ahli/akademisi dari perguruan tinggi sebagai berikut:

1. Kajian Potensi Bisnis Pengembangan Lahan Eks Terminal Sudirman Tahun Anggaran 2021, bekerja sama dengan Tenaga Ahli dari Universitas Indonesia;
2. Penyusunan Kajian Komuter Penduduk Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2022, bekerja sama dengan Tenaga Ahli dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI); dan
3. *Background Study* RPJPD Kota Sukabumi Bidang Ekonomi Tahun Anggaran 2023, bekerja sama dengan Tenaga Ahli dari Institut Pertanian Bogor.

7. Pencapaian dan Tantangan

Berdasarkan data Indeks Inovasi Daerah Kota Sukabumi tahun 2021–2025, terlihat bahwa Kota Sukabumi telah berhasil mencapai kategori sangat inovatif pada Tahun 2021 hingga Tahun 2025. Gambar 9 menunjukkan capaian sebagai berikut:



Gambar 9. Indeks Inovasi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021-2025
Sumber: BAPPEDA KOTA SUKABUMI, 2025

Pertumbuhan ekosistem Inovasi di Kota Sukabumi didukung oleh pengembangan pilar dinamika bisnis dan kapasitas Inovasi. Meskipun pilar kesiapan teknologi tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, pertumbuhan pilar bisnis terutama didorong oleh perbaikan dalam kebijakan dan peningkatan kewirausahaan. Selain itu, pilar kapasitas Inovasi mengalami pertumbuhan yang sangat dipengaruhi oleh dimensi interaksi, keberagaman, serta peningkatan dalam penelitian.

Walaupun Kota Sukabumi sudah berada dalam kategori sangat inovatif, masih ada ruang untuk meningkatkan kesiapan teknologi dan memperkuat integrasi antar pilar Inovasi. Peningkatan ini akan memperkuat daya saing daerah dan mendukung pencapaian yang lebih tinggi dalam pengembangan Inovasi kedepannya.

2.3 Penentuan Tema Prioritas: Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, terdapat 6 (enam) elemen penting yang digunakan untuk mengelompokkan hasil identifikasi kondisi ekosistem Riset dan Inovasi di daerah. Elemen-elemen ini meliputi:

1. kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah;
2. kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi;
3. kemitraan Riset dan Inovasi;
4. budaya Riset dan Inovasi;
5. keterpaduan Riset dan Inovasi di daerah; dan
6. penyelarasan dengan perkembangan global.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tema yang dipilih sebagai prioritas penguatan Riset dan Inovasi untuk mendukung misi pembangunan jangka panjang Kota Sukabumi adalah Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan. Tema ini dipilih untuk mencapai sasaran visi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045, yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kota, kesejahteraan masyarakat, kepemimpinan daerah, kualitas SDM, serta kualitas lingkungan hidup.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan tema yang dipilih sebagai prioritas penguatan Riset dan Inovasi untuk mencapai misi pembangunan jangka panjang daerah, dengan identifikasi kondisi ekosistem Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan enam elemen penguatan. Pada masing-masing elemen penguatan ekosistem Riset dan Inovasi, ditentukan sejumlah area penguatan yang dianggap perlu untuk diperkuat.

Tabel 7. Tema prioritas ekosistem Riset dan Inovasi serta kondisi saat ini

Tema Prioritas Ekosistem dan Inovasi Saat Ini di Kota Sukabumi			
Tema prioritas Riset dan Inovasi Kota Sukabumi adalah **"Riset dan Inovasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan"**			
Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas			
Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
No	**Area Kondisi**	**Kekuatan**	**Kelemahan**
1	Kebijakan penguatan Riset dan Inovasi	Kota Sukabumi telah menerapkan beberapa kebijakan dan inisiatif yang mendukung penguatan Riset dan Inovasi daerah. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah, yang bertujuan mempercepat peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Masih terbatasnya implementasi di lapangan karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, anggaran, partisipasi masyarakat, dan integrasi program daerah lainnya.
2	Kebijakan penguatan Riset dan Inovasi untuk pengembangan pertanian dan perikanan	Pemerintah Kota Sukabumi mendukung pengembangan pertanian dan perikanan ditandai dengan adanya Peraturan Walikota Sukabumi No. 18 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota No. 28 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sukabumi 2018 – 2023. Melalui DKP3, Kota Sukabumi berupaya memaksimalkan potensi Kawasan Agro eduwisata Cikundul untuk produksi pertanian, perikanan, dan peternakan; edukasi; wisata; dan konservasi.	Infrastruktur Riset di sektor ini masih terbatas, sehingga memerlukan tambahan sumber daya untuk optimalisasi program.
3	Kebijakan penguatan Riset dan Inovasi untuk pengembangan ekonomi kreatif	Pemerintah Kota Sukabumi membentuk *Sukabumi Creative Hub* dan menggagas program Dana Kitri (Dana Stimulus Ekonomi Kreatif) untuk mendukung kreativitas generasi muda dan komunitas	Adanya keterbatasan pendanaan dan fasilitas pengembangan Inovasi bagi pelaku ekonomi kreatif yang lebih kecil.
4	Kebijakan penguatan Riset dan Inovasi untuk pengembangan pariwisata	Pemerintah Kota Sukabumi menerapkan *smart city* dengan teknologi digital untuk promosi wisata. Terdapat kebijakan mengenai pengembangan Pariwisata ditandai dengan adanya Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2017-2025	Kegiatan ini masih dalam tahap awal, dan keterbatasan teknologi menjadi tantangan untuk memperluas cakupan promosi.
5	Infrastruktur digital dan *database* kondisi pembangunan daerah	Pemerintah Kota Sukabumi telah mengembangkan infrastruktur digital dan *data base* untuk mendukung tata kelola pemerintahan berbasis data dan peningkatan transparansi, seperti portal *Open Data Kota Sukabumi*	Masih terdapat keterbatasan integrasi aplikasi, keamanan data, kapasitas sumber daya manusia, serta anggaran dan dukungan teknis.
		(https://opendata.sukabumikota.go.id/) dan *Simponi* (Sistem Manajemen Pemerintah Online) https://simponi.sukabumikota.go.id/), yang memudahkan akses publik terhadap data pembangunan dan pelayanan publik.	

6	*DATABASE* Inovasi daerah	Kota Sukabumi memiliki *E-RIDA* (https://e-rida.sukabumikota.go.id/) untuk mempermudah akses informasi data Riset dan Inovasi daerah	Masih dalam pengembangan dan terbatasnya integrasi data di antara berbagai instansi daerah.
7	Infrastruktur Riset dan Inovasi perguruan tinggi	Akademisi (perguruan tinggi) mendukung penuh dalam pengembangan Riset dan Inovasi daerah. Beberapa perguruan tinggi yang telah berkolaborasi: Universitas Nusa Putra, Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD, Institut Teknologi Nasional Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dan Yayasan Buana Pratama Sukabumi.	Terbatasnya fasilitas penelitian khusus di sektor pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif.
8	Infrastruktur Riset dan Inovasi berupa balai penelitian dan lab pengujian	Saat ini , kegiatan Riset dan Inovasi daerah dibantu oleh laboratorium penunjang, seperti Balai penelitian dan lab pengujian di Kota Sukabumi mendukung yakni Labkesda, Gedung Uji Kendaraan Bermotor, Lab Perumda Tirta Bumi Wibawa, UPTD Lab dan Alat Berat, serta Lab Lingkungan.	Secara umum infrastruktur bagi Riset dan Inovasi di Kota Sukabumi masih belum tersedia, baik berupa kebun raya, kawasan sains dan teknologi (KST), Inkubator maupun pusat Inovasi.
9	Infrastruktur penghela ekonomi di tingkat kelurahan berbasis Riset dan Inovasi	Jika dilihat dari kelurahan yang berpotensi besar menjadi pendorong ekonomi berbasis Riset dan Inovasi adalah: - Cikundul dengan Kawasan agrowisata yang menggabungkan pertanian organik dan wisata berbasis alam - Sukakarya dengan pengembangan produk pertanian - Karangtengah dengan Digitalisasi UMKM - Gunung Puyuh dengan pengembangan ekonomi berbasis kreatif dan Pariwisata - Cikole dan Baros dengan Pemberdayaan dan - Digitalisasi UMKM - Kebonpedes dengan usaha berbasis pertanian organik dan agrowisata Di samping itu, Pemerintah Kota Sukabumi mengadakan program *Kece* (*KELURAHAN Entrepreneur Center*) untuk mendukung pengembangan UMKM dan wirausaha baru di kelurahan.	Masih terbatasnya kolaborasi dan sinergi antar kelurahan
10	Pendanaan CSR perusahaan	Telah dilaksanakannya program Gesari (Gerakan Desa Berdikari) yang diinisiasi dan dilakukan oleh PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi untuk mendukung perkembangan UMKM dan pemberdayaan kelurahan-kelurahan di sekitar area operasi mereka, termasuk Kota Sukabumi. Program ini telah menghasilkan lebih dari 50 UMKM lokal, dengan total pendanaan mencapai sekitar Rp 143 juta untuk pelatihan dan pengembangan usaha pada tahun 2021-2022.	Tidak semua kebutuhan Riset dan Inovasi dapat didanai oleh platform ini, dan donasi publik terbatas pada kasus sosial tertentu.
11	Fasilitasi hak kekayaan intelektual	Pemerintah Kota Sukabumi telah berupaya memfasilitasi hak kekayaan intelektual untuk karya kreatif. Tahun 2020, telah dilaksanakan sosialisasi mengenai HKI dan hak merek kepada pelaku IKM dan memfasilitasi pendaftaran HKI melalui anggaran APBD.	Masih terbatasnya sosialisasi dan akses bagi pelaku usaha kecil untuk mendaftarkan kekayaan intelektual mereka.

Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas			
A. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi di Daerah			
No	**Area Kondisi**	**Kekuatan**	**Kelemahan**
1	Kelembagaan Riset dan Inovasi di bidang pertanian dan perikanan	Sukabumi memiliki program kolaboratif seperti Riset Pengembangan Inovatif Kolaboratif (RPIK) yang fokus pada pertanian dan perikanan untuk meningkatkan kemandirian pangan. Salah satunya, seperti pada budidaya ikan nila jantan melalui teknologi "Nila Gesit" yang meningkatkan efisiensi produksi ikan.	Masih terbatasnya jumlah kelompok usaha petani berbasis kelembagaan ekonomi yang terstruktur sehingga perlu adanya transformasi kelembagaan
2	Kelembagaan Riset dan Inovasi di bidang ekonomi kreatif dan pariwisata	Terdapatnya Komite Kreatif Kota Sukabumi yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Sukabumi dalam membahas program pengembangan 17 subsektor ekonomi kreatif. Kota Sukabumi telah melakukan pemetaan pariwisata dengan pendekatan ekonomi kreatif, mencakup industri kuliner, musik, fotografi, *fashion*, dan kriya.	Belum terintegrasinya pemetaan potensi wisata dalam satu sistem, kurangnya promosi, dan belum berjalannya koordinasi antar sektor dalam implementasinya.
3	Kelembagaan pendukung Riset dan Inovasi di tingkat kelurahan	Beberapa kelurahan sudah mulai membentuk kelompok- kelompok tani atau usaha lokal untuk mendukung ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota melalui Bappeda juga rutin mengadakan Bimtek untuk mendorong Inovasi daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan	Keterbatasan akses terhadap teknologi dan pendanaan masih menjadi tantangan bagi lembaga-lembaga kecil di tingkat kelurahan untuk berkembang dan berinovasi.
4	Penentuan Produk Unggulan Daerah Berbasis Bukti	Kebijakan yang mengarah pada pemetaan produk unggulan berbasis data di beberapa sektor di Kota Sukabumi telah dilakukan dan didokumentasikan dalam Kajian PUD Kota Sukabumi Tahun 2024	Masih diperlukan penguatan data dan Riset untuk mendukung penentuan produk unggulan yang lebih komprehensif di seluruh wilayah dan sektor.

Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas			
B. Kemitraan Riset dan Inovasi			
No	**Area Kondisi**	**Kekuatan**	**Kelemahan**
1	Platform kemitraan Riset dan Inovasi	Untuk mendukung kemitraan Riset dan Inovasi di Kota Sukabumi, ada beberapa platform yang dapat diakses. Salah satunya adalah E-RIDA (Elektronik Riset dan Inovasi Daerah), dapat diakses https://e-rida.sukabumikota.go.id/	Masih terdapat keterbatasan dalam koordinasi antar aktor serta perlunya penguatan dukungan dari sektor industri untuk mempercepat transfer teknologi dan hasil Riset menjadi Inovasi yang lebih aplikatif
2	Kemitraan Riset dan Inovasi sektor pertanian dan perikanan	Pemerintah Kota Sukabumi melalui DKP3 aktif melibatkan akademisi dan peneliti untuk melakukan Riset dan mengembangkan Inovasi di bidang pertanian dan perikanan, seperti pengembangan pertanian organik, pengolahan hasil pertanian, dan pengembangan Inovasi SMART-K untuk bidang perikanan bersama Universitas Muhammadiyah Sukabumi.	Masih terbatasnya infrastruktur dan pendanaan serta sinergi antar *stakeholder*

3	Kemitraan Riset dan Inovasi sektor ekonomi kreatif dan pariwisata	Kemitraan Riset dan Inovasi di sektor ekonomi kreatif dan pariwisata di Kota Sukabumi melibatkan beberapa platform dan inisiatif penting. Salah satunya adalah Sukabumi *Creative Hub* (SCH), yang berperan sebagai pusat bagi pelaku ekonomi kreatif. Selain itu, Kota Sukabumi juga aktif menyelenggarakan acara-acara seperti Ekraf Summit, yang mempertemukan pelaku ekonomi kreatif dari berbagai daerah untuk berbagi pengalaman dan memajukan sektor ini di tingkat provinsi	Masih terbatasnya SDM terlatih, infrastruktur, dan sinergi antar *stakeholder*, serta kurangnya fokus pada pengembangan produk lokal.

Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas			
C. Budaya Riset dan Inovasi			
No	**Area Kondisi**	**Kekuatan**	**Kelemahan**
1	Budaya kreatif dan inovatif di bidang pertanian dan perikanan	Telah lahir beberapa Inovasi berbasis teknologi di bidang pertanian dan perikanan, seperti pertanian di lahan terbatas, pengembangan budidaya ikan dengan akuaponik, penerapan SMART- K dalam budidaya ikan, pengembangan pertanian organic, serta pengolahan hasil perikanan yang bermitra dengan perguruan tinggi di Kota Sukabumi.	Inovasi belum seluruhnya diketahui dan dipahami oleh petani dan pembudidaya, serta adanya keterbatasan pendanaan untuk implementasi teknologi di lapangan.
2	Budaya kreatif dan inovatif di bidang ekonomi kreatif dan pariwisata	Beberapa bentuk upaya meningkatkan ekonomi kreatif dan pariwisata adalah dibentuknya SCH, diluncurkannya program Dana Kitri, dikembangkannya pariwisata berbasis komunitas, dan digunakannya teknologi digital berupa program Sukabumi Digital *Village*.	Belum meratanya adopsi teknologi di kalangan pelaku ekraf, khususnya IKM serta kurangnya jaringan pemasaran yang kuat di tingkat nasional dan internasional.
3	Potensi pengembangan usaha di sektor pertanian dan perikanan	Kota Sukabumi memiliki potensi besar dalam perkembangan pertanian organik dan agrowisata, pengolahan produk pertanian dan perikanan, serta pengembangan budidaya ikan pada lahan terbatas.	Masih terbatasnya akses pasar yang memadai.
4	Pengembangan wirausaha baru melalui pengembangan UMKM	Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan menyelenggarakan berbagai pelatihan dan inkubasi bisnis untuk pelaku UMKM. Selain itu, adanya program Dana Kitri dan program digitalisasi UKM dapat meningkatkan daya saing produk dan membuka akses pasar lebih luas.	Masih terbatasnya keterampilan teknis di bidang pemasaran digital bagi sebagian besar UMKM serta adanya kesenjangan kualitas produk dengan permintaan pasar global.

Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas			
D. Keterpaduan Riset dan Inovasi			
No	**Area Kondisi**	**Kekuatan**	**Kelemahan**
1	Sinkronisasi kebijakan pembangunan pertanian dan perikanan pusat dan daerah	Sinkronisasi kebijakan pembangunan pertanian dan perikanan antara pemerintah pusat dan daerah Kota Sukabumi telah berjalan, terutama dalam hal adopsi teknologi pertanian dan perikanan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Melalui berbagai program seperti Pertanian Organik dan Akuaponik, serta pengembangan Budidaya Ikan dengan SMART-K, Kota Sukabumi mampu mengintegrasikan kebijakan nasional tentang ketahanan	Masih terdapat tantangan implementasi di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur (misal saluran irigasi), serta koordinasi antar lembaga

		pangan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan kondisi lokal.	
2	Pengembangan klaster industri	Beberapa klaster industri yang dikembangkan di Kota Sukabumi adalah industri kreatif, pertanian dan agrowisata, perikanan, serta UMKM dan digitalisasi.	Masih adanya ketergantungan pada sektor tertentu dan kurangnya diversifikasi industri yang menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi.
3	Pengembangan produk unggulan daerah Kota Sukabumi	Produk unggulan yang dikembangkan di Kota Sukabumi adalah pertanian bahan pangan (padi), perikanan (nila dan lele), produk kreatif (kerajinan, makanan dan minuman lokal), serta pariwisata.	Kurangnya promosi produk unggulan secara efektif ke luar daerah, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya standarisasi kualitas produk.

Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas			
E. Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
No	**Area Kondisi**	**Kekuatan**	**Kelemahan**
1	Adopsi teknologi global dan Inovasi berkelanjutan di sektor pertanian dan perikanan	Dalam sektor pertanian dan perikanan, Kota Sukabumi sudah mengadopsi beberapa teknologi, seperti pertanian organik, aquaponik, dan budidaya ikan dengan sistem SMART-K yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di bidang pertanian dan perikanan.	Adopsi teknologi di tingkat petani atau pelaku usaha masih cukup lambat karena masih banyak yang belum sepenuhnya terbiasa atau mampu mengimplementasikan teknologi baru karena keterbatasan pengetahuan, keterampilan, dan akses pembiayaan yang memadai.
2	Adopsi teknologi global dan Inovasi berkelanjutan di sektor ekonomi kreatif dan pariwisata	Pemerintah Kota Sukabumi sudah memanfaatkan teknologi digital dalam pengembangan industri kreatif dan pariwisata, seperti Sukabumi Digital *Village*.	Penyebaran informasi masih terbatas, baik promosi ataupun informasi terkait produk dan potensi wisata Kota Sukabumi masih terbatas pada kanal lokal.
3	Kolaborasi global dalam pengembangan Riset dan Inovasi	Kemitraan dengan perguruan tinggi dan Lembaga Riset nasional sangat terbuka dan memiliki peluang untuk dilakukan.	Jaringan kolaborasi internasional di Kota Sukabumi masih terbatas dan belum terorganisir dengan sistematis. Riset yang dihasilkan juga masih terbatas dalam publikasi ilmiah internasional, sehingga dapat menghambat pengakuan dan kesempatan untuk kolaborasi lebih lanjut dengan Riset global.

Dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029, disusun rekomendasi kinerja lima tahun ke depan yang mengacu pada sasaran visi dan sasaran pokok RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045, serta isu strategis jangka menengah Kota Sukabumi, yang meliputi:

a. meningkatnya SDM yang berdaya saing dan berbudaya;
b. terwujudnya masyarakat inklusif dan religius;
c. meningkatnya kewirausahaan lokal dan ekonomi kreatif;
d. terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan baru;
e. meningkatnya daya saing Daerah dan iklim investasi;
f. meningkatnya produktivitas ekonomi dan lapangan pekerjaan;
g. terwujudnya ketahanan air, pangan, dan energi;
h. terciptanya konektivitas dan pemerataan infrastruktur;
i. meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan
j. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif.

Berdasarkan visi, misi, sasaran, serta isu strategis dalam RPJMD dan RPJPD, arah Riset dan Inovasi Kota Sukabumi periode Tahun 2025–2029 difokuskan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Agenda besar ini ditopang oleh 5 (lima) subtema prioritas yang saling terintegrasi, yakni pembangunan manusia, pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata, penguatan lingkungan dan infrastruktur perkotaan, revitalisasi nilai agama, sosial, dan budaya yang inklusif, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang berdaya saing. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila ditopang oleh kualitas sumber daya manusia dan aparatur pemerintahan yang unggul. Memiliki warga dan aparatur pemerintahan yang berkualitas tidak hanya soal daya siang dalam hal pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga kondisi kesehatan yang prima. Maka, pemerintah Kota Sukabumi mendorong pembangunan manusia melalui peningkatan daya saing dan penguatan kesehatan warga dan aparatur pemerintah. Target ini menjadi lebih krusial mengingat keterbatasan sumber daya alam Kota Sukabumi sehingga pemerintah perlu bertumpu pada keunggulan sumber daya manusia yang kompetitif sebagai motor utama diversifikasi ekonomi.

Dalam konteks ini, kekayaan budaya dan potensi pariwisata menjadi modal strategis untuk mengembangkan kota sebagai pusat ekonomi kreatif dan destinasi wisata berkelanjutan, sejalan dengan tren pembangunan kota modern yang menitikberatkan pada kreativitas dan Inovasi manusia. Upaya ini harus didukung oleh infrastruktur perkotaan yang memadai serta lingkungan yang berkualitas, sekaligus diperkuat melalui pelestarian nilai-nilai agama, sosial, dan budaya yang mampu menjaga kohesi sosial dan ketertiban umum. Kota yang berdaya saing tidak hanya ditentukan oleh kualitas infrastruktur fisik, tetapi juga oleh keadaban publik dan internalisasi nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat yang sama, aparatur pemerintahan sebagai garda terdepan pembangunan dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme untuk menghadirkan layanan publik yang efektif, adil, dan berkualitas. Kelima prioritas ini bersifat saling terkait dan saling menguatkan, sehingga pencapaiannya harus dilakukan secara simultan dan terintegrasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif dan berkelanjutan.

2.3.1 Sub Tema Prioritas: Pembangunan Manusia

Daya saing sumber daya manusia suatu wilayah dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup tiga komponen utama: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Dalam konteks pendidikan, IPM menilai rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) sebagai indikator penting. Dalam konteks kesehatan, IPM dinilai dari umur harapan hidup, sementara dari standar hidup dinilai dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan.

IPM Kota Sukabumi di tahun 2025 masuk dalam kategori tinggi (interval 70- 79 poin). Naik cukup signifikan sekitar 0,54 poin dari 77,69 di Tahun 2024 menjadi 78,23 pada Tahun 2025. Kenaikan IPM terjadi pada semua komponen yaitu usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita disesuaikan.

Tabel 8. Komponen IPM Kota Sukabumi tahun 2020 – 2025
Sumber: BPS KOTA SUKABUMI (2025) (DIOLAH)

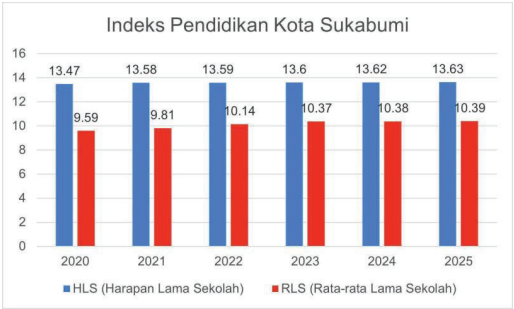
Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umur Harapan Hidup	Tahun	74,23	74,38	74,64	74,89	75,11	75,45
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,47	13,58	13,59	13,6	13,62	13,63

Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,59	9,81	10,14	10,37	10,38	10,39
Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan	Ribu Rupiah	10.999	10.942	11.229	11.999	12.252	12.692
IPM		75,06	75,44	76,24	77,16	77,69	78,23

A. Pendidikan

Indeks Pendidikan Kota Sukabumi menunjukkan tren menanjak setiap tahun selama Tahun 2020-2025 (Gambar 9). Selama periode Tahun 2020 hingga Tahun 2025, rata-rata pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Sukabumi sebesar 0,24 persen per tahun. Pada Tahun 2025, HLS Kota Sukabumi mencapai 13,63 tahun, yang berarti anak umur 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan setara jenjang Diploma II. Sementara itu pada periode yang sama, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Sukabumi rata-rata tumbuh sebesar 1,62 persen per tahun. Pada Tahun 2025, RLS Kota Sukabumi mencapai 10,39 tahun atau setara dengan menyelesaikan masa pendidikan hingga menamatkan SMA kelas X. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kota Sukabumi yang lebih baik.

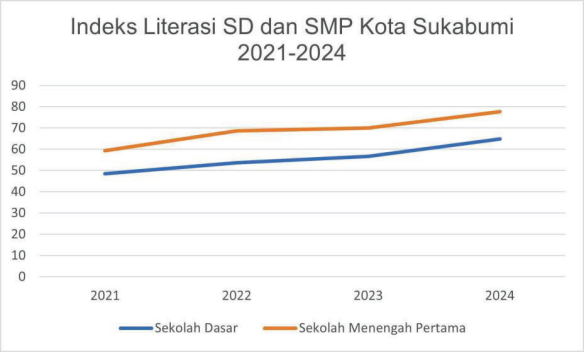
Meskipun demikian, kualitas pendidikan di Kota Sukabumi masih perlu dilakukan dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Upaya yang perlu dilakukan adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar formal maupun nonformal/kesetaraan, bantuan untuk siswa-siswi kurang mampu, dan pemberdayaan satuan pendidikan nonformal berbasis kemasyarakatan.



Gambar 10. Indeks Pendidikan Kota Sukabumi Tahun 2020-2025

Sumber: BPS KOTA SUKABUMI (DIOLAH)

Berdasarkan rapor pendidikan Kota Sukabumi, rata-rata kemampuan literasi siswa Tahun 2024 masuk dalam kategori BAIK dengan nilai literasi Sekolah Dasar (SD) 64,86 dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 77,59. Capaian tingkat literasi ini meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai: 56.6 untuk SD dan 69.92 untuk kategori SMP. Adapun numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional masuk dalam kategori SEDANG dengan nilai numerasi siswa SD 55,25 dan SMP 66,66. Meskipun masih berkategori SEDANG, capaian Tahun 2024 meningkat dari Tahun 2023: 41.54 untuk SD dan 57.83 untuk SMP. Indeks pembangunan literasi masyarakat Kota Sukabumi secara umum terus mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir sebagaimana tampak pada grafik berikut.



Gambar 11. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

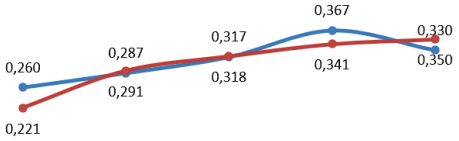
Sumber: RAPOR PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI, 2024 (DIOLAH)

Beberapa tantangan utama yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan literasi masyarakat meliputi peningkatan budaya literasi di tengah dominasi media sosial, keterbatasan sarana perpustakaan yang belum ideal, serta kurangnya jumlah pustakawan yang kompeten. Fokus pada perbaikan fasilitas perpustakaan dan peningkatan kapasitas pustakawan dapat membantu mendorong kembali peningkatan IPM. Selain itu, perlu ada upaya untuk memadukan perkembangan digital dengan budaya literasi, sehingga masyarakat tetap terlibat dalam kegiatan membaca dan menulis, meskipun di tengah arus informasi yang cepat dari media sosial.

B. Kesehatan

Berdasarkan kinerja urusan kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2019-2023, diketahui bahwa terdapat satu indikator yang mengalami penurunan. Indikator yang mengalami penurunan adalah persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Penurunan ini mengindikasikan perlunya peningkatan dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan masyarakat serta peningkatan kesadaran akan pentingnya skrining kesehatan, terutama pada kelompok usia anak pendidikan dasar, orang dewasa usia 15-59 tahun, dan lansia.

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah salah satu fokus capaian pembangunan nasional di bidang kesehatan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat melalui program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Keluarga sehat merupakan pondasi penting untuk masa depan bangsa yang gemilang. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), keluarga sehat mencakup kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan spiritual yang optimal. Secara umum status kesehatan keluarga di Kota Sukabumi cenderung mengalami perbaikan. Hal ini juga tercermin dengan jumlah keluarga tidak sehat dan prasehat yang berkurang.



	2020	2021	2022	2023	2024
Target	0,260	0,287	0,317	0,367	0,330
Realisasi	0,221	0,291	0,318	0,341	0,350

Target Realisasi

Gambar 12. Indeks Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024
Sumber: RPJMD KOTA SUKABUMI 2025 - 2029 (DIOLAH)

Ditinjau dari Umur Harapan Hidup (UHH), pada Tahun 2024 UHH Kota Sukabumi mencapai 71,23 untuk pria dan 75,57 untuk kalangan perempuan. UHH ini cenderung meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi masih rendah jika dibandingkan dengan UHH Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, berdasarkan 12 indikator capaian SPM bidang kesehatan, diketahui 5 indikator belum mencapai 100%. Adapun indikator yang dimaksud yaitu:

a. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
   Target tidak tercapai karena sasaran skrining kesehatan sering kali tidak dalam kondisi sehat pada saat pemeriksaan atau menolak untuk dilakukan skrining kesehatan;
b. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
   Kegagalan dalam mencapai target disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk sasaran yang tidak dalam kondisi sehat saat skrining, penolakan terhadap pemeriksaan, dan ketidaksesuaian identitas sasaran dengan *DATABASE* yang mengakibatkan pelayanan kesehatan yang diberikan tidak terakui oleh aplikasi;
c. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
   Target tidak tercapai karena beberapa kendala, seperti penolakan sasaran untuk mendapatkan layanan skrining kesehatan, keterbatasan jumlah caregiver yang membantu lansia dalam mengakses layanan kesehatan, dan masalah identitas yang tidak sesuai dengan database sehingga pelayanan tidak terakui;
d. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
   Kendala utama adalah ketidaksesuaian identitas sasaran dengan database, yang menyebabkan pelayanan kesehatan yang diberikan tidak terakui oleh aplikasi; dan
e. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
   Target tidak tercapai karena beberapa sasaran tidak dapat ditemukan oleh petugas, dan keluarga sering kali menyembunyikan pasien sehingga menghambat pemberian layanan yang diperlukan.

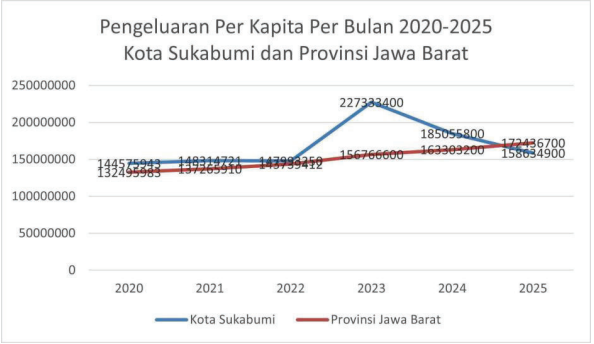
C. Standar Hidup

Standar hidup dinilai dari pengeluaran rata-rata per kapita per bulan, yakni biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran per kapita masyarakat Kota Sukabumi mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada Tahun 2025, pengeluaran rata-rata per kapita per bulan warga Kota Sukabumi di perkotaan dan pinggiran mencapai 1.586.349,00. Jumlah ini turun dari Tahun 2024 yang

mencapai 1.850.558,00 dan Tahun 2023 dengan angka 2.273.334,00. Tren penurunan ini bisa menunjukkan turunnya daya beli masyarakat dan perlambatan ekonomi.

Konsumsi masyarakat Kota Sukabumi pada Tahun 2025 terbagi menjadi dua kategori utama: pengeluaran konsumsi untuk kelompok makanan dan non-makanan. Masyarakat mengalokasikan 51,02 persen dari anggaran mereka untuk konsumsi makanan dan 48,98 persen untuk konsumsi non-makanan.

Lima jenis komoditas makanan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah makanan dan minuman jadi, rokok, padi-padian, daging, serta telur dan susu. Sementara itu, untuk kelompok non-makanan, konsumsi terbesar berasal dari sub-kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga, serta subkelompok aneka barang dan jasa.



Gambar 13. Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan di Kota Sukabumi Tahun 2020-2025

Sumber: BPS JAWA BARAT (DIOLAH)

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa pada Tahun 2025, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi Kota Sukabumi terkait dengan daya saing sumber daya manusia dan pembangunan sosial. Tantangan tersebut meliputi:

a. Rata-rata pendidikan masyarakat masih berada di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, yang menunjukkan perlunya peningkatan akses dan mutu pendidikan. Di sisi lain, kemampuan numerasi siswa berada dalam kategori SEDANG dengan persentase 55,25 persen untuk SD dan 66,66 untuk SMP, yang mencerminkan masih adanya ruang untuk meningkatkan keterampilan dasar ini;

b. Budaya literasi masyarakat mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang mencapai 91,36 pada Tahun 2025, naik dari Tahun 2023 yang hanya mencapai 82,15 dan 87,81 pada Tahun 2024. Meskipun terbilang tinggi capaian IPLM pada Tahun 2025, angka ini masih rendah dibandingkan IPLM pada Tahun 2022 yang mencapai 96,85;

c. Kolaborasi berbagai pihak dalam pengembangan sumber daya manusia kreatif juga belum optimal, sehingga menghambat potensi kreativitas dan Inovasi di kalangan masyarakat. Selain itu, ekosistem digital belum sepenuhnya terbangun, meskipun adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kota Sukabumi telah mencapai skor 4,80 pada Tahun 2024 dan ditargetkan mencapai 4,82 pada Tahun 2025;

d. Kesenjangan dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara laki-laki dan perempuan masih cukup besar, dengan TPAK laki-laki mencapai 81,84 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya 49,70 persen pada

Tahun 2025. Ini menandakan perlunya upaya yang lebih besar untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pasar tenaga kerja; dan

e. Rasio ketergantungan yang stabil di angka 45 juga menunjukkan bahwa Kota Sukabumi perlu memanfaatkan bonus demografi dengan lebih baik untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, dapat disimpulkan gambaran kondisi umum beserta kekuatan dan kelemahan terkait daya saing sumber daya manusia di Kota Sukabumi sebagaimana tercantum dalam Tabel 9.

Tabel 9. Gambaran Umum Daya Saing Kota Sukabumi

No	Area	Kondisi	Kekuatan	Kelemahan
1	Pendidikan	Rata-rata lama sekolah (RLS) Kota Sukabumi Tahun 2025 adalah 10,39 tahun. Harapan lama sekolah (HLS) mencapai 13,63 tahun.	Ada peningkatan RLS dari tahun ke tahun. Ada dukungan kebijakan Pendidikan dan SPM.	RLS masih setara dengan tamatan SMA kelas X, sehingga perlu peningkatan akses Pendidikan tinggi. Kualitas Pendidikan belum merata.
2	Kemampuan Literasi dan Numerasi	Literasi siswa termasuk dalam kategori "baik" sedangkan numerasi dalam kategori "sedang". IPLM naik dari 87,81 pada Tahun 2024 menjadi 91,36 pada Tahun 2025.	Peningkatan literasi siswa SD dan SMP.	Penurunan budaya literasi masyarakat. Sarana perpustakaan serta jumlah pustakawan yang masih terbatas.
	Kesehatan	Umur Harapan Hidup (UHH) Tahun 2024 adalah 71,23 (pria) dan 75,57 (perempuan), meningkat dari tahun sebelumnya. Prevalensi *stunting* di Kota Sukabumi masih berada pada angka 5,69% pada Februari 2024 dengan 1.065 balita *stunted*, dan meningkat menjadi 6,38% pada Juni 2024 dengan 1.291 balita.	Peningkatan UHH dari tahun ke tahun. Penurunan jumlah keluarga tidak sehat dan pra- sehat.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan menurun. Beberapa SPM Kesehatan belum mencapai 100%.
4	Standar Hidup	Pengeluaran per kapita per bulan menurun menjadi Rp 1,586,349,00. Tingkat Kemiskinan di Kota Sukabumi Tahun 2025 adalah 6,9 persen, mengalami penurunan 0,3 persen poin dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 7,2 persen.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat seiring dengan pemulihan ekonomi.	Fluktuasi pengeluaran per kapita selama beberapa tahun terakhir. Konsumsi rokok masih tinggi di antara komoditas lain.
5	Partisipasi Tenaga Kerja	TPAK laki-laki 81,84 % dan TPAK perempuan 49,70 % Tahun 2025.	TPAK laki-laki cukup tinggi.	Kesenjangan TPAK antara laki-laki dan perempuan masih besar, menandakan rendahnya partisipasi perempuan di pasar kerja.
6	Teknologi dan Inovasi	Skor adopsi TIK mencapai 4,80 pada Tahun 2024.	Adopsi teknologi informasi mulai meningkat. Peluang kolaborasi dalam pengembangan SDM kreatif.	Ekosistem digital belum sepenuhnya berkembang.

7	Demografi	Rasio ketergantungan stabil di angka 45.	Rasio ketergantungan yang stabil memberikan peluang bonus demografi.	Potensi bonus demografi belum termanfaatkan dengan baik untuk peningkatan produktivitas.
8	Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, Ketertiban, dan Kesejahteraan	Indeks Kenyamanan Kota Sukabumi Tahun 2022 adalah 22,46. Indeks Rasa Aman Tahun 2025: 77,43	Sukabumi perlu memperbanyak dan menyebar objek wisata serta fasilitas umum agar tidak hanya terpusat di satu lokasi.	Sukabumi berada dalam jalur transportasi antara Jabodetabek dan Bandung Raya, memfasilitasi perdagangan dan mobilitas orang serta barang.

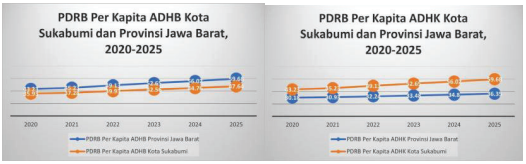
2.3.2 Sub Tema Prioritas: Ekonomi Kreatif dan Pariwisata

Kota Sukabumi menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing ekonomi, terutama dengan dampak perubahan peran Jakarta sebagai kota global. Untuk menghadapi tantangan ini, persiapan infrastruktur yang baik sangat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan membuka peluang pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata, serta investasi, khususnya dalam Riset dan teknologi. Pengembangan sektor-sektor ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan baru dan meratakan potensi Kota Sukabumi.

Namun, kondisi umum daerah menunjukkan bahwa permasalahan kesejahteraan ekonomi masih signifikan. Kesenjangan distribusi kekayaan di Kota Sukabumi tergolong tinggi, dengan Rasio Gini sebesar 0,482, yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, 0,428. Ini mengindikasikan ketidakmerataan ekonomi yang signifikan di masyarakat meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi mencapai 5,32% pada Tahun 2025, lebih tinggi dari rerata nasional (5,11%) dan Provinsi Jawa Barat (5,20%). Namun, pertumbuhan ini belum optimal dan menunjukkan tantangan dalam mencapai pertumbuhan yang stabil.

Angka kemiskinan tetap tinggi, mencapai 6,9% pada Tahun 2025, meskipun turun 0,3% dari Tahun 2024 yang mencapai 7,2%. Data ini menunjukkan bahwa akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi belum optimal dan memerlukan perbaikan dalam layanan publik dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 8,19%, turun 0,15 persen poin dibanding Agustus 2024 yang mencapai 8,34%. Meskipun demikian, ini menunjukkan masalah serius terkait terbatasnya lahan industri, dan ketidaksesuaian (*MISMATCH*) antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan industri, jauh di atas Provinsi Jawa Barat (6,77%) dan nasional (4,74%). IPM Kota Sukabumi pada Tahun 2025, 78,23%, masih relatif rendah dibandingkan dengan kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat. Ini menunjukkan perlunya peningkatan di sektor pendidikan, kesehatan, dan standar hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan daya saing ekonomi juga tercermin dari PDRB per kapita ADHB Kota Sukabumi yang sebesar Rp 47.649 ribu, tergolong rendah dibandingkan kota-kota lain di Jawa Barat. Ketimpangan pengeluaran per kapita antara wilayah utara dan selatan mencerminkan ketimpangan pembangunan, dengan wilayah utara yang lebih maju. Ini mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih inklusif untuk pemerataan pembangunan. Selain itu, kontribusi PDRB ADHB Kota Sukabumi terhadap Provinsi Jawa Barat hanya 0,58% pada Tahun 2024 dan diperkirakan masih berada di angka 0,58% pada Tahun 2025, menunjukkan bahwa ekonomi kota ini masih kurang signifikan dalam skala provinsi, sehingga memerlukan peningkatan produktivitas ekonomi.



Gambar 14. Perbandingan PDRB Kota Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Harga Konstan dan Harga Berlaku, Tahun 2020-2025

Sumber: BPS Provinsi JAWA BARAT (DIOLAH)

Sektor-sektor strategis seperti pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Sukabumi belum memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian kota. Meskipun sektor ekonomi kreatif telah mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir, kontribusinya masih perlu diperkuat. Pada Tahun 2024, generasi produktif (penduduk usia 15–64) mencapai 68,8%% (251.460) dari total penduduk (365.555) dan diperkirakan pada Tahun 2025, generasi produktif masih berkisar di angka yang sama karena struktur usia penduduk tidak berubah drastis dalam setahun, dan jumlah pelaku ekonomi kreatif terdata lebih dari 500 orang. Dari 17 subsektor ekonomi kreatif, empat subsektor dianggap paling potensial, yaitu kuliner, musik, seni pertunjukan, dan kriya.

Agar ekonomi kreatif dapat menjadi solusi atas permasalahan kesejahteraan dan kesenjangan sosial di Kota Sukabumi, diperlukan penguatan lebih lanjut. Peran kolaborasi *PENTAHELIX* (akademisi, pemerintah, komunitas, bisnis, dan media) diharapkan dapat mempercepat pengembangan ekonomi kreatif melalui Inovasi dan kreativitas. Kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan diharapkan dapat menciptakan nilai tambah yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Di sisi lain, sektor pariwisata di Kota Sukabumi mengalami fluktuasi dan belum dioptimalkan sepenuhnya. Padahal, sektor ini memiliki potensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, selain sektor pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Berdasarkan data kinerja sektor pariwisata, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2020 tercatat sebesar Rp 13.419.712.356, kemudian mengalami peningkatan yang signifikan pada Tahun 2021 (46.861.100.000), namun kembali menurun pada Tahun 2022 (22.448.213.698), Tahun 2023 (22.455.333.300). Pada Tahun 2024, kontribusi pariwisata terhadap PAD kembali terus meningkat dari dua tahun sebelumnya, tetapi tidak signifikan, 24.612.703.000. Kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga fluktuatif, yaitu sebesar 2,92% pada 2020, 2,95% pada Tahun 2021, turun pada Tahun 2022 menjadi 2,71%, dan kembali naik pada Tahun 2023 menjadi 3,17% dan 3,42 pada Tahun 2024.

Tabel 10. Kinerja Sektor Pariwisata Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Tujuan				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	7	1,999	2,24	7,78	8,12

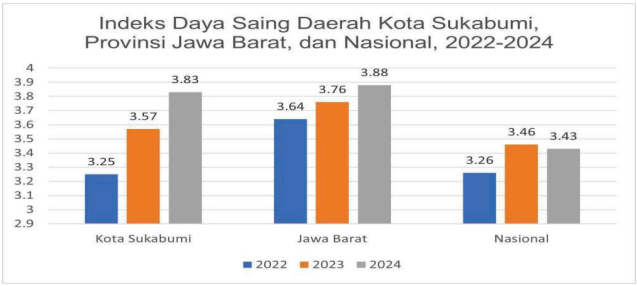
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/ kota	%	27	21,74	21,97	23,01	19,45
3	Tingkat hunian akomodasi	%	4,47	36,00	82,05	102,06	103,12
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,92	2,95	2,71	3,17	3,42
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	rupiah	13.419.712.356	46.861.100.000	22.448.213.698	22.455.333.300	24.612.703.000

Fluktuasi kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dan PDRB mencerminkan ketidakstabilan ekonomi di Kota Sukabumi. Faktor-faktor seperti pandemi, perubahan kebijakan ekonomi, serta kondisi ekonomi global berperan dalam ketidakstabilan tersebut. Untuk mengurangi fluktuasi ini, diperlukan upaya pengembangan pariwisata yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Iklim investasi di Kota Sukabumi juga belum sepenuhnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang efektif. Kemitraan antara koperasi, UMKM, dan pengusaha besar belum terjalin dengan baik, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Dukungan terhadap UMKM melalui kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor usaha besar dapat menjadi langkah penting dalam memperkuat perekonomian Daerah.

Pada Tahun 2024, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Sukabumi tercatat sebesar 3,83. Meskipun mengalami peningkatan, nilai ini masih di bawah rata-rata Jawa Barat, yang menunjukkan dinamisme bisnis di Kota Sukabumi masih lemah. Hal ini mengindikasikan perlunya dorongan yang lebih besar untuk meningkatkan aktivitas bisnis, Inovasi, serta keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Meskipun Indeks Rasa Aman mencapai 77,43 pada Tahun 2025, meningkat dari 75,4 pada Tahun 2024, partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masih belum optimal. Tantangan lainnya adalah masih tingginya konflik sosial, seperti perkelahian antar kelompok pelajar dan pemuda, yang mencerminkan kurangnya integrasi sosial dan pengelolaan konflik. Pelanggaran Peraturan Daerah dan unjuk rasa juga menunjukan adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan lokal, yang mengindikasikan masalah dalam penegakan hukum serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.



Gambar 15. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Sukabumi Tahun 2022-2024
Sumber: BPS (diolah)

Secara keseluruhan, dinamisme bisnis yang lemah, partisipasi masyarakat yang rendah dalam menjaga keamanan, serta masalah konflik sosial dan penegakan hukum menjadi penghambat dalam meningkatkan daya saing Kota Sukabumi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki dinamika sosial dan ekonomi.

Upaya pengembangan ekonomi lokal harus difokuskan pada penggalian potensi dan penyelesaian permasalahan yang ada. Hal ini bertujuan untuk merumuskan strategi kebijakan yang tepat agar program pengembangan ke depan dapat lebih efisien dalam mendukung pembangunan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disajikan gambaran umum kondisi aspek ekonomi lokal Kota Sukabumi beserta analisis kekuatan dan kelemahannya. Kota Sukabumi memiliki potensi ekonomi lokal yang cukup besar dengan sektor-sektor unggulan seperti ekonomi kreatif, pariwisata, serta UMKM yang terus berkembang. Kekuatan utamanya adalah adanya basis sektor ekonomi kreatif yang menjanjikan, didukung oleh pertumbuhan industri kreatif yang cukup signifikan serta peningkatan kunjungan wisatawan setiap tahun. Namun, kelemahan yang masih dihadapi adalah kurang optimalnya kolaborasi *pentahelix* dan sektor unggulan daerah yang belum sepenuhnya dikembangkan secara maksimal, serta iklim investasi yang belum berdampak signifikan pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing ekonomi.

Tabel 11. Gambaran Umum Ekonomi Lokal Kota Sukabumi

No	Area	Kondisi	Kekuatan	Kelemahan
1	Sektor Unggulan	Rendahnya kontribusi PDRB kota Sukabumi terhadap Provinsi Jawa Barat	Kota Sukabumi memiliki 11 sektor basis yang dapat mendorong perekonomian daerah	Belum ada sektor unggulan yang dikembangkan secara optimal, sektor-sektor basis belum teridentifikasi dengan jelas
2	Sektor Ekonomi Kreatif	Implementasi Kota Kreatif dimulai tahun 2021 dengan realisasi target yang melebihi ekspektasi	Kota Sukabumi memiliki potensi besar di subsektor seperti kuliner, seni pertunjukan, musik, dan kriya	Kolaborasi *pentahelix* (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, media) belum berjalan maksimal
3	Sektor Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dan PDRB belum stabil	Jumlah kunjungan wisatawan meningkat setiap tahun	Optimalisasi potensi wisata belum dilakukan sepenuhnya, termasuk potensi wisata alam dan budaya lokal yang masih terabaikan
4	Iklim Investasi	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Sukabumi belum mencapai standar optimal	IDSD Kota Sukabumi meningkat signifikan dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Barat	5 pilar dari 12 pilar IDSD, seperti infrastruktur, stabilitas ekonomi, sistem keuangan, dinamisme bisnis, dan kapabilitas Inovasi masih rendah (skor <3)

2.3.3 Sub Tema Prioritas: Lingkungan dan Infrastruktur Perkotaan

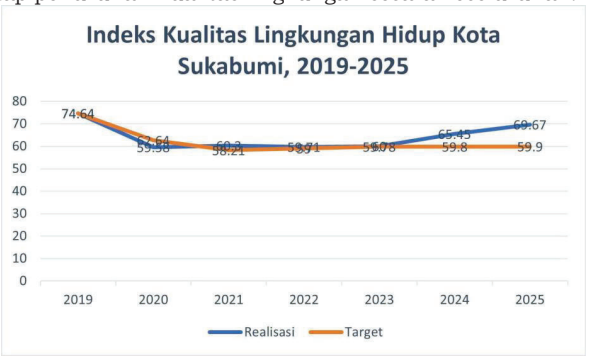
Sub tema prioritas lingkungan dan infrastruktur perkotaan mencakup dua aspek berbeda, tetapi saling terkait, yakni lingkungan yang diukur melalui indeks kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur perkotaan yang lazim ditakar melalui indeks kepuasan layanan infrastruktur oleh masyarakat. Berikut adalah elaborasi terhadap Kota Sukabumi dari kedua aspek ini.

A. Lingkungan

Aspek lingkungan hidup Kota Sukabumi menghadapi tantangan yang kompleks, terutama terkait dengan kualitas lingkungan dan pengelolaan sampah. Sebagai kota yang sedang berkembang dengan aktivitas yang terus meningkat, ancaman polusi udara dan alih fungsi lahan tidak dapat dihindari. Dampak dari kondisi ini terlihat pada kualitas lingkungan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah dalam periode tertentu. IKLH mencakup beberapa aspek lingkungan, seperti kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan. Pada Tahun 2025, IKLH Kota Sukabumi mencapai 69,67 poin, yang menunjukkan bahwa kualitas lingkungan berada pada tingkat sedang atau moderat. Namun, capaian ini masih lebih rendah dibandingkan Tahun 2019, di mana IKLH mencapai 74,64 poin.

Penurunan IKLH Kota Sukabumi disebabkan oleh beberapa faktor. Pertumbuhan kota yang pesat, dengan aktivitas transportasi yang tinggi, menyebabkan peningkatan polusi udara. Kondisi ini diperparah oleh banyaknya industri di sekitar Kota Sukabumi. Selain itu, pencemaran air sungai yang disebabkan oleh limbah industri dan rumah tangga turut menurunkan kualitas air. Di sisi lain, pengelolaan ruang terbuka hijau dan kawasan konservasi belum dilaksanakan secara optimal, yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan secara keseluruhan.



Gambar 16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Tahun 2019-2025
Sumber: BPS dan Bappeda Kota Sukabumi (diolah)

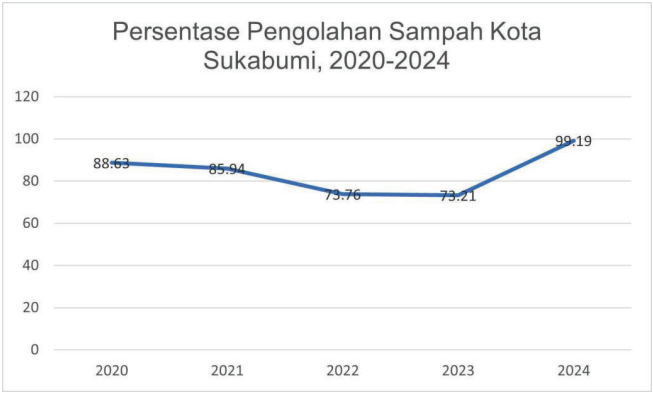
Selanjutnya, proyeksi peningkatan jumlah sampah di Kota Sukabumi pada Tahun 2025 hingga Tahun 2030 mencerminkan tantangan serius dalam pengelolaan persampahan, terutama dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pada Tahun 2022, jumlah timbunan sampah tercatat mencapai 66.345.722 liter per hari, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 69.002.268 liter per hari pada Tahun 2025 dan 73.458.699 liter per hari pada Tahun 2030. Peningkatan ini membutuhkan perubahan paradigma pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, dari hulu hingga hilir, guna mengurangi timbunan sampah yang terus meningkat setiap tahunnya.

Data Tahun 2024 menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayah Kota Sukabumi meningkat signifikan menjadi 99,19%, setelah turun pada dua tahun sebelumnya, dan Tahun 2025 ditargetkan pengelolaan sampah mencapai 100,00%. Penurunan kinerja pengelolaan sampah selama Tahun 2020-2023 disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pertambahan jumlah penduduk, meningkatnya aktivitas ekonomi, serta

proses urbanisasi yang pesat. Hal ini tidak sebanding dengan kapasitas sistem pengelolaan sampah yang ada, baik dalam hal infrastruktur maupun sumber daya. Meskipun tren pengelolaan sampah di Kota Sukabumi sedang naik, beberapa faktor yang menyebabkan tidak optimalnya pengelolaan sampah pada tahun-tahun sebelumnya perlu diperhatikan.

Salah satu faktor yang dapat berkontribusi terhadap penurunan kinerja pengelolaan sampah adalah kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti fasilitas pengolahan sampah dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik, seperti memilah sampah dari sumbernya, masih rendah. Pendekatan yang digunakan masih cenderung linear, dengan fokus pada pengumpulan dan pembuangan akhir, tanpa mengedepankan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R).

Tantangan ini semakin berat karena keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun tenaga kerja yang terlatih dalam manajemen persampahan. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya program pengelolaan sampah, termasuk sistem pengangkutan yang tidak merata dan kurang terintegrasi.



Gambar 17. Persentase Pengelolaan Sampah di Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS DAN BAPPEDA KOTA SUKABUMI (DIOLAH)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disajikan gambaran umum kondisi aspek lingkungan Kota Sukabumi beserta analisis kekuatan dan kelemahannya. Kota Sukabumi menghadapi tantangan lingkungan yang meliputi isu kualitas udara, pengelolaan sampah, serta pemeliharaan ruang terbuka hijau, meskipun memiliki potensi untuk memanfaatkan sumber daya alam lokal yang melimpah. Kekuatan utama terletak pada komitmen pemerintah untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan melalui berbagai program dan kebijakan hijau. Namun, kelemahan yang perlu diperhatikan adalah keterbatasan infrastruktur dan kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung praktik lingkungan berkelanjutan (Tabel 12).

Tabel 12. Gambaran Umum Aspek Lingkungan

No	Area	Kondisi	Kekuatan	Kelemahan
1	Kualitas Udara	Peningkatan polusi udara akibat aktivitas transportasi dan industri.	Ada kesadaran awal untuk meningkatkan kualitas udara. Ada kebijakan untuk mengurangi emisi.	Polusi udara yang signifikan dari aktivitas transportasi dan industri, belum ada pengawasan ketat terhadap emisi kendaraan
2	Kualitas Air	Kualitas air sungai menurun karena pencemaran limbah industri dan rumah tangga.	Kesadaran masyarakat dan pemerintah mulai tumbuh terkait pentingnya menjaga kualitas air.	Pencemaran air masih tinggi, terutama dari limbah industri dan rumah tangga. Penegakan hukum atas pencemaran lemah.
3	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengelolaan ruang terbuka hijau belum optimal,tekanan alih fungsi lahan tinggi.	Ada beberapa area yang masih dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau. Program penanaman pohon mulai digalakkan.	Minimnya perencanaan dan pengelolaan RTH secara terintegrasi, alih fungsi lahan akibat urbanisasi.
4	Pengelolaan Sampah	Timbunan sampah terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan urbanisasi.	Kesadaran publik mulai muncul terkait pentingnya pengelolaan sampah. Ada beberapa program bank sampah lokal.	Infrastruktur pengelolaan sampah, seperti TPA dan fasilitas pengolahan, masih kurang. Sistem pengangkutan belum merata.
5	Penerapan Prinsip 3R	Pemilahan sampah dari sumbernya belum optimal, pendekatan pengolahan sampah masih linear.	Ada peluang untuk menerapkan prinsip 3R dalam pengelolaan sampah melalui program daur ulang dan inisiatif lokal.	Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah, fasilitas daur ulang terbatas.
6	Iklim dan Bencana	Kota Sukabumi memiliki iklim tropis dengan curah hujan tinggi sehingga berpotensi banjir dan tanah longsor. Selain itu juga rentan gempa bumi. Perubahan iklim global mempengaruhi risiko cuaca ekstrim.	Sukabumi memiliki banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk mitigasi bencana. Masyarakat memiliki kesadaran yang cukup baik dan terdapat dukungan serta kerja sama dari pemerintah dan LSM.	Infrastruktur belum memadai untuk menghadapi bencana dan minimnya data terkait dengan perubahan iklim dan bencana.

B. Infrastruktur Perkotaan

Optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Sukabumi sangat diperlukan di tengah perkembangan kota yang masif disertai dengan ancaman bencana dan perubahan iklim. Pembangunan kota, terutama dalam pengembangan infrastruktur dasar, transportasi, serta infrastruktur perkotaan lainnya, tetap diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan kebutuhan masyarakat. Namun, arah pengembangan di masa depan harus difokuskan pada infrastruktur yang ramah lingkungan, yang meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem dan mendukung keberlanjutan.

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Sukabumi. Selain untuk mengukur kepuasan masyarakat, IKLI dapat digunakan untuk mengakomodir keinginan dan harapan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Sukabumi.



Gambar 18. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kota Sukabumi Tahun 2021-2024

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Kota Sukabumi telah mencapai kategori B, menunjukkan mutu pelayanan yang baik. Meskipun demikian, peningkatan layanan infrastruktur tetap diperlukan untuk mendukung perkembangan kota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa sektor yang telah berkinerja baik meliputi infrastruktur listrik yang andal, jalur pedestrian yang nyaman, taman kota yang berfungsi sebagai ruang publik, serta jaringan telekomunikasi yang mendukung konektivitas. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti layanan transportasi, khususnya terminal dan jaringan jalan skala kelurahan, yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Selain itu, jaringan air bersih perlu diperluas dan diperbaiki agar seluruh masyarakat mengakses air yang layak, dan jaringan air limbah harus ditingkatkan untuk mengelola limbah secara lebih efektif, demi menjaga kualitas lingkungan dan sanitasi yang baik. Peningkatan infrastruktur ini sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan memastikan kualitas hidup masyarakat Kota Sukabumi semakin membaik.

Berikut merupakan gambaran umum kondisi aspek infrastruktur Kota Sukabumi berikut kekuatan dan kelemahannya berdasarkan uraian di atas. Kota Sukabumi memiliki infrastruktur yang cukup baik, dengan peningkatan signifikan dalam pengembangan jalan, transportasi umum, dan aksesibilitas layanan dasar. Kekuatan utamanya adalah adanya proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, serta peningkatan kualitas jalan dan transportasi umum yang semakin baik. Namun, kelemahan yang dihadapi adalah masih terdapat daerah yang sulit diakses akibat infrastruktur yang belum merata, serta adanya keterbatasan dalam penyediaan infrastruktur digital yang mendukung transformasi teknologi dan layanan publik. Hal ini berdampak pada ketidakmerataan layanan dan potensi pengembangan ekonomi lokal.

Tabel 13. Gambaran Umum Aspek Infrastruktur Kota Sukabumi

No	Area	Kondisi	Kekuatan	Kelemahan
1	Transportasi	Layanan transportasi, khususnya terminal dan jalan skala kelurahan pinggiran, masih memerlukan pengembangan.	Kesadaran untuk meningkatkan layanan transportasi dan konektivitas antar wilayah mulai tumbuh.	Jaringan jalan skala kelurahan pinggiran dan terminal belum memadai, transportasi publik masih terbatas.
2	Jaringan Air Bersih	Jaringan air bersih belum mencakup seluruh masyarakat, dan kualitas air di beberapa wilayah menurun.	Ada program untuk memperluas akses air bersih, dengan sumber daya air lokal yang cukup tersedia.	Distribusi air bersih belum merata, masih ada warga yang mengandalkan air sumur yang kualitasnya kurang baik.
3	Jaringan Listrik	Jaringan listrik andal dan cakupan hampir seluruh wilayah.	Infrastruktur listrik cukup stabil, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas.	Masih ada beberapa wilayah terpencil yang mengalami gangguan listrik atau akses yang terbatas.
4	Jaringan Telekomunikasi	Jaringan telekomunikasi sudah mendukung konektivitas dan perkembangan ekonomi digital.	Ketersediaan jaringan internet dan telekomunikasi yang cukup luas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan komunikasi.	Ada beberapa area dengan jaringan telekomunikasi lemah, terutama di wilayah pinggiran atau terpencil.
5	Pengelolaan Air Limbah	Jaringan air limbah belum memadai, banyak limbah rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik, mencemari lingkungan.	Ada kesadaran akan pentingnya peningkatan pengelolaan air limbah demi menjaga sanitasi dan kualitas lingkungan.	Infrastruktur pengelolaan air limbah belum memadai, masih banyak area yang belum terlayani, berpotensi menyebabkan pencemaran.
6	Jalur Pedestrian	Jalur pedestrian yang nyaman dan aman untuk masyarakat.	Pengembangan pedestrian yang baik dan ramah pengguna, meningkatkan mobilitas pejalan kaki.	Perluasan jalur pedestrian ke area yang lebih luas agar lebih inklusif.
7	Taman Kota dan Ruang Publik	Taman kota yang berfungsi sebagai ruang publik bagi masyarakat.	Ketersediaan taman kota dan ruang hijau yang memadai untuk rekreasi dan interaksi sosial.	Pengelolaan dan perawatan taman kota belum optimal, perlu peningkatan keberlanjutan dalam pemeliharaan.

2.3.4 Sub Tema Prioritas: Penguatan Nilai Agama, Sosial, dan Budaya yang inklusif

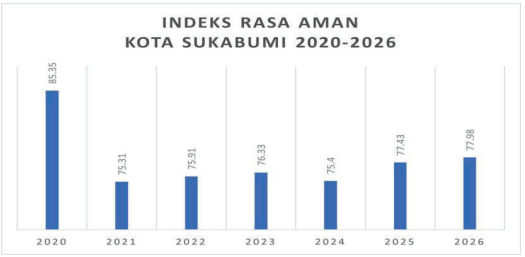
Pengamalan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya, dalam memperkuat toleransi, ketentraman serta ketertiban umum sangat penting bagi kemajuan suatu daerah. Aspek ini dapat diukur dari indeks kerukunan umat beragama, warisan budaya, dan rasa aman. Kota Sukabumi berlangganan dalam menorehkan prestasi sebagai salah satu kota dengan indeks toleransi beragama tertinggi di Indonesia. Sejak Tahun 2020, Kota Sukabumi konsisten masuk di dalam top 10 kota paling toleran dari 514 kota di Indonesia. Pada Tahun 2024, Kota Sukabumi mencapai 78,16 indeks kerukunan umat beragama (IKUB). Tahun 2025, IKUB Kota Sukabumi kembali menanjak

menjadi 79. Tahun 2026 menampilkan tren peningkatan serupa menjadi 79.27. Prestasi ini ditorehkan dengan berbagai kegiatan moderasi agama yang aktif digalakan di Kota Sukabumi seperti dialog interaktif lintas agama yang diselenggarakan oleh Kesbangpol bersama FKUB untuk memperkuat toleransi, doa bersama Lintas agama dan deklarasi damai, peringatan HUT Badan Kerja sama Gereja-Gereja Sukabumi dan HUT MUI yang melibatkan pemerintah dan elemen masyarakat lain, program Jumat Keliling yang rutin dilakukan Wali Kota untuk memperkuat silaturahmi dengan warga, penguatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam moderasi beragama, pemberian bantuan sosial oleh FKUB kepada rumah ibadah, termasuk menjelang Natal dan Tahun Baru, dan diseminasi Kampung Moderasi Beragama sebagai pembentukan kampung contoh praktik toleransi yang nyata.



Gambar 19. Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Sukabumi, Tahun 2020-2026

Tidak hanya kerukunan beragama yang tinggi, indeks rasa aman di Kota Sukabumi pun masuk di dalam kategori tinggi setelah selama tiga tahun berturut-turut mencapai angka diantara 70-80. Tahun 2024, indeks rasa aman Kota Sukabumi mencapai 75,4. Tahun 2025 naik menjadi 77,43 dan konsisten naik pada Tahun 2026 menjadi 77,98. Prestasi ini dicapai melalui berbagai program seperti Program "Sukabumi Cinta Keselamatan" oleh Dishub yang menyediakan pelatihan pengemudi, peningkatan fasilitas pejalan kaki, dan penerangan jalan umum. Patroli rutin pun dilakukan oleh Polres Sukabumi Kota untuk mencegah tindak kejahatan dan kehadiran Polantas di jalan untuk menjaga ketertiban. Adapula kegiatan "Jum'at Bersih" yang melibatkan Forkopimda dan warga, menjaga kebersihan sungai, serta "Ngariung bareng" bersama TNI/Polri untuk merajut kebersamaan dengan warga dan menjaga kondusifitas wilayah. Kegiatan lain berupa penguatan peran BPBD dalam mitigasi bencana dan gerakan penanaman pohon, serta memperkuat toleransi antarumat beragama. Koordinasi strategis pariwisata untuk menciptakan destinasi yang aman dan nyaman bagi pengunjung juga berkontribusi di dalam meningkatkan indeks rasa aman warga dan pendatang di Kota Sukabumi.



Gambar 20. Indeks Rasa Aman Kota Sukabumi Tahun 2020-2026

Sementara itu, indeks warisan budaya Kota Sukabumi pun pada Tahun 2024-2025 mencapai angka 38,85 berturut-turut. Tahun berikutnya, Tahun 2026, indeks warisan budaya meningkat menjadi 38,95, tetapi masih berada pada kategori rendah. Jika dibandingkan dengan IKUB dan indeks rasa aman, indeks warisan budaya paling rendah.



Gambar 21. Perbandingan IKUB, Indeks Rasa Aman dan Indeks Warisan Budaya Kota Sukabumi, Tahun 2024-2026

Beberapa kegiatan seperti Pekan Kebudayaan Daerah yang mewadahi pegiat seni dan masyarakat, termasuk pementasan seni tradisional seperti tari Paku Jajar dan berbagai kesenian helaran (arak-arakan), diadakan. Pendataan dan dokumentasi budaya oleh Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Promosi Pariwisata Budaya (PROSA) yang memperkenalkan potensi budaya dan situs lokal, seperti LEMKA (Lembaga Kaligrafi Al-Quran), dan pelestarian seni tradisional seperti angklung, buncis, sisingaan, dan kesenian tradisional lainnya dalam acara resmi maupun perayaan lokal, belum mendongkrak prestasi warisan budaya ke level sedang. Pertemuan rutin dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelestarian cagar budaya, dan pelestarian situs-situs sejarah lokal agar tetap terjaga dan dikenal oleh masyarakat, termasuk studi tentang cagar budaya, juga belum optimal.

Untuk meningkatkan kerukunan umat, ketertiban, dan pelestarian budaya, pemerintah Kota Sukabumi ke depan harus memperkuat moderasi beragama dan pendidikan tolerans. Meskipun dialog dan interaksi antar umat beragama sudah dilakukan melalui beberapa *event*, pengembangan dialog lintas komunitas dan forum kebangsaan perlu diintensifkan. Upaya-upaya pelestarian dan revitalisasi warisan budaya lokal sangat harus diperkuat. Sistem pencegahan konflik sosial dan intoleransi perlu diperkuat. Pemberdayaan sosial berbasis komunitas dan partisipasi masyarakat harus ditingkatkan.

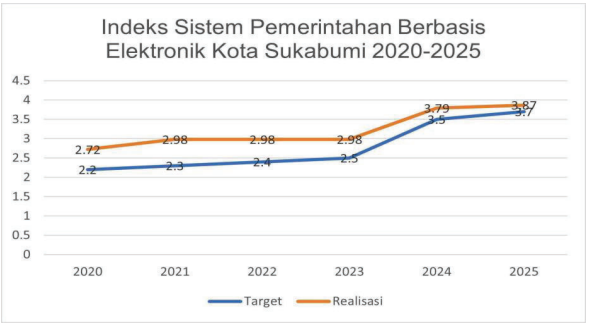
2.3.5 Sub Tema Prioritas: Tata Kelola Pemerintahan yang Berdaya Saing

Tata Kelola Pemerintahan dalam pengembangan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) memiliki tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan. Melalui tata kelola yang baik, diharapkan dapat mendukung optimalisasi Inovasi, pengembangan teknologi, serta pelayanan publik yang berbasis data dan teknologi.

Dalam konteks RIPJPID, tata kelola pemerintahan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penelitian dan pengembangan yang berkualitas, serta memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Pendekatan ini melibatkan perencanaan yang terstruktur, implementasi yang efektif, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan.

Dengan tata kelola yang efektif, RIPJPID dapat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat daerah, mempercepat Inovasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penggunaan data dan teknologi yang berbasis pada prinsip transparansi dan akuntabilitas akan memastikan bahwa hasil dari upaya tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan. Beberapa hal yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yaitu:

1. Transformasi Digital Pemerintahan.
   Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memodernisasi proses pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat pengambilan keputusan berbasis data. Ini mencakup penerapan sistem *e-government, e-procurement*, serta pengelolaan data yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya transformasi digital diharapkan terbentuknya infrastruktur digital yang kuat, sistem pemerintahan berbasis TIK yang efisien, serta peningkatan interaksi digital antara pemerintah dan masyarakat.
   Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah salah satu wujud dari transformasi digital, di mana teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk memberikan layanan kepada pengguna. Agar pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi selaras dengan prinsip integrasi dan keterpaduan, diperlukan penerapan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan SPBE berjalan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta mampu menghasilkan layanan yang berkualitas dan optimal bagi masyarakat.



Gambar 22. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik Kota Sukabumi Tahun 2020-2025
Sumber: BAPPEDA, 2025 (DIOLAH)

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi memperoleh nilai Indeks SPBE sebesar 3,87 Tahun 2025 dengan predikat "Sangat Baik." Capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan nilai Indeks SPBE tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan ini mencerminkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Sukabumi yang semakin matang dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Keberhasilan ini tercapai berkat kerja sama dan kolaborasi yang baik antara Perangkat Daerah (PD) yang tergabung dalam Tim Koordinasi Implementasi SPBE Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Peningkatan diperlukan dalam hal infrastruktur digital, integrasi sistem antar PD, serta

pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait pengelolaan teknologi informasi. Selain itu, perlu ada upaya lebih lanjut dalam meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat dalam menggunakan layanan digital pemerintah. Dengan peningkatan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan implementasi SPBE di Kota Sukabumi dapat semakin efisien dan berkelanjutan, sehingga pelayanan publik berbasis teknologi informasi dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat.

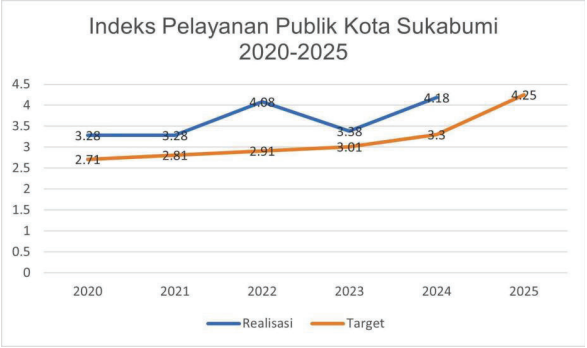
Kebijakan Data Terbuka. Peningkatan akses masyarakat terhadap data publik melalui kebijakan data terbuka yang memungkinkan kolaborasi antara sektor pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat sipil untuk Inovasi dan pengembangan kebijakan berbasis bukti. Dari kebijakan ini diharapkan tersedianya platform data terbuka yang dapat diakses publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta kebijakan publik yang lebih tepat sasaran.

2. Penguatan Sumber Daya Manusia di Pemerintahan.
   Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam pemanfaatan teknologi dan penguasaan ilmu pengetahuan melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendidikan berkelanjutan untuk memastikan bahwa mereka siap menghadapi perubahan dan tantangan global. Diharapkan SDM pemerintahan yang melek teknologi, kompeten, dan siap untuk berinovasi dalam proses birokrasi dan pelayanan publik.

3. Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi.
   Pengembangan solusi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, seperti pelayanan satu pintu berbasis digital, penggunaan kecerdasan buatan untuk layanan publik, dan otomatisasi proses administrasi. Pelayanan publik dapat lebih cepat, mudah diakses, dan berkualitas tinggi, serta sistem administrasi pemerintahan yang lebih responsif dan efisien.

4. Penguatan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan *STAKEHOLDERS* yang mampu mendorong kolaborasi yang lebih erat antara Pemerintah Daerah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam pengembangan kebijakan Iptek dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kolaborasi ini diharapkan terbentuknya ekosistem Inovasi daerah yang kuat dengan keterlibatan semua pihak, serta penguatan sinergi antar lembaga untuk memajukan pptek di tingkat lokal.

5. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pemerintahan.
   Memastikan bahwa semua proses dan kebijakan pemerintah berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelaporan kinerja pemerintahan. Sistem monitoring dan evaluasi yang terbuka dan transparan, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta pengelolaan sumber daya yang lebih efisien.



Gambar 23. Indeks Pelayanan Publik Kota Sukabumi Tahun 2020-2025

Sumber: BAPPEDA, 2025 (DIOLAH)

6. Kebijakan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
   Integrasi prinsip keberlanjutan dalam tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi hijau dan pendekatan berbasis lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Diharapkan terbentuknya kebijakan pemerintah yang ramah lingkungan, pengurangan jejak karbon dari kegiatan pemerintahan, serta penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pelayanan publik.

7. Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan.
   Hal ini mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui platform digital dan forum-forum interaktif yang memungkinkan partisipasi langsung dalam pengembangan kebijakan publik. Diharapkan tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, serta kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



Gambar 24. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Sukabumi Tahun 2020-2025

Sumber: BAPPEDA, 2025 (DIOLAH)

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kota Sukabumi dalam kurun waktu Tahun 2021-2025 terus menanjak. Pada Tahun 2025, IRB mencapai 79, melewati target. Artinya reformasi birokrasi yang telah dilakukan masuk dalam kategori "Sangat Baik".

Tata kelola pemerintahan di Kota Sukabumi menunjukkan upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Kekuatan dalam tata kelola pemerintahan adalah adanya kebijakan yang mendukung pemerintahan yang baik, termasuk

penerapan sistem *e-government* yang mulai diterapkan untuk mempermudah akses informasi dan layanan publik. Selain itu, adanya rencana strategis untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga juga menunjukkan keseriusan dalam menciptakan sinergi dalam pemerintahan. Namun, kelemahan yang ada mencakup masih terbatasnya partisipasi publik dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, serta belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Selain itu, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan perlu ditingkatkan agar pencapaian sasaran dapat terukur dengan jelas. Berikut merupakan gambaran umum aspek tata Kelola pemerintahan Kota Sukabumi.

Tabel 14. Gambaran Umum Tata Kelola Pemerintahan Kota Sukabumi

No	Area	Kondisi	Kekuatan	Kelemahan
1	Transformasi Digital Pemerintahan	Kota Sukabumi sudah menerapkan TIK untuk memodernisasi pemerintahan, meningkatkan pelayanan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik meningkat dan mencapai 3,87 pada tahun 2025 (predikat sangat baik).	Peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan publik melalui penggunaan TIK. Indeks yang meningkat menunjukkan perbaikan.	Biaya pemeliharaan dan pengembangan yang besar; kurangnya informasi spesifik tentang kualitas dan cakupan infrastruktur digital. Indeks SPBE masih di bawah kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat.
2	Kebijakan Data Terbuka	Kota Sukabumi telah memiliki berbagai aplikasi TIK untuk pengelolaan dan pelayanan.	Memiliki aplikasi berbasis TIK untuk mendukung pengelolaan data dan pelayanan.	Belum ada kebijakan tentang platform data terbuka yang dapat diakses publik.
3	Penguatan Sumber Daya Manusia Di Pemerintahan	Kota Sukabumi telah memiliki perencanaan pengembangan SDM untuk mengelola Riset.	Rencana pengembangan SDM menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur.	Keterbatasan kapasitas SDM aparatur; perlu peningkatan kompetensi untuk memenuhi tuntutan pelayanan yang semakin kompleks.
4	Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi	Telah menerapkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, seperti pelayanan satu pintu berbasis digital. Target pelayanan publik melebihi target dari 2020-2025 (di atas 3).	Peningkatan responsivitas dan efisiensi dalam administrasi pelayanan publik.	Belum ada sistem pelayanan publik yang terintegrasi secara keseluruhan.
5	Penyederhanaan Proses Birokrasi	Telah menyederhanakan sistem manajemen dan birokrasi untuk pengelolaan dan layanan publik.	Indeks Reformasi Birokrasi sangat baik, dengan nilai di atas 70 pada sejak tahun 2023.	Penerapan reformasi birokrasi masih bersifat formal; substansi belum mendorong perbaikan kinerja organisasi secara signifikan. Pencapaian sasaran di unit kerja masih sebagian kecil.

6	Kolaborasi Antar Lembaga	Kota Sukabumi memiliki rencana untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil.	Rencana kolaborasi menunjukkan upaya membentuk ekosistem Inovasi daerah yang kuat.	Implementasi kolaborasi belum terlihat secara jelas; keterlibatan *stakeholder* mungkin masih terbatas.
7	Partisipasi Publik	Belum ada data tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.	Kesadaran akan pentingnya partisipasi publik mulai meningkat di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan.	Tidak ada informasi spesifik tentang platform digital atau forum interaktif untuk partisipasi publik.

BAB III
TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DAERAH

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kota Sukabumi disusun untuk memastikan penguatan Riset dan Inovasi mampu mendukung pencapaian misi pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan Kota Sukabumi. Langkah ini bertujuan untuk mencapai target-target strategis pembangunan daerah hingga akhir periode RPJMD Tahun 2025-2029.

Pemerintah Kota Sukabumi berupaya mempercepat pencapaian target pembangunan melalui serangkaian analisis ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah. Ekosistem ini diarahkan agar mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul dalam beberapa tahun mendatang. Fokus utama dalam pengembangan ekosistem ini adalah meningkatkan daya saing Daerah melalui produk unggulan berbasis Riset dan Inovasi, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada akhir periode perencanaan. Selanjutnya, Riset dan Inovasi diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan di Kota Sukabumi, yang meliputi aspek daya saing manusia dan derajat kesehatan masyarakat, ekonomi kreatif dan pariwisata, lingkungan dan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan.

3.1 Tantangan dalam Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Masa Datang berkaitan dengan Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Produk unggulan daerah Kota Sukabumi dalam RIPJPID Tahun 2025-2029 berfokus pada pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata, serta memaksimalkan hasil pertanian dan budidaya perikanan. Berikut merupakan sejumlah tantangan yang akan dihadapi oleh daerah Kota Sukabumi dalam mengembangkan produk unggulan daerah berdasarkan 6 (enam) elemen ekosistem Riset dan Inovasi:

1. Kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

    a. Masih terbatas kebijakan yang dapat mendorong digitalisasi dan Inovasi di bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis potensi daerah dan budaya Sukabumi memerlukan kebijakan yang mengatur dan mengoptimalkan keterlibatan berbagai pihak dengan memanfaatkan sumber daya kreatif lokal dan teknologi. Dalam hal ini, salah satu daya dukung yakni pengembangan infrastruktur Tol Bocimi berpotensi menjadikan Kota Sukabumi sebagai pusat ekonomi baru melalui investasi, pariwisata dan kemudahan aksesibilitas.
    b. Terbatasnya infrastruktur penunjang seperti pusat pelatihan digital untuk pengusaha lokal menjadi hambatan besar dalam mempersiapkan produk untuk bersaing di pasar yang semakin dipengaruhi oleh teknologi. Tanpa akses ke pengembangan pelatihan yang relevan, banyak pengusaha lokal kesulitan memanfaatkan platform digital, seperti *e-commerce* dan pemasaran *online*, untuk memperluas jangkauan pasar.
    c. Meskipun kebijakan dan infrastruktur pendukung Riset dan Inovasi moderasi beragama, ketertiban, dan pelestarian budaya sudah ada, diperlukan penguatan, terutama pada bidang revitalisasi dan pelestarian budaya lokal melalui dokumentasi dan digitalisasi, pengembangan Inovasi sosial berbasis komunitas, dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.

d. Terbatasnya kebijakan yang berfokus pada peningkatan adopsi teknologi pertanian presisi dan teknologi IoT untuk perikanan. Pengembangan sektor pertanian dan perikanan di Sukabumi membutuhkan kebijakan yang mendukung optimalisasi potensi alam serta keterlibatan banyak pihak, termasuk perangkat daerah, pelaku usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi. Kebijakan yang mengatur keterlibatan pemangku kepentingan terkait sangat diperlukan untuk program-program yang fokus pada peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
e. Infrastruktur penelitian seperti laboratorium pertanian dan akuakultur yang canggih belum tersedia di semua kecamatan. Infrastruktur penelitian yang memadai sangat penting untuk mendukung perkembangan sektor pertanian dan akuakultur di Sukabumi, khususnya dalam meningkatkan Inovasi dan daya saing produk lokal.

2. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi

a. Kapasitas lembaga Riset yang mendukung Inovasi produk kreatif serta penyusunan strategi pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal masih terbatas. Penting untuk membentuk dan memperkuat lembaga Riset yang fokus pada Inovasi produk kreatif dan strategi pengembangan pariwisata agar dapat menggali potensi lokal, seperti kekayaan budaya, sumber daya alam (kuliner, agrowisata, pariwisata halal), serta dengan mengembangkan industri pariwisata MICE.
b. Terbatasnya sumber daya manusia yang terlatih di bidang digitalisasi dan pemasaran pariwisata serta ekonomi kreatif. Perlu ada penguatan lembaga pelatihan dan pendidikan yang mengkhususkan pada penguasaan teknologi digital dan strategi pemasaran modern untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
c. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi di bidang moderasi agama, kohesi sosial, dan pelestarian budaya masih terbatas. Penggalian, pengembangan, dan konservasi nilai-nilai agama, sosial, dan budaya yang inklusif sebagai fondasi pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan belum tampak.
d. Kapasitas kelembagaan di tingkat lokal masih terbatas dalam mendukung Riset terapan di bidang agroteknologi dan budidaya perikanan, terutama ketersediaan fasilitas Riset dan dukungan teknis. Hal ini berpotensi memperlambat pertumbuhan produktivitas dan daya saing produk lokal. Sukabumi memerlukan lembaga Riset mampu mendorong pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan tantangan dalam pengolahan pasca-panen, serta untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan.

3. Kemitraan Riset dan Inovasi

a. Minimnya sinergi antara pelaku UMKM di sektor kreatif dengan institusi Riset yang dapat membantu pengembangan produk dan pemasaran. Kemitraan antara pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif dan pemerintah untuk mengembangkan program Riset Inovasi dapat meningkatkan daya saing produk kreatif lokal di pasar domestik maupun internasional.
b. Terbatasnya kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan perguruan tinggi, baik dalam Riset maupun implementasi teknologi pertanian modern. Sumber daya Riset di daerah, kerjasama antara Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha sangat penting untuk mendukung penguatan sektor pertanian dan budidaya perikanan. Mitra dari berbagai sektor harus bekerja sama dalam hal Riset dan Inovasi untuk meningkatkan kualitas produk lokal.
c. Kolaborasi Pemerintah Daerah, komunitas agama, dan dunia pendidikan dalam mendorong berbagai inisiatif untuk penguatan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya belum intensif.

4. Budaya Riset dan Inovasi

   a. Minimnya kesadaran akan pentingnya Riset dan Inovasi dalam mengembangkan produk kreatif yang memiliki nilai tambah. Masyarakat dan pelaku usaha di sektor kreatif serta pariwisata di Sukabumi perlu dibimbing untuk mengembangkan budaya kreatif yang dapat menghasilkan produk yang inovatif dan menarik bagi pasar lokal dan internasional.
   b. Budaya Riset di kalangan petani dan pembudidaya masih kurang, terutama dalam hal adopsi teknologi baru. Kebanyakan petani dan pembudidaya masih menggunakan metode konvensional sehingga Inovasi sulit berkembang. Selain itu, dapat berdampak terhadap peningkatan biaya produksi dan penurunan produktivitas. Program pelatihan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Riset dan Inovasi sangat diperlukan.
   c. Praktek moderasi agama berbasis komunitas, pembelajaran di sekolah, dan pelestarian budaya sudah hidup di dalam masyarakat, tetapi belum intensif. Campur tangan pemerintah masih minim.

5. Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah

   a. Kurangnya koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab atas Riset dan pengembangan produk kreatif di tingkat lokal, sehingga Inovasi yang dihasilkan kurang terarah dan tidak terintegrasi dalam satu kerangka pembangunan pariwisata berkelanjutan. Keterpaduan antara kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif dapat memaksimalkan potensi lokal.
   b. Terbatasnya keterpaduan antara Riset, kebijakan, dan implementasi di lapangan, terutama dalam mendukung ketahanan pangan. Keterpaduan antara berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta, dalam mengelola sektor pertanian dan perikanan sangat penting. Informasi yang akurat dan terintegrasi mengenai kondisi sektor-sektor tersebut dapat memastikan program-program yang dilaksanakan tidak hanya tepat sasaran tetapi juga efektif.

6. Penyelarasan dengan Perkembangan Global

   a. Kurangnya konektivitas global dalam pemasaran dan *BRANDING*, yang membuat daya saing produk kreatif dan pariwisata Kota Sukabumi masih tertinggal dibanding produk yang lain. Selain itu, proses digitalisasi UMKM masih terbatas sehingga belum bisa bersaing di tingkat internasional. Perlu pengembangan *BRANDING* dan *positioning* kota dengan memanfaatkan big data, *DIGITAL MARKETING*, dan *city BRANDING* berbasis Riset.
   b. Rendahnya tingkat adopsi teknologi global, seperti IoT untuk pemantauan dan pengelolaan, *drone* untuk pemetaan lahan, atau *BLOCKCHAIN* untuk rantai pasokan, yang berpotensi untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan.

3.2 Tantangan dalam Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Masa Datang Berkaitan dengan Penyelesaian Permasalahan Daerah

Kota Sukabumi menghadapi tantangan dalam pemanfaatan Riset dan Inovasi untuk menyelesaikan permasalahan daerah berkaitan dengan tujuan pembangunan daerah, yakni pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Fokusnya adalah menciptakan keseimbangan antara manusia, ekonomi, lingkungan, infrastruktur, dan tata kelola, didukung oleh kebijakan yang berbasis Riset. Tantangan utama adalah keterbatasan daya saing sumber daya manusia, infrastruktur digital yang belum merata, serta tata kelola yang belum sepenuhnya mendukung Inovasi daerah. Upaya peningkatan diperlukan melalui kebijakan yang berbasis bukti, pengembangan teknologi ramah lingkungan, dan

infrastruktur digital yang kuat. Ini akan memperkuat daya saing daerah, meningkatkan inklusi, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berikut merupakan sejumlah tantangan yang akan dihadapi oleh daerah Kota Sukabumi dalam menyelesaikan permasalahan daerah berdasarkan 6 (enam) elemen ekosistem Riset dan Inovasi:

1. Kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

   a. Pembangunan Manusia

      1) Dukungan kebijakan terhadap penguatan pembangunan manusia masih rendah. Strategi kebijakan dalam merespon tuntutan Inovasi pembangunan manusia adalah melalui program pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penguatan kolaborasi pendidikan-industri, serta daya dukung Inovasi teknologi di kalangan masyarakat. Selain itu, strategi kurikulum berbasis vokasi perlu diintegrasikan dengan kebutuhan industri unggulan Daerah.
      2) Infrastruktur pelatihan dan pendidikan belum optimal, khususnya yang relevan dengan tren digitalisasi dan otomatisasi, sehingga menghambat peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal dan tuntutan kompetensi pasar.
      3) Dukungan kebijakan infrastruktur terhadap pelayanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, dan merata belum kuat sehingga indeks kesehatan warga Kota Sukabumi belum sepadan provinsi meskipun menunjukkan tren peningkatan.

   b. Ekonomi Kreatif dan Pariwisata

      1) Terbatasnya kebijakan insentif yang mendukung Riset dan Inovasi di sektor ekonomi kreatif dan pariwisata, sehingga sektor ini mengalami kesulitan dalam mengembangkan produk-produk yang memiliki nilai tambah tinggi untuk dapat bersaing.
      2) Infrastruktur digital yang mendukung pemasaran dan distribusi produk lokal, terutama yang berasal dari sektor kreatif, pariwisata, pertanian dan perikanan masih terbatas.

   c. Lingkungan dan Infrastruktur Perkotaan

      1) Terbatasnya kebijakan yang mendorong Riset terkait mitigasi perubahan iklim dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.
      2) Infrastruktur untuk pengelolaan sampah dan limbah, teknologi pertanian berkelanjutan, dan konservasi alam masih kurang.
      3) Terbatasnya anggaran dan perencanaan yang mendukung pembangunan infrastruktur Riset, seperti laboratorium, pusat Inovasi, dan fasilitas lainnya.

   d. Penguatan nilai agama, sosial, dan budaya yang inklusif

      1) Terbatasnya kebijakan yang mendorong Riset terkait pemetaan indeks toleransi, dinamika sosial, dan potensi kerawanan konflik.
      2) Kurangnya infrastruktur digitalisasi dan dokumentasi warisan budaya lokal, seperti arsip sejarah, tradisi, seni pertunjukan.
      3) Terbatasnya dukungan anggaran terhadap pengembangan model Inovasi sosial berbasis komunitas, termasuk skema pemberdayaan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan komunitas lintas budaya.

e. Tata Kelola Pemerintahan

1) Terbatasnya kebijakan yang memungkinkan akses publik yang transparan terhadap data dan informasi Riset di tingkat daerah.
2) Terbatasnya penggunaan teknologi dalam administrasi publik sehingga menghambat efisiensi tata kelola yang mendukung Riset dan Inovasi.

2. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi

a. Pembangunan Manusia

1) Kapasitas lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyediakan pelatihan yang relevan, berkualitas tinggi, dan dengan tren dan kebutuhan industri masih terbatas. Selain itu, ketersediaan program berbasis Riset di tingkat sekolah, dan kolaborasi antar instansi, akademisi, industri dan masyarakat masih terbatas. Hal ini berdampak terhadap peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.
2) Kapasitas kelembagaan dalam penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, dan merata masih rendah.

b. Ekonomi Kreatif dan Pariwisata

Kelembagaan Riset di Daerah terbatas dalam hal dukungan untuk sektor ekonomi lokal dan pariwisata, terutama dalam pengembangan produk inovatif yang sesuai dengan permintaan pasar. Fasilitas Riset tidak memadai turut berdampak pada pelemahan potensi ekonomi lokal.

c. Lingkungan dan Infrastruktur Perkotaan

Lemahnya kapasitas lembaga daerah dalam merencanakan dan mengelola infrastruktur Inovasi dan kelestarian lingkungan hijau yang efisien dan berkelanjutan.

d. Penguatan nilai agama, sosial, dan budaya yang inklusif

1) Lemahnya kapasitas kelembagaan untuk meRiset kebijakan moderasi beragama dan pendidikan karakter kebangsaan, sebagai bagian dari penguatan identitas kota yang agamis dan nasionalis.
2) Terbatasnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung Riset dan Inovasi yang merevitalisasi dan mengembangkan budaya lokal, termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dan agama.

e. Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan belum menyediakan infrastruktur Riset yang terpadu untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan daya dukung multidimensi.

3. Kemitraan Riset dan Inovasi

a. Pembangunan Manusia

1) Terbatasnya kolaborasi dengan sektor industri, dan kurang terintegrasi antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri, terutama dalam menciptakan program pelatihan kerja dan magang yang dapat membantu masyarakat meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan pasar.
2) Penyediaan dan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau terhadap masyarakat belum digarap secara serius dengan bermitra dengan berbagai lembaga kesehatan.

b. Ekonomi Kreatif dan Pariwisata

Kurangnya sinergi antara pemerintah, lembaga Riset, dan pelaku ekonomi dalam mengembangkan Inovasi produk lokal yang memiliki nilai tambah tinggi. Kolaborasi yang lemah dapat menghambat pengembangan produk inovatif untuk dapat bersaing di pasar nasional dan internasional. Karena itu, upaya kolaborasi harus dilakukan, dan mengadopsi hasil Riset ke dalam transformasi kebijakan ekonomi yang produktif.

c. Lingkungan dan Infrastruktur Perkotaan

Kolaborasi untuk Riset dan Inovasi lingkungan masih kurang berkembang, terutama dalam hal teknologi pengelolaan sampah, limbah, dan konservasi sumber daya alam.

d. Penguatan nilai agama, sosial, dan budaya yang inklusif

Kolaborasi untuk Riset dan Inovasi pengembangan moderasi agama berbasis komunitas dan budaya lokal masih kurang.

e. Tata Kelola Pemerintahan

Lemahnya kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan lembaga swasta dalam merumuskan kebijakan yang mendukung Inovasi sehingga dapat membatasi pengembangan Riset dan Inovasi Daerah.

4. Budaya Riset dan Inovasi

a. Pembangunan Manusia

1) Rendahnya budaya Riset di kalangan tenaga kerja dan masyarakat, sehingga menghambat partisipasi dalam program pengembangan keterampilan berbasis Inovasi.
2) Indeks kesehatan warga Kota Sukabumi memang meningkat, kebiasaan screening kesehatan, imunisasi, dan penanganan penyakit ringan belum intensif.

b. Ekonomi Kreatif dan Pariwisata

Rendahnya budaya Inovasi dalam pengembangan produk UMKM, sehingga produk lokal sulit bersaing dengan produk lain yang lebih inovatif. Budaya Inovasi perlu diinstitusionalisasikan melalui program rutin tahunan seperti festival budaya dan kuliner, napak tilas, kompetisi produk inovatif, dan kampanye Inovasi. Karena itu, Riset potensi pengetahuan lokal, kearifan lokal, dan seluruh potensi sumber daya lokal yang dimiliki harus dilakukan. Selain itu, dukungan infrastruktur Inovasi, seperti startup berbasis Riset akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

c. Lingkungan dan Infrastruktur Perkotaan

Rendahnya kesadaran masyarakat dan budaya Inovasi dalam menjaga kelestarian lingkungan, dan minimnya teknologi lingkungan masih menjadi permasalahan utama dalam mendukung lingkungan yang sehat dan energi terbarukan.

d. Penguatan nilai agama, sosial, dan budaya yang inklusif

1) Kesadaran masyarakat untuk mengembangkan moderasi beragama, merawat budaya lokal sudah berjalan, tetapi masih terbatas, tanpa dukungan penuh dari pemerintah.

2) Norma-norma sosial sosial mulai luntur di kalangan muda. Berkembangnya komunitas pendatang karena berbagai pengembangan area hunian dan layanan jasa dapat berpengaruh pada semakin rendahnya penghayatan terhadap norma-norma sosio-kultural setempat.

e. Tata Kelola Pemerintahan

Minimnya budaya Riset dalam pengambilan keputusan Pemerintah Daerah, sehingga menghambat kebijakan berbasis bukti untuk pembangunan Daerah.

5. Keterpaduan Riset dan Inovasi di daerah

a. Pembangunan Manusia

1) Koordinasi yang lemah antara lembaga pendidikan, pelatihan, dan sektor swasta menyebabkan keterpaduan Riset dan Inovasi dalam pengembangan keterampilan belum optimal. Daya saing manusia harus difokuskan pada sektor unggulan dan *problem solving*.
2) Pelayanan kesehatan terpadu dan merata belum tertata dengan baik.

b. Ekonomi Kreatif dan pariwisata

Kurangnya koordinasi antara sektor-sektor ekonomi lokal dengan lembaga Riset untuk memaksimalkan Inovasi yang dapat memperkuat daya saing produk lokal. Keterpaduan Riset di sektor ekonomi dan pariwisata dimulai dari langkah klasterisasi Inovasi.

c. Lingkungan dan Infrastruktur Perkotaan

Kurangnya koordinasi antar lembaga dalam program lingkungan menyebabkan pelaksanaan Inovasi lingkungan tidak terintegrasi dengan baik dan menghambat efektivitasnya.

d. Penguatan nilai agama, sosial, dan budaya yang inklusif

Riset dan Inovasi penggalian dan pengembangan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya lewat berbagai model kolaborasi antar lembaga pemerintah, agama, sekolah, dan komunitas lokal belum dikeloa dengan baik.

e. Tata Kelola Pemerintahan

Keterpaduan Riset di pemerintahan daerah masih rendah yang mengakibatkan kebijakan pembangunan dan Inovasi kadang tidak berjalan selaras. Perlu melakukan sinkronisasi kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar instansi pemerintahan.

6. Penyelarasan dengan perkembangan global

a. Pembangunan Manusia
1) Keterbatasan dalam akses ke tren teknologi dan pelatihan global membatasi kemampuan tenaga kerja lokal untuk bersaing di pasar kerja internasional.
2) Manajemen dan fasilitas kesehatan di Kota Sukabumi cukup untuk melayani warga, tetapi belum mencapai tingkatan global.

b. Ekonomi Kreatif dan Pariwisata

Keterbatasan dalam adaptasi terhadap tren pasar global, termasuk digitalisasi UMKM dan *e-commerce,* membuat produk lokasi Sukabumi sulit bersaing di pasar internasional.

c. Lingkungan dan Infrastruktur Perkotaan

Keterbatasan Daerah dalam menyesuaikan infrastruktur dengan standar dan teknologi global, seperti konektivitas digital yang stabil, sehingga mempersulit pencapaian daya saing global. Permasalahan global seperti perubahan iklim, energi hijau, kesehatan dan digitalisasi harus direspon dengan kebijakan berbasis bukti.

d. Penguatan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya

Riset dan Inovasi terhadap kekayaan agama dan budaya untuk didigitalisasi dan dokumentasi hingga di diseminasi secara global belum dikerjakan dengan serius.

e. Tata Kelola Pemerintahan

Terbatasnya kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi global dalam tata kelola pemerintahan sehingga belum efisien dalam layanan publik berbasis digital.

3.3 Peluang dalam Pemanfaatan Riset dan Inovasi berkaitan dengan Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Selain menghadapi sejumlah tantangan, Kota Sukabumi juga memiliki berbagai peluang yang sangat potensial untuk dimanfaatkan dalam mengembangkan setiap elemen ekosistem Riset dan Inovasi untuk penguatan produk unggulan daerah sebagai berikut:

1. Kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah

a. Pembangunan Ekosistem Kreatif
Dengan berkembangnya digitalisasi dan *PLATFORM online*, Kota Sukabumi dapat mengembangkan kebijakan yang mendukung sektor ekonomi kreatif, seperti industri desain grafis, seni, kuliner kreatif, dan produk kerajinan lokal. Infrastruktur digital yang mendukung pemasaran produk kreatif, baik melalui *e-commerce* atau media sosial, dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha kreatif untuk memasarkan karya mereka lebih luas.

b. Potensi Sumber Daya Alam
Kota Sukabumi memiliki potensi besar di sektor industri kreatif, pariwisata, serta pertanian dan budidaya perikanan, yang dapat didorong dengan Riset dan Inovasi. Kebijakan yang mendukung pengembangan produk unggulan daerah di sektor industri kreatif dan pariwisata berbasis ekowisata, dapat mengoptimalkan potensi lokal dan meningkatkan daya saing.

c. Pusat Inovasi Kreatif
Pembangunan pusat Riset yang mengkhususkan diri dalam pengembangan industri kreatif, seperti film, animasi, musik, atau aplikasi digital, dapat menjadi peluang besar. Sukabumi bisa memanfaatkan potensi budaya dan seni lokal sebagai sumber inspirasi untuk produk kreatif yang berskala global.

2. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi

   a. Penguatan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi Kreatif
      Dibutuhkan lembaga Riset dan pelatihan yang mengembangkan keahlian dalam sektor ekonomi kreatif, seperti desain produk, pengolahan bahan baku menjadi produk kreatif, hingga pemasaran digital. Program pendidikan yang mengajarkan keterampilan praktis dan Inovasi dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam sektor ini.

   b. Penyediaan Inovasi Teknologi untuk Sektor Kreatif
      Riset yang mendukung pemanfaatan teknologi terbaru dalam pengembangan produk kreatif-misalnya, penggunaan 3D printing untuk kerajinan, atau *augmented reality* untuk promosi pariwisata-dapat memperkuat daya saing produk kreatif Kota Sukabumi di pasar global.

   c. Pengembangan Produk Olahan
      Terdapat peluang untuk mendorong Riset terkait pengolahan hasil pertanian, seperti pembuatan produk olahan pangan dari hasil pertanian lokal, yang memiliki nilai tambah tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan regional.

   d. Kelembagaan untuk Riset Pertanian dan Perikanan
      Sukabumi membutuhkan kelembagaan Riset yang berfokus pada pengembangan sektor pertanian (termasuk pengolahan hasil pertanian dan produk organik) dan akuakultur (perikanan), dengan dukungan pada teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.

3. Kemitraan Riset dan Inovasi

   a. Kemitraan Pemerintah, Akademisi, dan Industri
      Kemitraan yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan masyarakat dapat memperkuat sektor ekonomi kreatif, pariwisata, pertanian dan perikanan. Misalnya, kemitraan antara Pemkot Sukabumi dan universitas lokal dalam Riset dan pengembangan produk unggulan atau dalam pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

   b. Kemitraan dengan Sektor Swasta dan Komunitas
      Kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas masyarakat dapat menghasilkan Inovasi baru, seperti teknologi pengelolaan limbah pertanian atau perikanan, yang dapat berkontribusi pada pengurangan biaya operasional dan meningkatkan keberlanjutan.

   c. Kolaborasi dengan Komunitas Kreatif Lokal
      Sukabumi dapat memperkuat kemitraan dengan komunitas kreatif lokal seperti desainer, pelukis, pengrajin, dan produsen produk kuliner untuk mengembangkan produk berbasis kearifan lokal yang memiliki nilai jual tinggi.

4. Budaya Riset dan Inovasi

   a. Inovasi di Sektor Pariwisata
      Budaya Inovasi di sektor pariwisata berbasis alam juga dapat berkembang, dengan menciptakan produk wisata baru yang berbasis pada potensi alam Sukabumi, seperti ekowisata dan wisata agro.

b. Budaya Inovasi di Sektor Pertanian dan Perikanan
Adopsi budaya Riset dan Inovasi di kalangan petani dan pembudidaya dapat memperkenalkan solusi praktis dalam meningkatkan hasil pertanian dan perikanan. Pengolahan limbah pertanian dan akuakultur menjadi produk bernilai tambah, seperti pupuk organik dan produk olahan perikanan, dapat membuka peluang pasar baru.

5. Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah

a. Sinergi Antar Sektor
Keterpaduan antara sektor pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, dan pariwisata dengan Riset dan Inovasi dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai contoh, penggunaan teknologi dalam pertanian yang berkelanjutan dapat berkontribusi pada pengembangan produk pertanian yang ramah lingkungan dan inovatif.

b. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Terintegrasi
Riset yang mengintegrasikan pengelolaan lahan pertanian dan perikanan, termasuk pemanfaatan limbah sebagai sumber daya berharga, dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

c. Membangun Model Keterpaduan Sektor Kreatif dan Pariwisata
Keterpaduan antara sektor ekonomi kreatif dan pariwisata dapat memperkuat ekosistem kreatif daerah. Misalnya, produk kerajinan lokal yang dipasarkan di destinasi wisata atau festival seni yang juga mempromosikan budaya lokal Sukabumi kepada wisatawan domestik dan mancanegara.

d. Pengembangan Sumber Daya Alam untuk Industri Kreatif
Memanfaatkan produk pertanian dan perikanan sebagai bahan baku untuk industri kreatif-seperti pembuatan kerajinan dari kulit ikan atau produk olahan makanan khas Sukabumi-dapat menciptakan peluang baru dalam sektor ekonomi kreatif.

6. Penyelarasan dengan Perkembangan Global

a. Adopsi Teknologi Global
Sukabumi dapat mengadopsi teknologi pertanian dan perikanan yang berkembang di pasar global, seperti penggunaan sistem pertanian presisi dan teknologi akuakultur berbasis sensor untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

b. Meningkatkan Akses ke Pasar Global untuk Produk Kreatif Sukabumi
Dengan adanya platform digital, produk-produk kreatif dari Sukabumi dapat dijual dan dipromosikan ke pasar global.

c. Peningkatan Kolaborasi Global dalam Ekonomi Kreatif
Menjalin kerja sama dengan negara-negara atau kota-kota lain yang sudah maju di sektor ekonomi kreatif dapat membawa pengetahuan baru, teknologi, dan pasar yang lebih luas untuk produk-produk kreatif Sukabumi.

d. Pengembangan Ekowisata yang Ramah Lingkungan
Dalam sektor pariwisata, terdapat peluang untuk mengembangkan ekowisata dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk promosi global, yang dapat menarik wisatawan domestik dan internasional.

e. Di Sektor Kesehatan
Kota Sukabumi dapat secara bertahap meningkatkan kualitas layanan dan manajemen sesuai standar global dengan mengadopsi teknologi kesehatan canggih dan menerapkan layanan digital untuk mempermudah dan mempercepat respon terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat.

3.4 Peluang dalam Pemanfaatan Riset dan Inovasi berkaitan dengan Penyelesaian Permasalahan Daerah

Peluang juga dimiliki oleh Kota Sukabumi untuk menyelesaikan permasalahan daerah berkaitan dengan daya saing manusia, ekonomi lokal, lingkungan, penguatan nilai agama, sosial, dan budaya, infrastruktur perkotaan, dan tata kelola Pemerintahan. Peluang ini disajikan sebagai berikut dilihat dari elemen ekosistem Riset dan Inovasi:

1. Kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

a. Pembangunan Manusia
Penyusunan kebijakan yang mendukung pengembangan keterampilan dan kompetensi berbasis teknologi, seperti pelatihan digital untuk masyarakat dan UMKM, untuk meningkatkan daya saing di pasar global.

b. Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
Pengembangan kebijakan yang mendorong penggunaan teknologi dalam sektor pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk lokal, serta memperluas pemasaran digital.

c. Lingkungan dan Infrastruktur Perkotaan
   1) Infrastruktur yang mendukung penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan, serta pengembangan laboratorium dan fasilitas Riset yang dapat memajukan Riset terkait lingkungan dan energi terbarukan.
   2) Pengembangan infrastruktur ramah lingkungan untuk mendukung sektor pertanian dan perikanan, seperti sistem irigasi pintar untuk padi, serta pengelolaan air untuk budidaya ikan.

d. Penguatan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya yang inklusif
   1) Riset kebijakan moderasi beragama dan pendidikan karakter kebangsaan, sebagai bagian dari penguatan identitas kota yang agamis dan nasionalis.
   2) Riset sosial-budaya berbasis data dan *evidence-BASED policy*, termasuk pemetaan indeks toleransi, dinamika sosial, dan potensi kerawanan konflik.

e. Tata Kelola Pemerintahan
   1) Penyusunan kebijakan tata kelola yang mendukung sistem pemerintahan berbasis teknologi, memastikan efisiensi administrasi publik dan pelayanan kepada masyarakat.
   2) Membangun sistem data terintegrasi yang bisa mendukung pengelolaan dan monitoring pengembangan PUD dan penyelesaian permasalahan daerah dengan menggunakan teknologi.

2. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi

a. Pembangunan Manusia
   1) Penguatan lembaga pelatihan atau institusi pendidikan lokal untuk menyediakan program yang meningkatkan keterampilan di bidang teknologi, Riset, dan Inovasi yang relevan dengan kebutuhan industri.
   2) Menyediakan pelatihan berkelanjutan untuk para tenaga kesehatan.

b. Ekonomi Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
Membangun lembaga Riset yang fokus pada pengembangan produk unggulan lokal dan Inovasi sektor ekonomi kreatif yang dapat mendukung peningkatan produk lokal dan UMKM.

c. Lingkungan dan Infrastruktur Perkotaan
Membangun kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan menggunakan teknologi *SMART city* dan Riset lingkungan untuk menciptakan sistem pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik.

d. Penguatan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya yang inklusif
Digitalisasi dan dokumentasi warisan budaya lokal, seperti arsip sejarah, tradisi, seni pertunjukan, dan kearifan lokal melalui platform digital.

e. Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah dalam menggunakan teknologi untuk perencanaan dan pengelolaan kota yang lebih efisien, serta meningkatkan pelayanan publik berbasis data.

3. Kemitraan Riset dan Inovasi

a. Pembangunan Manusia
1) Membangun kemitraan dengan universitas, lembaga pelatihan, dan sektor swasta untuk meningkatkan keterampilan digital masyarakat dan pelaku UMKM.

2) Membangun kerja sama dengan lembaga akademik untuk mengadakan pelatihan kesehatan jangka pendek atau regular untuk kalangan tenaga medis.

b. Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
Membangun kemitraan dengan industri besar dan lembaga Riset untuk mengembangkan produk lokal dan membuka pasar baru, serta meningkatkan kapasitas produksi dan pemasaran melalui teknologi digital.

c. Lingkungan dan Infrastruktur Perkotaan
Kemitraan dengan perusahaan teknologi hijau dan lembaga Riset untuk mengembangkan infrastruktur ramah lingkungan, serta implementasi sistem *SMART city* yang berbasis pada teknologi pengelolaan lingkungan.

d. Penguatan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya yang inklusif
Membangun kolaborasi Riset dan Inovasi bersama lembaga akademik, komunitas agama, lembaga pendidikan formal, para pegiat budaya, media, pasar, dan masyarakat lokal.

e. Tata Kelola Pemerintahan
Kemitraan antara Pemerintah Daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memperkenalkan solusi berbasis teknologi dalam penyelesaian masalah administrasi publik, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

4. Budaya Riset dan Inovasi

a. Pembangunan Manusia
1) Menciptakan budaya Inovasi yang mendalam di kalangan masyarakat dan pelaku UMKM, dengan menyelenggarakan kompetisi Inovasi dan penelitian berbasis teknologi untuk mendorong partisipasi dalam Riset dan pengembangan produk.
2) Secara reguler mengadakan sosialisasi kesehatan untuk mendorong masyarakat peduli kesehatan melakukan pemeriksaan, imunisasi, dan tindakan pencegahan lain.

b. Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
Mengembangkan budaya Inovasi di sektor ekonomi kreatif dengan mempromosikan penelitian dan pengembangan produk lokal yang memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi.

c. Lingkungan dan Infrastruktur Perkotaan
Mendorong budaya Riset di kalangan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pengelolaan sampah dan energi terbarukan.

d. Penguatan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya yang inklusif
Mendorong komunitas agama, budaya, dan masyarakat lokal dengan berbagai aneka kegiatan berbasis Riset dan Inovasi.

e. Tata Kelola Pemerintahan
Mengadopsi budaya Riset dalam proses kebijakan publik untuk mendorong penggunaan data dalam pembuatan keputusan dan perencanaan yang lebih berbasis bukti.

5. Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah

a. Pembangunan Manusia
1) Penyelarasan kebijakan pendidikan dan pelatihan nasional dengan kebutuhan lokal untuk memastikan pengembangan kompetensi yang tepat dan relevan dengan permintaan industri.
2) Membangun kerja sama dengan lembaga akademik dan profesional untuk pelatihan tenaga medis sesuai kebutuhan Daerah.

b. Ekonomi Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
Menyelaraskan kebijakan Daerah dengan kebijakan nasional dalam mendukung pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan daya saing dan menciptakan lapangan kerja.

c. Lingkungan dan Infrastruktur Perkotaan
Mengintegrasikan kebijakan lingkungan daerah dengan kebijakan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan infrastruktur ramah lingkungan yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

d. Penguatan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya yang inklusif
Pengembangan model Inovasi sosial berbasis komunitas, termasuk skema pemberdayaan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan komunitas lintas budaya.

e. Tata Kelola Pemerintahan
Menyelaraskan kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan nasional untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui digitalisasi dan transparansi.

6. Penyelarasan dengan perkembangan global

a. Pembangunan Manusia
1) Meningkatkan kapasitas SDM dengan keterampilan yang sesuai dengan tren global, seperti pengembangan keterampilan digital, keterampilan teknis, dan kemampuan berInovasi.
2) Meng*upgrade* keterampilan dan pengetahuan tenaga medis dan mendorong kesadaran kesehatan warga sesuai tren kesehatan global.

b. Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
Membuka akses pasar global untuk produk lokal dengan memanfaatkan platform digital dan mengikuti tren pasar global di bidang ekonomi kreatif, pertanian, dan perikanan.

c. Lingkungan dan Infrastruktur Perkotaan
Mengadopsi teknologi dan praktik ramah lingkungan yang sudah terbukti di tingkat global, serta mengimplementasikan sistem yang mendukung *SMART city* dan energi terbarukan yang sesuai dengan standar internasional.

d. Penguatan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya yang inklusif
1) Bekerja sama dengan lembaga akademik untuk mendorong Riset komparatif terhadap negara lain.
2) Membangun kerja sama dengan media nasional dan internasional untuk diseminasi warisan budaya dan religius masyarakat lokal.

e. Tata Kelola Pemerintahan
Mengintegrasikan standar global dalam tata kelola pemerintahan melalui penggunaan teknologi dalam pengelolaan data publik dan pengembangan sistem pelayanan yang lebih transparan dan efisien.

3.5 Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi yang Diharapkan

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan terhadap berbagai tantangan dan peluang yang dimiliki Kota Sukabumi, maka disusun serangkaian kondisi yang diharapkan dapat tercapai pada Tahun 2029 untuk setiap elemen Riset dan Inovasi. Berikut kondisi yang diharapkan untuk area penguatan *EVIDENCE-BASED policy* dan area elemen Riset dan Inovasi**:** Tabel 15. Kondisi yang diharapkan untuk *evidence-BASED policy*.

Tabel 15. Kondisi yang diharapkan untuk *EVIDENCE-BASED policy*

No.	Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Hasil Identifikasi Tantangan yang Dihadapi Daerah	Hasil Identifikasi Peluang yang Dihadapi Daerah	Kondisi yang Diharapkan
1	Kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	• Kota Sukabumi mengalami keterbatasan data lokal yang komprehensif, terintegrasi, serta terbuka di berbagai sektor, yang menjadi hambatan dalam perumusan kebijakan berbasis bukti. • Kurangnya literasi digital dan keterampilan analisis data pada aparat pemerintah serta keterbatasan SDM di bidang Riset dan Inovasi menjadi kendala dalam mengadopsi teknologi baru. • Terbatasnya infrastruktur Riset dan pengembangan teknologi yang relevan untuk daerah, termasuk fasilitas Riset dan teknologi yang mendukung Inovasi. • Keterbatasan anggaran dan dukungan Riset menghambat ruang lingkup serta hasil Riset yang relevan untuk pemecahan masalah lokal. • Kurangnya fasilitas dan layanan kesehatan yang responsif dan berkualitas.	• Pemanfaatan teknologi cerdas seperti IoT, big data, dan kecerdasan buatan (AI) menawarkan peluang bagi Kota Sukabumi untuk meningkatkan kualitas Riset yang relevan dengan kondisi lokal. • Digitalisasi Riset dapat membantu proses pemantauan kebijakan secara *REAL-TIME* dan meningkatkan responsivitas terhadap Perubahan sosial dan tantangan lingkungan. • Pengembangan platform data seperti Satu Data Kota Sukabumi dapat memberikan akses terbuka untuk data lokal yang lebih komprehensif, serta memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. • Peningkatan dukungan anggaran untuk Riset yang relevan dengan kebutuhan daerah, seperti energi terbarukan dan pengelolaan limbah. • Peningkatan dukungan kebijakan dan anggaran.	• Kota Sukabumi diharapkan memiliki kebijakan yang lebih akurat dan efektif berdasarkan data lokal yang mendukung pengembangan sektor prioritas. • Pengambilan keputusan berbasis bukti yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. • Infrastruktur Riset yang terintegrasi dan akses digital yang memadai untuk peneliti, UMKM, dan industri lokal dapat mendukung kolaborasi dan Inovasi. • Layanan publik yang lebih inovatif dan efisien melalui teknologi digital yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. • Kota Sukabumi menyediakan layanan dan manajemen kesehatan yang responsif, terjangkau, berkualitas dan murah

2	Kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi di daerah	• Keterbatasan SDM dalam Riset menghalangi pengembangan Riset berbasis bukti yang relevan dengan kebutuhan lokal. • Kurangnya koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga Riset, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk mendukung Inovasi teknologi yang dibutuhkan.	• Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknologi digital dan analisis data yang dapat meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dalam menerjemahkan data dan Riset ke dalam kebijakan berbasis bukti. • Kerja sama dengan akademisi dan sektor swasta dapat menciptakan ekosistem yang lebih kolaboratif dalam Riset dan Inovasi	Meningkatkan kapasitas SDM dalam Riset dan teknologi yang relevan, baik di sektor pemerintahan, akademisi, maupun masyarakat umum. •Kolaborasi yang lebih kuat antara lembaga penelitian, pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk mendukung Riset yang berbasis bukti dan teknologi yang tepat guna
3	Kemitraan Riset dan Inovasi	Terbatasnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor industri, dan komunitas lokal menyebabkan adanya kesenjangan antara hasil Riset dan kebutuhan pasar.	Potensi pengembangan sinergi antara akademisi, pemerintah, sektor swasta dan komunitas lokal dalam penelitian yang berfokus pada teknologi tepat guna.	Terjalinnya kemitraan yang sinergis dan berkelanjutan antara pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk mendukung Riset dan Inovasi lokal yang relevan dengan kebutuhan daerah.
4	Budaya Riset dan Inovasi	• Budaya Riset di kalangan aparatur pemerintah dan masyarakat masih rendah, dengan literasi digital yang terbatas. • Terbatasnya Riset yang fokus pada Inovasi teknologi tepat guna yang dapat menyelesaikan masalah daerah, seperti pengolahan limbah, infrastruktur, pelestarian budaya lokal dan akses pasar.	• Penguatan infrastruktur Riset dan inkubasi Inovasi, termasuk pengembangan teknologi hijau dan energi terbarukan, dapat memperkuat ekosistem Riset. • Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur pemerintah dalam Riset dan Inovasi melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.	• Masyarakat dan aparatur pemerintah yang memiliki budaya Riset tinggi, literasi digital yang baik, dan kesadaran terhadap pentingnya Inovasi untuk meningkatkan daya saing daerah. • Pengembangan teknologi tepat guna yang relevan untuk menyelesaikan masalah lokal, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efisien hidup, konservasi dan branding ekonomi budaya lokal.

5	Keterpaduan Inovasi di Daerah	• Keterpaduan Riset dan implementasi kebijakan berbasis bukti masih kurang optimal. • Kurangnya integrasi hasil Riset dalam perumusan kebijakan daerah yang adaptif terhadap perubahan sosial dan lingkungan.	Peluang untuk meningkatkan keterpaduan Riset dengan kebijakan daerah melalui pengembangan sistem manajemen data yang lebih baik dan kolaborasi yang lebih erat antara lembaga Riset, pemerintah, sektor swasta dan komunitas lokal.	Keterpaduan yang baik antara hasil Riset dan implementasi kebijakan berbasis bukti yang mendukung pembangunan daerah yang relevan dan adaptif.
6	Penyelarasan dengan perkembangan global	• Responsivitas kebijakan daerah terhadap perkembangan Riset dan Inovasi global masih rendah, terutama dalam mengadopsi teknologi baru yang sesuai dengan tantangan lokal. • Keterbatasan pemahaman terhadap tren teknologi global dan potensi adopsinya dalam konteks lokal.	• Adopsi teknologi cerdas, seperti AI dan teknologi hijau, dapat meningkatkan daya saing daerah, serta membantu dalam menghadapi tantangan lingkungan dan sosial yang ada. • Kemitraan dengan lembaga internasional dapat memperkuat kapasitas Riset dan memperkenalkan teknologi baru yang dapat diterapkan di daerah.	• Kebijakan daerah yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi global dan dapat mengintegrasikan teknologi baru yang sesuai dengan tantangan lokal, seperti energi terbarukan, kecerdasan buatan, dan teknologi hijau. • Pengembangan Inovasi berkelanjutan dengan mempertimbangkan perkembangan global yang relevan dengan kebutuhan lokal.

Tabel 16. Tema Prioritas Ekosistem Riset dan Inovasi dan Kondisi yang Diharapkan

Tema Prioritas Ekosistem dan Inovasi Saat Ini di Kota Sukabumi
Tema prioritas Riset dan Inovasi Kota Sukabumi adalah **"Riset dan Inovasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan"** Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dinilai dari kemampuan Kota Sukabumi dalam mengembangan produk unggulan daerah yakni pertanian, perikanan, ekonomi/industri kreatif, dan pariwisata. Selanjutnya, dinilai pula dari kemampuan Kota Sukabumi dalam menyelesaikan permasalahan daerah, meliputi permasalahan daya saing manusia, ekonomi lokal, pariwisata, lingkungan hidup dan infrastruktur, serta tata Kelola pemerintahan.

Kondisi Ekosistem Riset yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas				
A. Kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah				
No.	**Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi**	**Hasil Identifikasi Tantangan yang Dihadapi Daerah**	**Hasil Identifikasi Peluang yang Dihadapi Daerah**	**Kondisi yang Diharapkan**
1	Penguatan kebijakan Riset dan Inovasi untuk sektor pertanian dan perikanan	• Terbatasnya kebijakan yang berfokus pada peningkatan adopsi teknologi pertanian presisi dan teknologi IoT untuk perikanan. • Infrastruktur penelitian seperti laboratorium pertanian dan akuakultur yang canggih belum tersedia di semua kecamatan.	• Kota Sukabumi memiliki potensi Sumber Daya alam yang besar di sektor pertanian dan perikanan yang dapat didorong dengan Riset dan Inovasi. • Sektor perikanan seperti ikan nila dan lele memiliki potensi pasar yang luas, baik domestik maupun ekspor. • Pengembangan teknologi dalam • budidaya dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan.	Tersedianya kebijakan yang mendorong Riset yang aplikatif untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan, serta memperkenalkan teknologi inovatif untuk efisiensi produksi dan berkelanjutan.

2	Penguatan kebijakan Riset dan Inovasi untuk sektor ekonomi kreatif dan Pariwisata	• Terbatasnya kebijakan khusus yang mendorong Digitalisasi dan Inovasi di bidang Pariwisata. • Minimnya pusat Riset yang fokus pada pengembangan produk kreatif lokal. • Terbatasnya infrastruktur penunjang seperti pusat pelatihan digital untuk pengusaha lokal.	• Dengan berkembangnya digitalisasi dan platform *online*, Sukabumi dapat mengembangkan kebijakan yang mendukung sektor ekonomi kreatif, seperti industri desain grafis, seni, kuliner kreatif, dan produk kerajinan lokal. • Pembangunan pusat Riset yang mengkhususkan diri dalam pengembangan industri kreatif, seperti film, animasi, musik, atau aplikasi digital, dapat menjadi peluang besar. • Wisata berbasis alam dan Budaya Sukabumi dapat dipasarkan melalui platform digital • Pengembangan infrastruktur Pariwisata yang didukung oleh Riset dalam bidang Pemasaran digital dan pengelolaan destinasi	Terwujudnya kebijakan yang mendorong Riset untuk pengembangan produk kreatif, Pariwisata Berkelanjutan, dan Digitalisasi sektor Pariwisata untuk meningkatkan daya Tarik global.
3	Penguatan kebijakan Riset dan Inovasi untuk peningkatan daya saing manusia	• Kurangnya dukungan kebijakan untuk peningkatan keterampilan teknis dan kemampuan adaptasi teknologi pada masyarakat • Infrastruktur pelatihan dan Pendidikan belum optimal, khususnya yang relevan dengan tren Digitalisasi dan otomatisasi	• Penyusunan kebijakan yang mendukung pengembangan keterampilan dan kompetensi berbasis teknologi, seperti pelatihan digital untuk masyarakat dan UMKM, untuk meningkatkan daya saing di pasar global. • Pemanfaatan teknologi digital untuk mengakses pelatihan dan kursus *online* yang dapat meningkatkan keterampilan masyarakat	Terwujudnya kebijakan yang mendorong penyediaan pelatihan keterampilan berbasis teknologi dan Digitalisasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal

4	Penguatan kebijakan Riset dan Inovasi untuk peningkatan ekonomi lokal	• Terbatasnya kebijakan insentif yang mendukung Riset dan Inovasi di sektor UMKM • Keterbatasan akses pasar untuk produk lokal, baik di tingkat regional maupun tingkat nasional • Infrastruktur digital yang mendukung pemasaran dan distribusi produk lokal, terutama yang berasal dari sektor kreatif dan pertanian, masih terbatas	Pengembangan kebijakan yang mendorong penggunaan teknologi dalam sektor pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk lokal, serta memperluas pemasaran digital.	Terwujudnya kebijakan yang mendukung Pemberdayaan UMKM melalui Riset, Inovasi, serta akses modal dan pasar yang lebih mudah.
5	Penguatan kebijakan Riset dan Inovasi untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur perkotaan	• Terbatasnya kebijakan yang mendorong Riset terkait mitigasi Perubahan iklim dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan • Infrastruktur untuk pengelolaan limbah, teknologi pertanian Berkelanjutan, dan konservasi alam masih kurang • Terbatasnya anggaran dan perencanaan yang mendukung pembangunan infrastruktur Riset, seperti laboratorium, pusat Inovasi, dan fasilitas lainnya	• Infrastruktur yang mendukung penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan, serta pengembangan laboratorium dan fasilitas Riset yang dapat memajukan Riset terkait lingkungan dan energi terbarukan. • Pengembangan teknologi hijau untuk pembangunan infrastruktur ramah lingkungan untuk mendukung sektor pertanian dan perikanan, seperti sistem irigasi pintar untuk padi, serta pengelolaan air untuk budidaya ikan.	Terwujudnya kebijakan yang mengintegrasikan Riset dan Inovasi dalam pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan serta mendukung penciptaan kota Berkelanjutan.

6	Penguatan kebijakan Riset dan Inovasi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan	• Terbatasnya kebijakan yang memungkinkan akses publik yang transparan terhadap data dan informasi Riset di tingkat daerah • Terbatasnya penggunaan teknologi dalam administrasi publik sehingga menghambat efisiensi tata kelola yang mendukung Riset dan Inovasi	• Penyusunan kebijakan tata kelola yang mendukung sistem pemerintahan berbasis teknologi, memastikan efisiensi dan transparansi administrasi publik dan pelayanan kepada masyarakat. • Membangun sistem data terintegrasi yang bisa mendukung pengelolaan dan monitoring pengembangan PUD dan penyelesaian permasalahan daerah dengan menggunakan teknologi.	Peningkatan kapasitas SDM di sektor pemerintah untuk menggunakan teknologi dalam meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang efisien, transparan, dan partisipatif.
7	Penguatan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya yang inklusif	Terbatasnya kebijakan yang mendorong Riset terkait pemetaan indeks toleransi, dinamika sosial, dan potensi kerawanan konflik. Kurangnya infrastruktur digitalisasi dan dokumentasi warisan budaya lokal, seperti arsip sejarah, tradisi, seni pertunjukan Terbatasnya dukungan anggaran terhadap pengembangan model Inovasi sosial berbasis komunitas, termasuk skema pemberdayaan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan komunitas lintas budaya.	Kuatnya dukungan kebijakan dan infrastruktur terhadap Riset dan Inovasi nilai-nilai agama, sosial, dan budaya lokal seperti pemetaan dinamika sosial, kekayaan budaya, dokumentasi dan digitalisasi warisan budaya lokal. Berbagai kegiatan moderasi agama, penggalian dan pelestarian nilai-nilai budaya dan norma sosial didukung dengan kekuatan anggaran.	Kota Sukabumi menjadi kota yang memiliki indeks kerukunan umat beragama, ketertiban, dan warisan budaya lokal tinggi

8	Penguasaan basis data sistem informasi iptek daerah	Data terkait Riset dan Inovasi di daerah Kota Sukabumi belum terintegrasi seluruhnya	Pengembangan basis data untuk memetakan potensi Riset dan Inovasi di daerah yang bisa diakses oleh berbagai pihak	Tersedia pusat basis data untuk potensi Riset dan Inovasi daerah yang mudah diakses publik

Kondisi Ekosistem Riset yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas **B. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi**				
No.	**Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi**	**Hasil Identifikasi Tantangan yang Dihadapi Daerah**	**Hasil Identifikasi Peluang yang Dihadapi Daerah**	**Kondisi yang Diharapkan**
1	Kelembagaan Riset dan Inovasi untuk sektor pertanian dan perikanan	Kapasitas kelembagaan di tingkat lokal masih terbatas dalam mendukung Riset terapan di bidang agroteknologi dan budidaya perikanan Berkelanjutan, terutama dalam bentuk fasilitas Riset lapangan dan dukungan teknis	• Tersedianya potensi komoditas unggulan seperti nila dan lele yang dapat dikembangkan melalui Riset aplikasi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas • Terdapat peluang untuk mendorong Riset terkait pengolahan hasil pertanian, seperti pembuatan produk olahan pangan dari hasil pertanian lokal, yang memiliki nilai tambah tinggi untuk memenuhi • kebutuhan pasar lokal dan regional.	Terbentuknya dan menguatnya kelembagaan Riset yang menjembatani antara dunia penelitian dan penerapan teknologi oleh petani dan pembudidaya, serta mempercepat adopsi Inovasi teknologi.

2	Kelembagaan Riset dan Inovasi untuk sektor ekonomi kreatif dan Pariwisata	• Kapasitas lembaga Riset yang mendukung Inovasi produk kreatif serta penyusunan strategi pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal masih terbatas. • Terbatasnya sumber daya manusia yang terlatih di bidang Digitalisasi dan Pemasaran Pariwisata serta ekonomi kreatif.	• Penguatan lembaga pendidikan dan pelatihan ekonomi kreatif dengan mengembangkan keahlian dalam sektor ekonomi kreatif, seperti desain produk, pengolahan bahan baku menjadi produk kreatif, hingga pemasaran digital. • Penyediaan Inovasi teknologi untuk Sektor Kreatif, misalnya, penggunaan 3D printing untuk kerajinan, atau *augmented reality* untuk promosi Pariwisata.	Terbentuknya kelembagaan Riset yang fokus pada pengembangan produk kreatif dan penelitian untuk mendukung sektor pariwisata termasuk kolaborasi dengan pelaku usaha dan lembaga pendidikan.
3	Kelembagaan Riset dan Inovasi untuk peningkatan daya saing manusia	• Kapasitas Lembaga Pendidikan dan pelatihan untuk menyediakan pelatihan yang relevan dan berkualitas tinggi yang relevan dengan tren dan kebutuhan industri masih terbatas. Ketersediaan program berbasis Riset di tingkat sekolah juga masih terbatas. • Terbatasnya Lembaga yang mendukung Riset untuk pengembangan keterampilan manusia dalam sektor teknologi dan ekonomi kreatif.	• Penguatan lembaga pelatihan atau institusi pendidikan lokal untuk menyediakan program yang meningkatkan keterampilan di bidang teknologi, Riset, dan Inovasi yang relevan dengan kebutuhan industri.	Adanya kelembagaan yang menyediakan fasilitas pelatihan berbasis Riset untuk meningkatkan daya saing masyarakat dalam berbagai sektor, termasuk teknologi dan ekonomi kreatif

4	Kelembagaan Riset dan Inovasi untuk peningkatan ekonomi lokal	• Kelembagaan Riset di daerah terbatas dalam hal dukungan untuk sektor ekonomi lokal, terutama dalam pengembangan produk inovatif yang sesuai dengan permintaan pasar • Keterbatasan akses bagi UMKM untuk memanfaatkan Riset dalam mengembangkan produk dan meningkatkan daya saing	• Membangun lembaga Riset yang fokus pada pengembangan produk unggulan lokal dan Inovasi sektor ekonomi kreatif yang dapat mendukung peningkatan produk lokal dan UMKM. • Adanya dukungan pemerintah berupa program yang mendukung Riset terapan untuk UMKM dan peningkatan kapasitas produksi • berbasis teknologi	• Terciptanya kelembagaan yang menghubungkan UMKM dengan Lembaga Riset untuk mendukung pengembangan produk dan efisiensi produksi melalui teknologi dan Inovasi
5	Kelembagaan Riset dan Inovasi untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur perkotaan	• Lemahnya kapasitas Lembaga daerah dalam merencanakan dan mengelola infrastruktur Inovasi dan kelestarian lingkungan yang efisien dan berkelanjutan	Membangun kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan menggunakan teknologi *SMART city,* teknologi hijau, dan Riset lingkungan untuk menciptakan sistem pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik.	Penguatan kelembagaan Riset yang fokus pada pengembangan teknologi hijau dan solusi Berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur perkotaan
6	Kelembagaan Riset dan Inovasi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan	• Masih rendahnya pemahaman dan implementasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan • Keterbatasan Lembaga yang mendukung Riset dalam peningkatan kapasitas tata kelola Pemerintahan berbasis teknologi	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah dalam menggunakan teknologi untuk perencanaan dan pengelolaan kota yang lebih efisien, serta meningkatkan pelayanan publik berbasis data.	Terbentuknya kelembagaan Riset yang fokus pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menggunakan teknologi untuk tata kelola yang lebih efisien dan transparan.

7	Penguatan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya yang inklusif	• Lemahnya kapasitas kelembagaan untuk meriset kebijakan moderasi beragama dan pendidikan karakter kebangsaan, sebagai bagian dari penguatan identitas kota yang agamis dan nasionalis. • Terbatasnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung Riset dan Inovasi yang merevitalisasi dan mengembangkan budaya lokal, termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dan agama.	Terdapat potensi kelembagaan, kekayaan agama dan budaya, dan peluang pengembangan pendidikan karakter, dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.	Tersedianya kapasitas kelembagaan yang memadai untuk mengembangkan Riset dan Inovasi moderasi agama, pendidikan karakter kebangsaan, pengembangan budaya lokal hingga penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dan agama
8	Kelembagaan pendukung Riset dan Inovasi di tingkat kelurahan	Terbatasnya sumber daya manusia dan fasilitas Riset di tingkat kelurahan yang dapat mendukung Inovasi lokal	Potensi dalam Pemberdayaan masyarakat kelurahan pinggiran melalui Riset lokal dan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Terciptanya kelembagaan Riset di tingkat kelurahan yang dapat mendorong Inovasi dan pengembangan produk setempat melalui pemanfaatan teknologi dan Riset

Kondisi Ekosistem Riset yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas				
C. Kemitraan Riset dan Inovasi				
No.	**Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi**	**Hasil Identifikasi Tantangan yang Dihadapi Daerah**	**Hasil Identifikasi Peluang yang Dihadapi Daerah**	**Kondisi yang Diharapkan**
1	Platform kemitraan Riset dan Inovasi	• Terbatasnya *PLATFORM* terintegrasi yang memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta untuk Riset dan Inovasi • Terbatasnya sistem yang menyatukan *STAKEHOLDER* dalam satu wadah yang mempermudah akses terhadap Riset dan Inovasi	• Kolaborasi antar Lembaga dan sektor dapat saling menguntungkan dengan berbagi pengetahuan dan teknologi • Pengembangan platform digital potensial dilakukan untuk menyatukan Riset, Inovasi, dan Peluang bisnis di berbagai sektor	Terbentuknya *PLATFORM* kemitraan yang terintegrasi, yang memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara berbagai pihak dalam ekosistem Inovasi daerah
2	Kemitraan Riset dan Inovasi untuk sektor pertanian dan perikanan	Minimnya kerja sama antara petani atau pembudidaya dan Lembaga Riset dalam penerapan teknologi yang meningkatkan hasil pertanian dan perikanan	• Tersedianya berbagai Lembaga Riset yang dapat melakukan penelitian terapan, seperti pengembangan teknologi budidaya ikan nila, lele, serta padi yang dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor perikanan dan pertanian • Kemitraan antara Lembaga dan industri berpotensi untuk memperkenalkan teknologi baru pada petani dan pembudidaya	Terjalinnya kemitraan yang lebih kuat antara sektor Riset, petani, dan pembudidaya yang berfokus pada implementasi teknologi terbaru dan peningkatan hasil produk pertanian dan perikanan
3	Kemitraan Riset dan Inovasi untuk sektor ekonomi kreatif dan Pariwisata	Terbatasnya akses pelaku usaha ekonomi kreatif dan Pariwisata terhadap Riset yang mendukung Inovasi dan pengembangan produk wisata	Potensi besar untuk menciptakan sinergi antara sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan Riset untuk pengembangan produk-produk baru yang menarik bagi wisatawan.	Terwujudnya kemitraan antara sektor Riset, pelaku ekonomi kreatif, dan pengelola pariwisata untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang berbasis Inovasi.

4	Kemitraan Riset dan Inovasi untuk peningkatan daya saing manusia	• Terbatasnya kolaborasi dengan sektor industri untuk menciptakan program pelatihan kerja dan magang yang dapat membantu masyarakat meningkatkan keterampilan sesuai pasar • Terbatasnya akses masyarakat terhadap pelatihan dan pendidikan berbasis Riset untuk pengembangan keterampilan di sektor industri-industri baru	Membangun kemitraan dengan universitas, lembaga pelatihan, dan sektor swasta untuk meningkatkan keterampilan digital masyarakat dan pelaku UMKM.	Terbangunnya kemitraan antara lembaga pendidikan, Riset, dan sektor industri untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia melalui pelatihan yang berbasis pada Riset dan Inovasi.
5	Kemitraan Riset dan Inovasi untuk peningkatan ekonomi lokal	• Kurangnya sinergi antara pemerintah, Lembaga Riset, dan pelaku ekonomi dalam mengembangkan Inovasi produk lokal yang memiliki nilai tambah tinggi. • Terbatasnya pendanaan Riset dan Inovasi untuk sektor UMKM yang berpotensi menjadi pendorong utama ekonomi lokal.	Membangun kemitraan dengan industri besar dan lembaga Riset untuk mengembangkan produk lokal dan membuka pasar baru, serta meningkatkan kapasitas produksi dan pemasaran melalui teknologi digital.	Terjalinnya kemitraan yang lebih erat antara lembaga Riset, sektor swasta, dan UMKM untuk mendukung pengembangan produk lokal berbasis teknologi dan Inovasi.
6	Kemitraan Riset dan Inovasi untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur perkotaan	• Kolaborasi untuk Riset dan Inovasi lingkungan masih kurang berkembang, terutama dalam hal teknologi pengelolaan limbah dan konservasi Sumber Daya Alam • Terbatasnya pendanaan Riset dan Inovasi untuk sektor UMKM yang berpotensi menjadi pendorong utama ekonomi lokal.	• Potensi pengembangan UMKM berbasis Riset dengan bantuan teknologi dan Inovasi untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal. • Program Riset yang dapat mendukung efisiensi operasional UMKM dan membantu mereka mengadopsi teknologi baru untuk memajukan bisnis mereka.	Terwujudnya kemitraan antara pemerintah, lembaga Riset, dan sektor swasta untuk mengembangkan infrastruktur perkotaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

7	Penguatan nilai agama, sosial, dan budaya yang inklusif	Kolaborasi untuk Riset dan Inovasi pengembangan moderasi agama berbasis komunitas dan budaya lokal masih kurang.	Ada berbagai komunitas agama dan budaya di Kota Sukabumi	Terbentuknya wadah yang mengakomodasi dan mengembangkan kolaborasi di antara berbagai komunitas agama dan budaya di Kota Sukabumi
8	Kemitraan Riset dan Inovasi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan	Lemahnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Lembaga swasta dalam merumuskan kebijakan yang mendukung Inovasi sehingga dapat membatasi pengembangan Riset dan Inovasi daerah	Kemitraan antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memperkenalkan solusi berbasis teknologi dalam penyelesaian masalah administrasi publik, transparansi, dan partisipasi masyarakat.	Terjalinnya kemitraan yang kuat antara lembaga Riset dan pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan menggunakan teknologi dan data yang lebih baik.

Kondisi Ekosistem Riset yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas				
D. Budaya Riset dan Inovasi				
No.	**Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi**	**Hasil Identifikasi Tantangan yang Dihadapi Daerah**	**Hasil Identifikasi Peluang yang Dihadapi Daerah**	**Kondisi yang Diharapkan**
1	Budaya kreatif dan inovatif di sektor pertanian dan perikanan	• Budaya Riset di kalangan petani dan pembudidaya masih kurang, terutama dalam hal adopsi teknologi baru. • Keterbatasan akses terhadap teknologi dan pelatihan	• Peningkatan permintaan akan produk pertanian dan perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. • Potensi pengembangan teknologi seperti hidroponik, aquaponik, dan IoT	Adanya budaya inovatif di kalangan petani dan nelayan yang mampu mengadopsi teknologi modern dalam produksi dan pengolahan hasil pertanian serta perikanan.
2	Budaya kreatif dan inovatif di sektor ekonomi kreatif dan pariwisata	• Minimnya kesadaran akan pentingnya Riset dan Inovasi dalam mengembangkan produk kreatif yang memiliki nilai tambah. • Minimnya pengetahuan mengenai pemasaran digital dan Inovasi produk untuk meningkatkan daya tarik wisata.	Budaya Inovasi di sektor pariwisata berbasis alam, budaya lokal, dan UMKM kreatif dapat berkembang dan diminati wisatawan	Terwujudnya komunitas kreatif yang terus menghasilkan Inovasi produk dan layanan yang meningkatkan daya tarik wisata dan produk lokal di pasar global.

3	Budaya kreatif dan inovatif dalam peningkatan daya saing manusia	• Rendahnya Budaya Riset di kalangan tenaga kerja dan masyarakat, sehingga menghambat partisipasi dalam program pengembangan keterampilan berbasis Inovasi • Rendahnya kemampuan dan akses terhadap pelatihan keterampilan digital di kalangan masyarakat dan pelaku UMKM.	Menciptakan budaya Inovasi yang mendalam di kalangan masyarakat dan pelaku UMKM, dengan menyelenggarakan kompetisi Inovasi dan penelitian berbasis teknologi untuk mendorong partisipasi dalam Riset dan pengembangan produk.	Adanya masyarakat yang memiliki keterampilan dan mampu bersaing di pasar kerja dengan adaptasi teknologi yang lebih baik.
4	Budaya kreatif dan inovatif dalam peningkatan ekonomi lokal	• Rendahnya Budaya Inovasi dalam pengembangan produk UMKM, sehingga produk lokal sulit bersaing dengan produk lain yang lebih inovatif • Terbatasnya akses permodalan dan pengetahuan untuk memulai dan mengembangkan usaha baru.	• Mengembangkan budaya Inovasi di sektor ekonomi kreatif dengan mempromosikan penelitian dan pengembangan produk lokal yang memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi. • Adanya dukungan dari pemerintah dan swasta untuk program pembiayaan UMKM serta meningkatnya minat terhadap produk lokal dan organik.	Terbentuknya ekosistem UMKM yang inovatif dan berdaya saing tinggi dengan basis produk lokal yang berkualitas.
5	Budaya kreatif dan inovatif dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur	Rendahnya kesadaran masyarakat dan Budaya Inovasi dalam menjaga kelestarian lingkungan, sehingga potensi teknologi lingkungan belum dimanfaatkan sepenuhnya	Mendorong budaya Riset di kalangan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pengelolaan sampah dan energi terbarukan.	Terciptanya budaya inovatif di masyarakat dalam mendukung keberlanjutan lingkungan hidup melalui inisiatif daur ulang dan energi terbarukan.

6	Budaya kreatif dan inovatif dalam tata kelola pemerintahan	Minimnya Budaya Riset dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah, sehingga menghambat kebijakan berbasis bukti untuk pembangunan daerah	Mengadopsi budaya Riset dalam proses kebijakan publik untuk mendorong penggunaan data dalam pembuatan keputusan dan perencanaan yang lebih berbasis bukti.	Pemerintah yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan tata kelola berbasis teknologi.
7	Penguatan nilai agama, sosial, dan budaya yang inklusif	• Kesadaran masyarakat untuk mengembangkan moderasi beragama, merawat budaya lokal sudah berjalan, tetapi belum didukung penuh pemerintah. • Norma-norma sosial sosial mulai luntur di kalangan muda. Berkembangnya komunitas pendatang karena berbagai pengembangan area hunian dan layanan jasa dapat berpengaruh pada semakin rendahnya penghayatan terhadap norma-norma sosio-kultural setempat.	• Komunitas agama masyarakat sudah mengadakan berbagai event moderasi agama. • Masyarakat Kota Sukabumi memiliki warisan nilai-nilai sosio-kultural yang kaya dan memiliki sejarah panjang	• Budaya *bottom-up* komunitas beragama diperkuat dukungan kebijakan dan anggaran pemerintah untuk melestarikan identitas Kota Sukabumi agamis, inklusif, nasionalis, dan berbudaya.
8	Pengembangan wirausaha baru melalui pengembangan UMKM	Kurangnya pelatihan kewirausahaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.	Meningkatnya peluang pasar untuk produk lokal dengan ciri khas dan kualitas tinggi serta dukungan pembiayaan UMKM.	Munculnya wirausaha baru yang mampu bersaing di pasar regional maupun internasional dengan produk yang inovatif dan berkualitas.

Kondisi Ekosistem Riset yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas				
E. Keterpaduan Riset dan Inovasi di daerah				
No.	**Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi**	**Hasil Identifikasi Tantangan yang Dihadapi Daerah**	**Hasil Identifikasi Peluang yang Dihadapi Daerah**	**Kondisi yang Diharapkan**
1	Sinkronisasi kebijakan dan pembangunan pertanian dan perikanan pusat dan daerah	Terbatasnya keterpaduan antara Riset, kebijakan, dan implementasi di lapangan, terutama dalam mendukung ketahanan pangan.	Adanya program dari pemerintah pusat untuk ketahanan pangan, yang dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal.	Terciptanya harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah untuk mendukung sektor pertanian dan perikanan yang berkelanjutan, dengan implementasi Riset yang relevan dan mendukung kebutuhan lokal.
2	Sinkronisasi kebijakan dan pembangunan ekonomi kreatif dan pariwisata pusat dan daerah	Kurangnya koordinasi antar Lembaga yang bertanggungjawab atas Riset dan pengembangan produk kreatif di tingkat lokal, sehingga Inovasi yang dihasilkan kurang terarah dan tidak terintegrasi dalam satu kerangka pembangunan Pariwisata Berkelanjutan.	Program nasional untuk pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan yang dapat disinergikan dengan potensi budaya dan alam Kota Sukabumi.	Adanya kebijakan yang terpadu antara pusat dan daerah untuk mengembangkan pariwisata yang berbasis budaya lokal dan ramah lingkungan, didukung oleh Riset dan Inovasi produk kreatif.
3	Pengembangan klaster industri	Keterbatasan kemampuan daerah dalam mengelola dan mengintegrasikan klaster industri berbasis produk lokal yang berdaya saing.	Peluang untuk kolaborasi dengan lembaga Riset dan universitas dalam pengembangan klaster industri, terutama untuk produk unggulan daerah seperti padi, ikan nila, dan produk-produk kreatif.	Terbentuknya klaster industri yang terintegrasi, dengan dukungan Riset dan Inovasi untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kualitas produk.
4	Pengembangan produk unggulan daerah	Kurangnya Riset pasar dan Inovasi produk untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah.	Ketersediaan pasar yang besar untuk produk unggulan lokal seperti hasil pertanian, perikanan, dan produk kreatif yang memiliki potensi ekspor.	Pengembangan produk unggulan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, didukung oleh Riset dan Inovasi, sehingga dapat meningkatkan perekonomian lokal dan daya saing produk daerah.

5	Model kolaborasi antar sektor untuk penguatan nilai agama, sosial dan budaya	Riset dan Inovasi penggalian dan pengembangan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya lewat berbagai model kolaborasi antar lembaga pemerintah, agama, sekolah, dan komunitas lokal belum digarap dengan baik.	Kolaborasi antara lembaga pemerintah, agama, sekolah, dan komunitas belum maksimal	Terbentuknya kemitraan yang *sustainable* di antara pemerintah daerah, lembaga agama, sekolah, dan komunitas lokal

Kondisi Ekosistem Riset yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas				
F. Penyelarasan dengan perkembangan global				
No.	**Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi**	**Hasil Identifikasi Tantangan yang Dihadapi Daerah**	**Hasil Identifikasi Peluang yang Dihadapi Daerah**	**Kondisi yang Diharapkan**
1	Adopsi teknologi global dan Inovasi berkelanjutan di sektor pertanian dan perikanan	Tingkat adopsi teknologi global yang masih rendah di sektor pertanian dan perikanan di Kota Sukabumi. Teknologi seperti *Internet of Things* (IoT) untuk pemantauan dan pengelolaan, drone untuk pemetaan lahan, dan *blockchain* untuk rantai pasokan belum banyak diimplementasikan, padahal teknologi ini berpotensi meningkatkan efisiensi serta produktivitas.	Peluang pengembangan kolaborasi dengan institusi Riset internasional atau perusahaan teknologi untuk memperkenalkan dan mendukung penerapan teknologi tersebut. Selain itu, adanya tren global untuk memperkuat ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.	Peningkatan adopsi teknologi canggih yang relevan untuk sektor pertanian dan perikanan, didukung oleh infrastruktur dan pelatihan yang tepat. Ini akan membantu meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan daya saing sektor ini di pasar domestik dan internasional.
2	Adopsi teknologi global dan Inovasi berkelanjutan di sektor ekonomi kreatif dan pariwisata	• Kurangnya konektivitas global dalam pemasaran dan *branding*, yang membuat daya saing produk kreatif dan pariwisata Kota Sukabumi masih tertinggal dibanding produk yang lain • Proses Digitalisasi UMKM masih terbatas sehingga belum bisa bersaing di tingkat internasional	Adanya peningkatan tren pariwisata digital dan ekonomi kreatif global yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat *branding* produk lokal. Misalnya, kolaborasi dengan platform global atau digital *marketplace* untuk memperluas jangkauan produk kreatif Kota Sukabumi.	Meningkatnya konektivitas dan digitalisasi UMKM serta sektor pariwisata untuk bersaing secara internasional. Adopsi teknologi pemasaran digital, *e-commerce*, dan pencitraan global diharapkan dapat mengangkat daya saing dan citra Kota Sukabumi.

3	Kolaborasi global dalam pengembangan Riset dan Inovasi	Masih terbatasnya kolaborasi global yang terjalin dalam pengembangan Riset dan Inovasi di Kota Sukabumi. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya dukungan infrastruktur serta kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal untuk mengakses kolaborasi tersebut.	Kemitraan strategis dengan lembaga penelitian internasional, universitas, atau sektor swasta global yang berfokus pada Riset terapan dan pengembangan teknologi dapat membuka akses kepada pengetahuan baru dan mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan lokal.	Meningkatnya jumlah kerja sama Riset dan Inovasi dengan institusi global yang memungkinkan transfer teknologi dan ilmu pengetahuan serta mendukung pengembangan SDM lokal di Kota Sukabumi. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat Inovasi dan penerapan teknologi dalam sektor-sektor prioritas.
4	Dokumentasi, digitalisasi, dan diseminasi kekayaan agama dan budaya lokal	Riset dan Inovasi terhadap kekayaan agama dan budaya untuk didigitalisasi dan dokumentasi hingga di diseminasi secara global belum dikerjakan dengan serius.	Kota Sukabumi memiliki kekayaan pluralisme agama, keunikan budaya, dan media lokal.	Riset dan Inovasi keagamaan dan budaya lokal didokumentasi, digitalisasi, dan didiseminasi secara global untuk memperkenalkan Kota Sukabumi ke luar Indonesia sekaligus menarik lembaga internasional untuk membangun aneka kolaborasi dengan Kota Sukabumi.

BAB IV
ANALISIS KESENJANGAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Ekosistem Riset dan Inovasi di daerah merupakan komponen esensial untuk mendukung pengembangan ekonomi berkelanjutan, terutama dalam konteks pengembangan produk unggulan dan penyelesaian permasalahan daerah. Berdasarkan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, ekosistem Riset mencakup komponen-komponen yang saling terhubung, seperti kebijakan, infrastruktur, kapasitas kelembagaan, kemitraan Riset, budaya Riset, keterpaduan Riset, dan penyelarasan dengan perkembangan global. Komponen-komponen ini berinteraksi secara dinamis untuk menghasilkan kebijakan dan pelayanan publik yang efektif, berbasis Riset dan Inovasi.

Dalam mendukung pembangunan di Kota Sukabumi, penting untuk melakukan analisis kesenjangan antara kebijakan Riset yang ada dan standar yang ditetapkan oleh BRIN. Langkah ini diperlukan agar Pemerintah Daerah dapat memahami hambatan serta peluang dalam mengembangkan ekosistem Riset yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan adanya analisis kesenjangan ini, pemerintah dapat menyusun strategi untuk memperbaiki infrastruktur Riset, meningkatkan kapasitas SDM, serta membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk universitas dan swasta.

Selain itu, upaya penguatan ekosistem Riset dan Inovasi di Kota Sukabumi sebaiknya diarahkan pada pemanfaatan teknologi untuk mendorong pengembangan produk unggulan daerah, seperti produk pertanian, perikanan, serta sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Teknologi seperti *Internet of Things* (IoT) untuk pemantauan produksi pertanian, dan platform digital untuk pemasaran produk UMKM, dapat membantu meningkatkan daya saing produk unggulan daerah di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan merancang kebijakan berbasis bukti yang responsif terhadap tantangan dan peluang ini, Kota Sukabumi dapat mempercepat pembangunan daerah, sekaligus menciptakan solusi bagi berbagai permasalahan lokal seperti ketahanan pangan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan lingkungan.

4.1 Analisis Kesenjangan Evidence-Based Policy

Strategi *EVIDENCE-BASED Policy* atau kebijakan berbasis bukti merupakan pendekatan yang sangat penting untuk memperkuat pengambilan keputusan di tingkat daerah, khususnya di Kota Sukabumi. Dalam konteks penguatan ekosistem Riset dan Inovasi, strategi ini berfokus pada pemanfaatan data dan penelitian yang akurat, relevan, dan terintegrasi sebagai dasar pembuatan kebijakan. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa Kota Sukabumi masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan data lokal yang komprehensif dan terintegrasi, kurangnya kolaborasi lintas sektor, serta keterbatasan literasi digital dan kapasitas analisis data di kalangan aparatur pemerintah. Selain itu, ada tantangan dalam pengembangan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung penelitian terapan, terutama untuk sektor-sektor penting seperti pengolahan limbah, akses pasar, dan infrastruktur lokal.

Dengan mengidentifikasi kondisi saat ini, kondisi ideal yang diinginkan, serta kesenjangan yang ada, strategi ini diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah konkret untuk mendekatkan Kota Sukabumi pada kondisi ideal. Langkah- langkah tersebut meliputi peningkatan infrastruktur digital, penguatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta, serta peningkatan literasi Riset dan digital di kalangan aparatur. Berikut merupakan analisis kesenjangan yang ada untuk berbagai aspek kebijakan Riset dan Inovasi, yang akan menjadi dasar bagi upaya penguatan ekosistem Riset dan Inovasi di Kota Sukabumi.

Tabel 17. Analisis kesenjangan *evidence* BASED-POLICY

Jenis Kebijakan	Kondisi Saat Ini	Kondisi Ideal yang Diinginkan	Kesenjangan
Kebijakan daerah	Kebijakan daerah terkait Riset dan Inovasi sudah diterbitkan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi dan Keputusan Wali Kota Sukabumi, namun belum terintegrasi sepenuhnya dengan kebutuhan data lokal (kondisi dan karakteristik daerah). Dukungan pendanaan Riset masih terbatas (tahun 2025, baru mencapai 0,076% dari total APBD) dan belum berkelanjutan.	Adanya kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan dengan dukungan anggaran memadai untuk Riset berbasis bukti, yang terintegrasi di seluruh sektor prioritas.	Keterbatasan dukungan anggaran dan kurangnya integrasi kebijakan daerah dengan kebutuhan Riset berbasis bukti, khususnya pada sektor prioritas daerah.
Kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah	Infrastruktur Riset dan Inovasi di Kota Sukabumi masih terbatas. Belum tersedia fasilitas Riset seperti kebun raya, kawasan sains dan teknologi (KST), inkubator, maupun pusat Inovasi. Digitalisasi data mulai dilakukan melalui E-RIDA, tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan dan diintegrasikan, serta belum mendukung Riset komprehensif di berbagai bidang.	Tersedianya Infrastruktur Riset yang terintegrasi dan akses digital yang memadai untuk peneliti, UMKM, dan industri lokal yang dapat mendukung kolaborasi dan Inovasi. Digitalisasi E-RIDA sebagai platform pengelolaan, pendataan, dan monitoring kegiatan Riset serta Inovasi di tingkat daerah.	Kesenjangan dalam infrastruktur digital dan aksesibilitas data terintegrasi, serta kurangnya dukungan untuk teknologi seperti IoT dan AI yang dapat meningkatkan kualitas Riset. Selain itu, pemanfaatan E-RIDA yang belum optimal.
Kebijakan kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi	Struktur kelembagaan Riset berada pada tingkat bidang di BAPPEDA (Bidang Penelitian dan Pengembangan) sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 155 Tahun 2022. Bidang ini memiliki keterbatasan sumber daya manusia, hanya terdiri dari satu Kepala Bidang, dua Kepala Sub-Bidang, dan satu Pelaksana yang juga bertugas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu, tanpa peneliti khusus.	Adanya Kelembagaan yang kuat dan dukungan untuk koordinasi Riset antara pemerintah, lembaga penelitian, dan sektor swasta, yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan. Selain itu, tersedianya SDM yang kapabilitas dalam Riset dan teknologi yang relevan, baik di sektor pemerintahan, akademisi, maupun masyarakat umum.	Kurangnya kolaborasi antar-lembaga Riset, keterbatasan dalam pelatihan dan dukungan daya saing Riset, serta kurangnya insentif bagi Riset yang relevan dengan kebutuhan lokal.

Kebijakan kemitraan Riset dan Inovasi	Dalam pelaksanaan kelitbangan utamanya terkait Riset, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah melakukan kesepakatan bersama dengan beberapa perguruan tinggi, yakni Universitas Nusa Putra, Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD, Institut Teknologi Nasional Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dan Yayasan Buana Pratama Sukabumi. Namun, kolaborasi dengan universitas, industri, dan lembaga pendidikan terbatas serta belum ada mekanisme yang efektif untuk kerja sama Riset berkelanjutan.	Terjalinnya kemitraan yang sinergis dan berkelanjutan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk mendukung Riset dan Inovasi lokal yang relevan.	Keterbatasan mekanisme kolaborasi yang efektif antara pemerintah, universitas, dan sektor swasta, sehingga Riset belum selalu relevan dengan kebutuhan teknologi, pasar, dan Inovasi yang dibutuhkan daerah.
Kebijakan budaya Riset dan Inovasi	Budaya Riset dan Inovasi di kalangan aparatur pemerintah dan masyarakat Kota Sukabumi masih rendah. Literasi digital yang kurang menjadi tantangan utama dalam pengembangan Riset berbasis bukti dan pengambilan keputusan yang berbasis data.	Masyarakat dan aparatur memiliki budaya Riset yang tinggi, literasi digital yang baik, serta kesadaran akan pentingnya Inovasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, perlu adanya pengembangan teknologi tepat guna yang relevan untuk menyelesaikan masalah lokal.	Rendahnya literasi digital dan Riset di kalangan aparatur dan masyarakat, serta keterbatasan dalam membangun budaya Inovasi yang adaptif terhadap teknologi dan kebutuhan masyarakat lokal.
Kebijakan keterpaduan Riset dan Inovasi di daerah	Implementasi Riset daerah belum terpadu dengan baik dalam kebijakan berbasis bukti, sehingga belum sepenuhnya mendukung pembangunan daerah secara optimal.	Keterpaduan yang baik antara Riset dan implementasi kebijakan di berbagai sektor untuk perumusan kebijakan berbasis bukti secara konsisten dan terkoordinasi.	Kesenjangan antara hasil Riset dan implementasi kebijakan, serta kurangnya keterpaduan dalam penerapan hasil Riset untuk kebijakan daerah yang adaptif dan relevan.

Kebijakan penyelarasan dengan perkembangan global	Responsivitas kebijakan daerah Kota Sukabumi terhadap perkembangan Riset dan Inovasi global masih terbilang rendah. Hal ini ditandai dengan keterlibatan dengan kemitraan Riset internasional atau lembaga global yang lebih luas belum optimal, sehingga kota ini masih tertinggal dalam penerapan teknologi global yang relevan dengan tantangan lokal.	Kebijakan adaptif terhadap perkembangan global, terutama dalam penerapan teknologi dan Inovasi, seperti AI, IoT, *BLOCKCHAIN*, dan energi terbarukan yang sesuai dengan tantangan lokal dan berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi Lembaga Riset internasional, universitas dan sektor industri global perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa Riset yang dilakukan relevan dengan tren teknologi global dan kebutuhan lokal.	Rendahnya responsivitas kebijakan terhadap perkembangan teknologi global, seperti teknologi hijau atau energi terbarukan, yang dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan pembangunan daerah. Selain itu, keterlibatan dengan kemitraan Riset internasional atau lembaga global belum optimal, yang menyebabkan kebijakan dan Inovasi yang dihasilkan kurang sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat di tingkat global.

4.2 Analisis Kesenjangan Unggulan Daerah

Analisis kesenjangan unggulan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara kondisi *eksisting* dan kondisi yang diinginkan dalam ekosistem Riset dan Inovasi. Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana potensi unggulan daerah dapat berkembang dan dioptimalkan melalui Riset dan Inovasi. Analisis ini akan menilai berbagai faktor yang mempengaruhi pengembangan produk unggulan daerah di Kota Sukabumi, mulai dari kebijakan, infrastruktur, kelembagaan, kemitraan, budaya, keterpaduan, dan keselarasan dengan perkembangan global. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi yang lebih terarah guna mengurangi kesenjangan dan memperkuat daya saing daerah melalui Riset dan Inovasi berbasis bukti. Berikut adalah analisis kesenjangan unggulan daerah yang dilakukan berdasarkan kondisi saat ini dan kondisi ideal yang diinginkan.

—

Tabel 18. Tema Prioritas Ekosistem Riset dan Inovasi serta Analisis Kesenjangan Unggulan Daerah

Tema Prioritas Ekosistem dan Inovasi Saat Ini di Kota Sukabumi
Tema prioritas Riset dan Inovasi Kota Sukabumi adalah **"Riset dan Inovasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan"**
Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dinilai dari kemampuan Kota Sukabumi dalam mengembangan produk unggulan daerah yakni, ekonomi dan industri kreatif, produk pertanian melalui urban farming, agrowisata dan industri pariwisata MICE, UMKM Halal (B2SAH).
Selanjutnya, dinilai pula dari kemampuan Kota Sukabumi dalam menyelesaikan permasalahan daerah, meliputi permasalahan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, pelayanan umum, ekonomi lokal, lingkungan hidup dan infrastruktur, geografi dan demografi, serta tata Kelola pemerintahan.

No.	Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Analisis Kondisi Saat Ini di Daerah	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
1	**Kebijakan infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah**			
	a. Penataan basis data Riset dan Inovasi	*Database* Riset dan Inovasi telah dibentuk, tetapi belum terintegrasi secara efektif. Data Riset di sektor pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, kesehatan dan pendidikan, serta pariwisata masih tersebar di beberapa instansi dan tidak terpusat. Hal ini menyulitkan akses dan analisis yang mendukung pengambilan keputusan di tingkat daerah.	Basis data yang terintegrasi dengan akses mudah bagi pemangku kepentingan di seluruh sektor unggulan daerah. Hal ini mendukung pengelolaan informasi lintas sektor, terutama dalam meningkatkan daya saing manusia, mendukung ekonomi lokal, dan menyusun kebijakan yang tepat dalam bidang pertanian, perikanan budidaya, ekonomi kreatif, kesehatan dan pendidikan, serta pariwisata.	Keterbatasan akses dan keterhubungan antar-data membuat analisis dan koordinasi sulit, mengurangi efektivitas pengembangan sektor unggulan daerah. Diperlukan sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola data Riset dan Inovasi lintas sektor PUD secara komprehensif.

	b. Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi, pusat Inovasi dan inkubasi	Infrastruktur Riset dan Inovasi di Kota Sukabumi terbatas, sedangkan pusat Inovasi dan inkubasi belum optimal dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah. Belum ada fasilitas inkubasi yang secara khusus melayani sektor pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, dan pariwisata.	Tersedianya infrastruktur Riset yang lengkap dengan pusat Inovasi dan inkubasi yang aktif dan memiliki kolaborasi dengan industri. Fokus infrastruktur ini adalah pada dukungan sektor pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, dan pariwisata, untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal dan daya saing tenaga kerja.	Keterbatasan fasilitas yang mendukung pelatihan dan pendampingan bagi sektor unggulan daerah, menghambat Inovasi dan pengembangan produk lokal. Diperlukan pembangunan pusat Inovasi dan inkubasi yang mencakup kebutuhan lintas sektor serta memperkuat sinergi dengan industri lokal.
	c. Pengelolaan kebun raya daerah	Kebun raya daerah belum tersedia, sehingga fasilitas Riset dan edukasi yang mendukung pariwisata dan pertanian berbasis lingkungan belum ada. Hal ini juga berdampak pada keterbatasan wisata berbasis konservasi dan edukasi.	Kebun raya yang dikelola dengan baik sebagai pusat penelitian, edukasi, dan ekowisata yang mendukung pariwisata dan konservasi lingkungan, sekaligus memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesadaran lingkungan.	Belum tersedianya kebun raya mengurangi kesempatan untuk pengembangan Riset, edukasi lingkungan, dan potensi pariwisata yang berbasis alam dan konservasi. Diperlukan program pengembangan kebun raya yang berfokus pada penelitian, edukasi, dan ekowisata yang terintegrasi dengan sektor pariwisata dan pertanian berkelanjutan.
	d. Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Anggaran Riset dan Inovasi masih terbatas dan belum mencukupi untuk mendukung kebutuhan Riset di sektor unggulan daerah secara berkelanjutan. Kurangnya anggaran ini membatasi pengembangan Riset untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal dan sektor unggulan.	Alokasi anggaran yang memadai, stabil, dan berkelanjutan untuk mendukung Riset dan Inovasi di sektor pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, dan pariwisata, dengan dukungan dari pemerintah daerah dan kolaborasi industri.	Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk Riset menghambat Inovasi yang diperlukan bagi pengembangan sektor unggulan daerah. Diperlukan kebijakan alokasi anggaran yang lebih jelas dan stabil, dengan keterlibatan.

	e. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Pemahaman mengenai perlindungan kekayaan intelektual masih rendah di kalangan masyarakat dan pelaku Riset, termasuk di sektor ekonomi kreatif dan agribisnis. Sosialisasi mengenai hak cipta di sektor ekonomi kreatif juga masih terbatas.	Peningkatan pemahaman dan akses terhadap perlindungan kekayaan intelektual bagi peneliti dan inovator, terutama di sektor ekonomi kreatif dan pertanian, yang berfungsi untuk meningkatkan Inovasi dan daya saing produk lokal.	Kurangnya pemahaman dan dukungan perlindungan kekayaan intelektual membatasi kreativitas dan Inovasi di sektor unggulan. Diperlukan program pelatihan dan sosialisasi mendalam tentang kekayaan intelektual dan hak cipta untuk mendukung Inovasi di bidang ekonomi kreatif, pertanian, dan pariwisata.
2	**Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah**			
	a. Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	- Kolaborasi antara lembaga Riset, pemerintah, dan industri di Kota Sukabumi masih lemah. Kerja sama yang ada baru melibatkan beberapa perguruan tinggi, seperti UNP, Poltek Transportasi Darat Indonesia- STTD, Itenas Bandung, Unpad, UMMI, dan Yayasan Buana Pratama Sukabumi, namun kolaborasi ini belum berkelanjutan dan masih terbatas di sektor tertentu. - Di sektor pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, dan pariwisata, keterlibatan pelaku lokal seperti kelompok tani, pembudidaya, dan usaha ekonomi kreatif masih minim, sehingga Inovasi yang dihasilkan kurang sesuai dengan kebutuhan lapangan.	- Terjalinnya kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan antara lembaga Riset, pemerintah daerah, sektor swasta, dan pelaku lokal (kelompok tani, nelayan, dan pelaku ekonomi kreatif serta pariwisata) untuk mengembangkan Inovasi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. - Forum kolaborasi yang efektif dibentuk untuk mendukung komunikasi, berbagi data, dan inisiatif bersama dalam pengembangan Riset di bidang pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, dan pariwisata.	- Kelemahan kolaborasi saat ini mengakibatkan terputusnya sinergi antara kebutuhan lokal dengan hasil Riset dan Inovasi. Tanpa koordinasi yang kuat, Inovasi sulit diaplikasikan secara efektif dan tidak menjawab tantangan di lapangan. - Diperlukan forum kolaborasi yang aktif dan strategi kemitraan khusus untuk bidang PUD, seperti Inovasi produk pertanian, teknologi budidaya ikan, pengembangan ekonomi kreatif, dan pariwisata berbasis teknologi.

		- Keterbatasan koordinasi dan strategi kolaborasi membuat Riset dan Inovasi kurang responsif terhadap permasalahan daerah, seperti daya saing ekonomi lokal, kualitas SDM, dan pengelolaan lingkungan hidup.	- Kolaborasi ini akan mendukung Inovasi yang berdampak langsung pada peningkatan daya saing produk unggulan daerah, penguatan ekonomi lokal, dan perbaikan infrastruktur, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.	- Perlunya peningkatan kemitraan dengan pelaku industri lokal dan perguruan tinggi untuk memperkuat dampak Riset dan Inovasi secara jangka panjang serta membangun kapasitas SDM dalam Riset dan Inovasi.
	b. Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	- Sarana pendukung Riset di Kota Sukabumi, seperti laboratorium dan fasilitas penelitian, sangat terbatas. Belum ada laboratorium khusus yang fokus pada Riset di sektor perikanan atau pertanian. - Infrastruktur Riset untuk mendukung sektor ekonomi kreatif dan pariwisata belum dikembangkan secara optimal, menyebabkan keterbatasan dalam pengembangan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan lokal. - Hal ini berdampak pada terbatasnya penelitian dalam menghadapi isu spesifik lokal seperti pengembangan varietas tanaman unggul, peningkatan kualitas dan produktivitas budidaya ikan, serta pengembangan pariwisata yang memanfaatkan teknologi.	- Tersedianya sarana Riset dan fasilitas Inovasi yang memadai dan dapat diakses dengan mudah oleh peneliti, inovator, serta pelaku usaha di sektor pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, dan pariwisata. - Tersedianya laboratorium dan fasilitas Riset khusus untuk setiap sektor PUD, misalnya laboratorium pengembangan varietas tanaman untuk sektor pertanian, teknologi budidaya ikan untuk perikanan, studio kreatif dan alat produksi untuk ekonomi kreatif, serta infrastruktur pendukung pariwisata seperti pusat informasi berbasis teknologi. - Fasilitas ini akan membantu meningkatkan daya saing produk unggulan daerah, mengembangkan ekonomi lokal secara berkelanjutan, dan mendukung Riset yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.	- Keterbatasan fasilitas Riset dan infrastruktur pendukung Inovasi membatasi kemampuan Kota Sukabumi untuk mengembangkan produk unggulan yang kompetitif dan inovatif. - Perlu adanya investasi dan dukungan pemerintah daerah untuk membangun dan memelihara sarana Riset yang terfokus pada PUD, seperti laboratorium pertanian untuk pengembangan varietas unggul, teknologi pengolahan hasil perikanan, fasilitas bagi industri kreatif, serta infrastruktur digital untuk pariwisata. - Pengembangan fasilitas Riset yang memadai di daerah akan membuka peluang kolaborasi yang lebih besar dan memungkinkan peneliti lokal untuk mengembangkan Inovasi yang relevan dan aplikatif bagi sektor unggulan daerah.

3	**Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah**			
	a. Penguatan kemitraan antar kelembagaan	- Kemitraan antar pemangku kepentingan di Kota Sukabumi masih belum optimal, terutama dalam kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi antara UMKM, akademisi, dan pemerintah masih terbatas dan sering kali belum efektif. - Sinergi antara UMKM dan institusi pendidikan belum terjalin dengan kuat. Banyak potensi kolaborasi di bidang Riset dan Inovasi yang belum termanfaatkan, khususnya dalam pengembangan produk unggulan lokal. - Kurangnya forum yang dapat mempertemukan berbagai sektor, termasuk pemerintah daerah, UMKM, dan akademisi, menyebabkan pemanfaatan Riset dan Inovasi lokal terhambat.	- Terbentuknya ekosistem kemitraan yang komprehensif dan dinamis dengan kolaborasi erat antar pemangku kepentingan, termasuk UMKM, institusi pendidikan, dan pemerintah daerah. - Terjalin sinergi lintas sektor yang memungkinkan pertukaran pengetahuan, pelatihan, dan Inovasi antara akademisi dan pelaku UMKM yang didukung penuh oleh pemerintah. - Tersedia forum kolaborasi triple helix (melibatkan akademisi, industri, dan pemerintah) yang secara rutin mengadakan diskusi, lokakarya, dan kerja sama Riset. - Program magang industri, konsorsium Riset teknologi ramah lingkungan, dan tim koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbentuk untuk mendukung pelaksanaan program Riset dan Inovasi.	- Terbatasnya kolaborasi lintas sektor saat ini membuat potensi Riset dan Inovasi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh UMKM. - Belum terbentuknya forum kolaborasi triple helix, serta kurangnya strategi kemitraan multi-sektor, menghambat peningkatan produktivitas dan daya saing produk lokal. - Dibutuhkan strategi kolaboratif yang kuat untuk menghubungkan sektor pendidikan, UMKM, dan pemerintah dalam upaya Riset dan Inovasi.
	b. Peningkatan Difusi Inovasi	- Penyebaran Inovasi di kalangan UMKM masih terbatas, dengan banyak pelaku UMKM yang belum mengadopsi teknologi digital dalam operasi mereka.	- Meningkatnya adopsi Inovasi di sektor UMKM, khususnya dalam penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.	- Kurangnya akses terhadap teknologi dan pendampingan membuat UMKM kesulitan untuk mengadopsi Inovasi digital, menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka di pasar.

		- Di sektor ekonomi kreatif, teknologi digital belum diintegrasikan dengan maksimal, sehingga banyak pelaku usaha yang tertinggal dalam hal produktivitas dan pemasaran. - Dalam sektor pendidikan, penerapan metode pembelajaran inovatif masih lambat dan belum menyebar di kalangan tenaga pengajar.	- Terintegrasinya teknologi digital di sektor ekonomi kreatif, yang memungkinkan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing produk dan mengakses pasar yang lebih luas. - Penerapan metode pembelajaran inovatif yang meluas di kalangan tenaga pengajar, sehingga pendidikan di daerah lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pasar kerja.	- Tidak adanya pusat Inovasi yang berbasis digital di sektor ekonomi kreatif mengakibatkan lambatnya difusi teknologi di bidang ini. - Minimnya pelatihan bagi tenaga pengajar dalam metode pembelajaran inovatif menyebabkan kurangnya adaptasi terhadap perkembangan pendidikan modern.
	c. Peningkatan Praktik Baik dan Diseminasi Hasil Riset dan Inovasi	- Sharing praktik baik antar pelaku UMKM masih sangat terbatas, menyebabkan Inovasi yang berhasil di satu usaha sulit diadopsi oleh pelaku usaha lainnya. - Diseminasi hasil Riset di bidang ekonomi lokal kepada pelaku usaha kurang optimal, sehingga UMKM tidak memanfaatkan temuan Riset untuk pengembangan bisnis. - Minimnya forum bagi pendidik untuk berbagi praktik inovatif di bidang pendidikan, sehingga Inovasi yang diterapkan oleh beberapa guru tidak dapat diketahui atau ditiru oleh guru lain.	- Terjadinya pertukaran pengetahuan dan praktik baik secara reguler antar pelaku UMKM untuk mendukung tumbuhnya Inovasi kolektif. - Hasil Riset ekonomi lokal dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk UMKM. - Pendidik memiliki kesempatan untuk bertukar praktik inovatif secara reguler, sehingga metode pengajaran yang terbukti efektif dapat diterapkan lebih luas.	- Keterbatasan forum untuk berbagi praktik baik antar UMKM membuat hasil-hasil Inovasi yang efektif tidak tersebar secara luas, menghambat pengembangan usaha. - Kurangnya platform digital untuk diseminasi hasil Riset menyebabkan keterbatasan akses UMKM terhadap informasi yang relevan untuk meningkatkan bisnis mereka. - Minimnya *workshop* untuk berbagi praktik inovatif antar pendidik menghambat pertumbuhan metode pengajaran yang adaptif dan sesuai dengan perkembangan zaman.

4	**Budaya Riset dan Inovasi Daerah**			
	a. Promosi dan kampanye Inovasi	- Upaya promosi dan kampanye Inovasi di Kota Sukabumi masih terbatas, dengan sebagian besar kegiatan Inovasi belum mendapatkan perhatian publik yang cukup luas. - Kurangnya *event*, seminar, atau pameran yang melibatkan publik dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempromosikan Inovasi-inovasi lokal, khususnya di sektor pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, dan pariwisata. - Dukungan promosi dari pemerintah daerah belum terstruktur, sehingga Inovasi daerah jarang dikenal oleh masyarakat luas.	- Adanya promosi dan kampanye Inovasi yang aktif dengan frekuensi rutin melalui pameran Inovasi, seminar, dan lomba Inovasi di sektor-sektor utama PUD. - Kampanye Inovasi didukung oleh pemerintah, akademisi, dan pelaku industri secara terintegrasi, menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya Inovasi dan potensi PUD lokal. - Masyarakat dan UMKM di Kota Sukabumi mengenal dan terinspirasi oleh berbagai Inovasi lokal, menciptakan ekosistem yang memacu kreativitas dan penerapan Inovasi dalam produk unggulan.	- Terbatasnya kegiatan promosi dan kampanye Inovasi menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap potensi Inovasi lokal, sehingga dukungan dan partisipasi dalam kegiatan inovatif belum optimal. - Kurangnya keterlibatan berbagai pihak dalam mempromosikan Inovasi mengakibatkan ide-ide inovatif di PUD belum dikenal dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat atau pelaku usaha.
	b. Apresiasi prestasi Inovasi	- Penghargaan dan apresiasi terhadap prestasi Inovasi di Kota Sukabumi masih belum terstruktur, sehingga banyak inovator lokal yang tidak mendapatkan pengakuan yang layak. - Sistem penghargaan yang diadakan bersifat sporadis, kurangnya mekanisme evaluasi yang terstandar membuat pencapaian Inovasi di PUD tidak diakui secara luas.	- Tersedianya sistem apresiasi yang terstruktur dan berkelanjutan untuk mengakui pencapaian inovator di bidang PUD, dengan kategori penghargaan khusus untuk sektor pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, dan pariwisata. - Pemerintah daerah secara rutin memberikan penghargaan atau insentif bagi inovator lokal sebagai bentuk dukungan dan pengakuan atas kontribusi mereka terhadap ekonomi daerah.	- Belum adanya sistem penghargaan yang konsisten menyebabkan inovator lokal kurang terdorong untuk berinovasi karena tidak adanya pengakuan atau apresiasi atas karya mereka. - Tidak adanya insentif yang cukup kuat mengakibatkan Inovasi di sektor PUD tumbuh lambat dan tidak mampu menarik minat luas.

		- Terbatasnya dana atau hadiah penghargaan yang diberikan menyebabkan motivasi untuk berinovasi di bidang PUD dan sektor unggulan lainnya rendah.	- Apresiasi prestasi Inovasi menjadi bagian dari budaya kota, sehingga semakin banyak individu dan kelompok yang terdorong untuk menciptakan solusi inovatif bagi permasalahan lokal.	
	c. Pengembangan perusahaan pemula berbasis Riset	- Pengembangan perusahaan pemula (*STARTUP*) berbasis Riset di Kota Sukabumi masih belum berkembang, terutama di sektor PUD. - Kurangnya fasilitas inkubasi bisnis yang mendukung pengembangan startup berbasis Riset, khususnya di bidang agribisnis, ekonomi kreatif, dan teknologi pariwisata. - Keterbatasan akses pendanaan dan minimnya program mentoring membuat *STARTUP* berbasis Riset sulit berkembang dan kurang menarik bagi generasi muda di Kota Sukabumi.	- Adanya pusat inkubasi bisnis yang berfokus pada *STARTUP* berbasis Riset di sektor pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, dan pariwisata. - Tersedia dukungan pendanaan awal dan program mentoring untuk membantu *STARTUP* Riset dalam pengembangan produk, pengujian pasar, dan pelatihan bisnis. - Generasi muda di Kota Sukabumi terdorong untuk membangun perusahaan pemula yang berbasis Riset, sehingga produk PUD terus berinovasi dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal.	- Kurangnya pusat inkubasi yang berfokus pada Riset mengakibatkan ide-ide *STARTUP* lokal tidak mendapatkan dukungan yang memadai untuk berkembang. - Minimnya akses pendanaan awal untuk *STARTUP* Riset menyebabkan banyak inovator menghadapi kesulitan untuk mewujudkan ide Inovasi mereka ke dalam produk yang siap dipasarkan.
	d. Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	- Inventarisasi pengetahuan dan teknologi lokal, seperti metode pertanian tradisional dan keterampilan ekonomi kreatif, belum terdokumentasi dengan baik.	- Terbentuknya sistem inventarisasi pengetahuan dan teknologi lokal yang terdokumentasi secara baik untuk melestarikan pengetahuan tradisional dan Inovasi masyarakat.	- Belum adanya sistem inventarisasi dan perlindungan yang kuat menyebabkan pengetahuan lokal rentan diambil atau dimanfaatkan tanpa izin.

		- Masyarakat lokal kurang mendapatkan perlindungan hukum atas pengetahuan atau teknologi yang mereka kembangkan, khususnya di bidang pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif. - Kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi kekayaan intelektual (KI) rendah, sehingga banyak Inovasi atau kearifan lokal yang belum terdaftar atau terpublikasi secara resmi.	- Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual lokal yang kuat, dengan kemudahan proses registrasi KI bagi masyarakat di sektor pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, dan pariwisata. - Masyarakat aktif dalam mencatatkan Inovasi mereka sebagai kekayaan intelektual, didukung oleh program edukasi yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan KI.	- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kekayaan intelektual menyebabkan banyak pengetahuan tradisional dan Inovasi tidak terdaftar secara resmi.
5	**Keterpaduan Riset dan Inovasi di daerah**			
	a. Pengembangan Riset dan Inovasi Berdasarkan Kebutuhan Daerah untuk Promosi Produk Unggulan Daerah	- Pengembangan Riset di Kota Sukabumi belum sepenuhnya terfokus pada kebutuhan spesifik daerah, sehingga potensi produk unggulan seperti pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, dan pariwisata masih belum optimal. - Kerja sama antara lembaga Riset dan pemerintah daerah untuk meneliti dan mengembangkan Inovasi bagi PUD belum konsisten atau berkelanjutan. - Banyak Riset yang dihasilkan belum terarah dalam mendukung promosi atau peningkatan daya saing PUD di pasar nasional atau internasional.	- Tersedianya rencana Riset yang selaras dengan kebutuhan daerah dan fokus pada PUD untuk mendukung sektor-sektor kunci seperti agribisnis, perikanan, ekonomi kreatif, dan pariwisata. - Riset dan Inovasi dikembangkan berdasarkan analisis pasar dan kebutuhan lokal, yang secara langsung memperkuat daya saing produk unggulan dan meningkatkan eksposur PUD di pasar yang lebih luas. - Kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, lembaga Riset, dan industri untuk menghasilkan Riset terapan yang mendorong Inovasi pada PUD.	- Belum adanya mekanisme yang terstruktur untuk menentukan prioritas Riset dan Inovasi berdasarkan kebutuhan pasar PUD, sehingga hasil Riset sering kali tidak relevan untuk mendorong daya saing produk lokal. - Terbatasnya anggaran untuk Riset spesifik bagi pengembangan produk unggulan daerah mengakibatkan sebagian besar kegiatan Riset hanya bersifat umum atau tidak langsung menunjang promosi PUD.

	b. Penyelenggaraan Pengembangan Klaster Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah	- Kota Sukabumi belum memiliki klaster Inovasi berbasis produk unggulan yang terorganisir dengan baik, khususnya di sektor- sektor seperti pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, dan pariwisata. - Klaster Inovasi yang ada belum didukung dengan infrastruktur dan sumber daya yang memadai, sehingga kolaborasi dan Inovasi antar pelaku usaha dan sektor tidak berkembang secara optimal. - Tidak adanya fasilitas khusus untuk klaster Inovasi seperti pusat inkubasi atau laboratorium bersama yang dapat mendukung pengembangan PUD.	- Adanya klaster Inovasi yang berfokus pada pengembangan produk unggulan di sektor-sektor utama Kota Sukabumi, seperti pertanian dan ekonomi kreatif, yang mempertemukan akademisi, pelaku bisnis, dan pemerintah. - Klaster Inovasi ini didukung oleh infrastruktur, seperti pusat inkubasi dan laboratorium, untuk mendukung eksperimen dan pengembangan produk inovatif PUD. - Munculnya klaster Inovasi yang terintegrasi memungkinkan transfer pengetahuan dan teknologi antara pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah, meningkatkan produktivitas dan kualitas PUD.	- Tidak adanya klaster Inovasi yang berbasis PUD menghambat kolaborasi antara pelaku usaha dengan akademisi dan pemerintah, sehingga banyak Inovasi yang potensial tidak dapat dikembangkan secara maksimal. - Kurangnya fasilitas pendukung seperti pusat inkubasi dan laboratorium membuat pelaku usaha kesulitan dalam menguji atau mengembangkan produk Inovasi di sektor PUD.
	c. Kesesuaian Kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	- Kebijakan Riset dan Inovasi di tingkat pusat dan daerah belum sepenuhnya sinkron, sehingga implementasi program Riset di daerah sering mengalami kendala administratif atau regulasi. - Ada perbedaan prioritas kebijakan Riset di tingkat pusat dan daerah, yang mengakibatkan kesulitan dalam mengalokasikan dana atau mengakses program Riset nasional untuk mendukung pengembangan PUD di Kota Sukabumi.	- Adanya sinkronisasi kebijakan Riset dan Inovasi antara pemerintah pusat dan daerah, yang memungkinkan pemanfaatan dana dan program Riset dari pusat secara optimal untuk pengembangan PUD.	- Kesenjangan dalam sinkronisasi kebijakan menyebabkan terhambatnya implementasi program Riset yang dapat mendukung PUD secara langsung, sehingga beberapa peluang program atau pendanaan dari pusat tidak dapat dimanfaatkan dengan baik.

		- Pemerintah daerah sering kali mengalami kendala dalam memanfaatkan program Riset atau Inovasi dari pemerintah pusat karena perbedaan fokus atau prioritas sektor unggulan.	- Kebijakan yang terintegrasi dan mendukung Riset pada sektor prioritas lokal, seperti pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, dan pariwisata, di mana daerah diberikan fleksibilitas untuk mengimplementasikan program pusat sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah. - Kebijakan pusat mendukung penguatan Inovasi lokal melalui dukungan dana, program pendampingan, dan insentif khusus bagi pemerintah daerah yang memiliki program Riset berbasis PUD.	- Perbedaan fokus kebijakan membuat banyak program pusat tidak sepenuhnya relevan untuk kebutuhan lokal, sehingga daerah mengalami kesulitan dalam menyesuaikan program dengan potensi PUD.
6	**Penyelarasan RID dengan perkembangan global**			
	a. Peningkatan Kepedulian Isu Internasional yang Mempengaruhi Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	- Pemahaman pemerintah dan pelaku Riset di Kota Sukabumi mengenai isu-isu global yang relevan (seperti perubahan iklim, ekonomi hijau, ketahanan pangan, dan teknologi digital) masih terbatas. - Rendahnya keterlibatan dalam agenda internasional atau forum global yang membahas isu-isu tersebut, sehingga banyak potensi pengetahuan atau Inovasi baru dari isu global belum sepenuhnya diadaptasi untuk mendukung produk unggulan daerah.	- Pemahaman tinggi terhadap isu-isu internasional yang berpengaruh pada pengembangan ekosistem Riset, seperti adaptasi teknologi ramah lingkungan, ekonomi berkelanjutan, perubahan iklim, dan tren pasar global yang relevan. - Pemerintah dan lembaga Riset daerah secara proaktif melibatkan diri dalam forum internasional dan membangun jaringan global untuk belajar dan berkolaborasi dalam Inovasi yang dapat meningkatkan daya saing PUD.	- Terbatasnya pengetahuan dan keterlibatan dalam isu internasional menyebabkan banyak tren global tidak terserap secara optimal untuk pengembangan Riset di daerah, sehingga peluang Inovasi bagi PUD sering terlewatkan. - Keterbatasan anggaran dan akses pada forum internasional membatasi peran pemerintah daerah dan lembaga Riset dalam mempelajari serta mengadopsi standar atau praktik terbaik global yang berpotensi memperkuat PUD.

		- Sumber daya dan kapasitas pemerintah daerah serta akademisi dalam memahami dampak isu global pada PUD masih belum memadai, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif.	- Kesiapan pemerintah daerah dan pelaku industri dalam menerapkan pengetahuan dan teknologi terkini yang sesuai dengan standar internasional untuk memperkuat daya saing PUD di pasar global.	
	b. Penguatan Kerja Sama Internasional	- Kota Sukabumi memiliki keterbatasan dalam membangun kemitraan internasional yang terfokus pada Riset dan pengembangan Inovasi, terutama untuk sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, dan pariwisata. - Saat ini, kerja sama yang ada lebih banyak dilakukan secara *AD hoc* atau bersifat jangka pendek, dengan sedikitnya program kerja sama internasional yang mendukung Riset terapan di sektor- sektor unggulan. - Masih minimnya fasilitas atau program untuk melibatkan peneliti dan pelaku usaha lokal dalam kolaborasi Riset internasional yang berorientasi pada Inovasi dan ekspor PUD.	- Terjalinnya kerja sama internasional yang kuat dan berkelanjutan dengan lembaga Riset dan universitas internasional, serta organisasi global untuk mendukung Inovasi di sektor PUD seperti agribisnis, perikanan, ekonomi kreatif, dan pariwisata. - Kota Sukabumi secara aktif mengikuti program-program bantuan teknis, pelatihan, serta kolaborasi Riset dengan negara atau organisasi lain yang memiliki keahlian khusus sesuai kebutuhan pengembangan PUD. - Peningkatan akses bagi pelaku usaha dan peneliti lokal untuk terlibat dalam kolaborasi Riset internasional, termasuk akses pada teknologi, pengetahuan, dan dana Riset internasional yang relevan dengan PUD.	- Belum adanya kebijakan daerah yang secara jelas mendukung dan memfasilitasi kerja sama Riset internasional, sehingga peluang kerja sama masih terbatas dan kurang terstruktur. - Keterbatasan fasilitas dan sumber daya untuk mendukung kerja sama Riset internasional mengakibatkan rendahnya partisipasi lokal dalam kolaborasi Riset internasional, dan masih minimnya akses pada teknologi terbaru luar negeri. - Minimnya jaringan dan kapasitas pemerintah daerah serta lembaga Riset dalam membangun hubungan strategis dengan organisasi global, yang mengurangi kesempatan untuk menyesuaikan standar atau tren internasional pada PUD.

BAB V
STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Strategi penguatan Riset dan Inovasi Kota Sukabumi disusun berdasarkan kondisi ekosistem Riset dan Inovasi yang ada, serta selaras dengan analisis kesenjangan dalam ekosistem tersebut. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat, membangun, dan mengembangkan elemen-elemen yang masih kurang, tetapi juga dirancang untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang relevan bagi pengambilan keputusan di tingkat Daerah.

Selain itu, strategi ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata, serta untuk menyelesaikan berbagai permasalahan prioritas yang dihadapi Kota Sukabumi. Diantaranya pengembangan dalam aspek daya saing manusia dan keterampilan berbasis vokasi, moderasi beragama dan budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan pariwisata, pengelolaan lingkungan dan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Melalui penguatan ekosistem Riset dan Inovasi yang terpadu, Kota Sukabumi dapat mencapai pembangunan berkelanjutan, memaksimalkan potensi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ekosistem Riset dan Inovasi daerah dikembangkan melalui 6 (enam) elemen utama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023, yakni:

1. Kebijakan dan Infrastruktur Riset;
2. Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung;
3. Kemitraan Riset dan Inovasi;
4. Budaya Riset dan Inovasi;
5. Keterpaduan antar Riset dan Inovasi;
6. Keselarasan dengan Dinamika dan Perkembangan Global.

5.1 Strategi untuk Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-BASED Policy*)

Dalam memastikan kebijakan di Kota Sukabumi berdampak dan berkelanjutan, penting untuk beralih menuju pembuatan kebijakan berbasis bukti. Strategi ini berfokus pada integrasi Riset yang ketat, analisis data, dan berbasis bukti empiris dalam proses pengambilan keputusan. Unsur-unsur utama dari strategi ini adalah:

1. Optimalisasi Anggaran dan Integrasi Kebijakan untuk Riset Berbasis Bukti
   a. Alokasi anggaran untuk Riset dan Inovasi
      Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup dan berkelanjutan untuk Riset yang berbasis bukti. Ini melibatkan alokasi anggaran melalui APBD, kemitraan dengan sektor swasta, dan hibah pusat untuk mendukung Riset yang dapat langsung mengatasi permasalahan lokal dan mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata.
   b. Kebijakan Berbasis Riset
      Kebijakan Daerah harus didasarkan pada hasil Riset yang relevan dan berfokus pada penyelesaian permasalahan Daerah, dengan memperhatikan kebutuhan lokal dan potensi unggulan yang dimiliki Daerah. Kebijakan ini harus terus beradaptasi dengan hasil Riset terbaru yang dapat mendukung pengembangan Daerah dan memperkuat daya saing dan pertumbuhan ekonomi.

2. Penguatan Infrastruktur Digital dan Teknologi untuk Mendukung Riset dan Inovasi
   a. Infrastruktur Digital Terintegrasi
      Pengembangan platform digital yang mengintegrasikan data hasil Riset dalam satu sistem terpusat akan memudahkan pengambilan keputusan berbasis bukti untuk kebijakan daerah. Infrastruktur digital ini harus memungkinkan akses mudah, aman, dan efisien bagi semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Hal ini demi mendorong transparansi dan menghindari silo institusional yang cenderung eksklusi.
   b. Adopsi Teknologi IoT dan AI: Memanfaatkan teknologi digital dan sistem berbasis data untuk mendukung Riset yang dapat memberikan bukti nyata dan aplikatif dalam penyelesaian masalah daerah. Implementasi teknologi seperti *Internet of Things* (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan data analitik akan mempercepat pengumpulan data yang relevan untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti.

3. Kolaborasi Antar Lembaga untuk Pengembangan Riset dan Kompetensi
   a. Forum Kolaborasi Pentahelix
      Indeks kota kreatif mulai diterapkan di Kota Sukabumi sejak tahun 2021 berdasarkan pertimbangan Kota Sukabumi memiliki potensi industri kreatif yang menjanjikan. Kolaborasi Pentahelix terdiri atas pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media untuk melakukan Riset yang berfokus pada pemecahan masalah dan pengembangan ekonomi kreatif (pariwisata dan industri kreatif). Diantaranya adalah, kolaborasi bersama akademisi melalui Riset dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan SDM, bersama pelaku usaha yang memiliki peran sebagai pencipta produk dan jasa kreatif, dan bersama komunitas seperti *SUKABUMI CREATIVE Hub* (SCH) untuk mewadahi pemasaran produk dan jasa kreatif. Dengan ini, *BRANDING* kota sebagai pusat ekonomi kreatif harus menjadi *tagline* dalam transformasi kebijakan Daerah.
   b. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
      Mendesain dan menyediakan program pelatihan teknis dan pendampingan bagi aparatur pemerintah. Program ini mencakup peningkatan kapasitas dalam pengelolaan Riset kebijakan, analisis dan pemanfaatan data, serta penggunaan teknologi informasi untuk mendukung perumusan kebijakan, penyelesaian permasalahan, dan pengembangan produk unggulan Daerah.

4. Penguatan Mekanisme Kolaborasi antara Pemerintah, Universitas, dan Sektor Swasta
   a. Magang dan Riset Kolaborasi Berbasis Vokasi
      Mendorong kolaborasi dan kemitraan antar lembaga, universitas, dan sektor swasta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan keterampilan berbasis vokasi. Keberlanjutan program ini dapat dilakukan melalui pelatihan tenaga pengajar, pengembangan kurikulum pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar, peningkatan fasilitas pelatihan vokasi dan laboratorium, penyediaan program magang dan penempatan kerja, dan penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan.
   b. Konsorsium teknologi untuk ekonomi kreatif dan produk unggulan daerah
      Membentuk konsorsium yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, universitas, dan sektor swasta, untuk mengembangkan Riset teknologi yang dapat mengatasi permasalahan lokal dan meningkatkan daya saing ekonomi kreatif dan produk unggulan daerah. Konsorsium ini juga bertujuan untuk menciptakan model bisnis yang relevan dan inovatif, serta membuka akses terhadap perkembangan teknologi terbaru.

5. Peningkatan Literasi Digital dan Budaya Inovasi di Kalangan Aparatur dan Masyarakat
   a. Program Literasi Digital untuk Aparatur Pemerintah
      Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Sukabumi meningkat menjadi 3,97 dengan kategori "Baik" pada Tahun 2024. Peningkatan indeks SPBE harus selaras dengan kapasitas literasi digital bagi aparatur pemerintah untuk memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan data secara cepat, akurat, dan sistematis dalam proses perumusan kebijakan dan pelayanan publik.
   b. Kampanye Budaya Inovasi
      Mendorong budaya Inovasi di kalangan masyarakat dengan mengadakan kompetisi dan penghargaan bagi inovator lokal. Kampanye ini bertujuan untuk menginspirasi masyarakat dan pelaku bisnis agar menggunakan teknologi dan Riset untuk mengatasi permasalahan Daerah dan menciptakan produk unggulan yang kompetitif.

6. Keterpaduan Hasil Riset dalam Implementasi Kebijakan Daerah
   a. Formulasi Kebijakan Berbasis Bukti
      Menyusun kebijakan yang didasarkan pada Riset yang telah teruji dan relevan dengan kebutuhan daerah. Kebijakan ini harus berorientasi pada penyelesaian masalah konkret yang dihadapi oleh masyarakat dan dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi dan industri kreatif terutama di sektor perdagangan dan jasa yang berkelanjutan dan memiliki daya saing.
   b. Mekanisme Umpan Balik untuk Kebijakan
      Membangun sistem umpan balik yang memungkinkan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan berbasis Riset yang telah diterapkan. Umpan balik ini akan membantu dalam menilai dampak kebijakan serta memberikan informasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Mekanisme ini harus diproyeksikan sebagai bentuk kontinuitas atas Riset-Riset yang telah dilakukan, alih-alih sebagai fungsi pelaporan administratif.

7. Peningkatan Responsivitas terhadap Perkembangan Teknologi Global dan Kerja Sama Internasional
   a. Penerapan Teknologi Hijau dan Energi Terbarukan
      Mengembangkan kebijakan yang mendukung penggunaan teknologi hijau dan energi terbarukan untuk menciptakan keberlanjutan energi bersih. Teknologi ini tidak hanya akan memperkuat daya saing produk lokal, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
   b. Kerja Sama Internasional dalam Riset dan Teknologi
      Menjalin kerja sama dengan lembaga Riset internasional untuk mendapatkan akses ke teknologi terbaru yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan lokal. Kolaborasi internasional ini juga akan membuka peluang pembiayaan dan memperluas jaringan Riset global yang dapat mendukung pengembangan industri kreatif dan pariwisata Daerah.

Dengan penerapan strategi-strategi di atas, kondisi ideal yang diharapkan adalah terciptanya ekosistem Riset yang kuat dan terintegrasi di Kota Sukabumi, didukung oleh kolaborasi lintas sektor, infrastruktur digital yang maju, serta kebijakan Riset dan Inovasi yang berbasis bukti dan relevan dengan kebutuhan lokal. Infrastruktur Riset berbasis teknologi canggih seperti IoT dan AI akan memperkuat kualitas dan daya saing produk unggulan, sementara kerja sama internasional yang kuat akan membawa Inovasi dan teknologi terbaru ke Kota Sukabumi.

5.2 Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi

Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata Daerah sangat penting untuk meningkatkan ekonomi regional Kota Sukabumi. Upaya pengembangan dapat dilakukan melalui ekosistem Riset dan Inovasi, dan strategi yang komprehensif untuk mengintegrasikan Riset, teknologi, kebijakan, dan kolaborasi lintas sektor. Berikut adalah strategi yang menggabungkan seluruh elemen tersebut untuk mencapai tujuan pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi:

1. Pembangunan Pusat Inovasi dan Inkubasi
   a. Pusat Inovasi untuk Sektor Ekonomi dan Industri Kreatif
      Membangun pusat Inovasi yang melayani pengembangan ekonomi dan industri kreatif, termasuk fasilitas Riset dan pengembangan sektor pariwisata dan pertanian. Pusat ini juga menjadi tempat pelatihan keterampilan bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi, sehingga siap bersaing di pasar yang lebih luas, serta dapat memberikan dukungan dalam hal inkubasi *START-UP* dan kolaborasi dengan industri lokal. Daya saing dan kreativitas dapat dilakukan melalui penyelenggaraan event, pameran, napak tilas, dan festival untuk memperkenalkan produk dan jasa kepada publik.
   b. Inkubator Bisnis Berbasis Digital
      Mendirikan pusat kreatif dan inkubator sebagai instrumen dan ruang kreasi bagi pelaku ekonomi kreatif, seperti seniman, desainer, dan pengusaha kecil menengah. Kebijakan strategis ini dilakukan melalui akses pembiayaan, hibah, dan pinjaman untuk mendukung *START-UP* dan usaha kecil menengah, serta menyediakan ruang usaha seperti studi seni, galeri, dan ruang kerja bersama. Selain itu, inkubator bisnis perlu menyediakan bimbingan digitalisasi bagi UMKM dalam pemasaran dan manajemen rantai pasok melalui pemanfaatan tech sebagai platform promosi gratis berbasis digital seperti pembuatan *vlog REALITY*, podcast dan lainnya.

2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kolaborasi Internasional
   a. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Lokal
      Menyediakan pelatihan dan program pengembangan SDM dalam manajemen usaha, pemasaran digital, Inovasi produk, dan teknologi informasi melalui kolaborasi dengan pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta.
   b. Kolaborasi Internasional dalam Riset dan Teknologi
      Membangun kemitraan dengan lembaga Riset internasional untuk mengakses teknologi baru bagi pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. Kolaborasi ini juga membuka akses pembiayaan Riset dan pasar global, memperkuat daya saing produk Sukabumi, dan pusat destinasi wisata kreatif di pasar internasional.

3. Digitalisasi dan Adopsi Teknologi untuk Meningkatkan Daya Saing
   a. Digitalisasi Pengelolaan Usaha dan Rantai Pasok
      Mengadopsi teknologi digital dalam manajemen rantai pasok dan pemasaran dapat membantu UMKM memprediksi kebutuhan pasar dan meningkatkan efisiensi distribusi. Sistem pelaporan digital juga membantu petani dan pelaku usaha mengakses informasi terbaru.

   b. Penerapan Teknologi IoT dan Big Data
      Seiring dengan meningkatnya pengadopsian TIK di Kota Sukabumi, maka pemanfaatan *Internet of Things* (*IoT*) sangat diperlukan untuk pemantauan lingkungan, seperti pemantauan kualitas air dan tanah secara *REAL time*, membantu petani dan pembudidaya ikan. Selain itu, tujuannya untuk

meningkatkan hasil produksi secara berkelanjutan. Analisis big data juga memungkinkan keputusan yang lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas.

4. Pengembangan Program Kemitraan dengan Sektor Swasta
   a. Kerja Sama dengan Supermarket dan Ritel Modern
      Jalin kemitraan dengan supermarket atau ritel modern untuk menampilkan produk lokal Sukabumi sebagai bagian dari pemberdayaan produk lokal, meningkatkan visibilitas akses produk, serta meningkatkan kepercayaan konsumen.
   b. Kolaborasi dengan Industri untuk Peningkatan Mutu
      Kerja sama dengan perusahaan besar di sektor makanan dan minuman untuk meningkatkan standar mutu dan pengemasan produk agar memenuhi syarat ekspor serta akses ke pasar yang lebih besar, antara lain terutama kuliner dan kriya (kerajinan).

5. Peningkatan Diversifikasi Produk dan Inovasi Berbasis Nilai Tambah
   a. Diversifikasi Konsumsi Pangan Masyarakat
      Inovasi ini dilakukan melalui pelatihan pengolahan pangan lokal, pelatihan teknologi *URBAN FARMING*, serta penyediaan fasilitas bagi pelaku olahan budidaya hasil perikanan.
   b. Pemanfaatan Produk Lokal
      Kebijakan strategis untuk mengoptimalkan penggunaan barang produksi asli Kota Sukabumi dalam pelaksanaan pembangunan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan peningkatan dampak berganda (*multiplier effect*) serta memastikan nilai tambah dari hasil aktivitas ekonomi tetap berputar di dalam Kota Sukabumi.

6. Pengembangan Kelurahan Wisata dan Agrowisata Komunitas
   a. Kawasan Strategis Destinasi Pariwisata (KSDP) Cikundul
      Kawasan Cikundul sebagai objek wisata unggulan yang mencakup Agroeduwisata Cikundul. Fokus pengembangan melalui produksi edukasi, konservasi, dan wisata alam.
   b. Agrowisata Terpadu dan Ekowisata
      Pengembangan kawasan strategis kota melalui agrowisata dan kawasan pariwisata yang terpadu, serta pengembangan ekowisata di sepanjang aliran sungai Cimandiri dan hulu sungai Cipelang yang memiliki fungsi ekologis tinggi.
   c. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dan Agroeduwisata
      Program pengelolaan keanekaragaman hayati sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Target kuantitas dan kualitas RTH mencapai 30% dari luas wilayah kota untuk mengendalikan kualitas lingkungan.
   d. Program Wisata Kuliner Lokal
      Kembangkan wisata kuliner yang menampilkan produk unggulan dan kerajinan tangan. Ini mendukung pariwisata sekaligus memperkenalkan kuliner khas Sukabumi.

7. Pengembangan Kebun Raya dan Ekowisata
   a. Pengembangan Kebun Raya untuk Riset dan Konservasi
      Membentuk kebun raya yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat konservasi keanekaragaman hayati, tetapi juga sebagai pusat Riset untuk pengembangan dan perlindungan tanaman lokal dan endemik. Kebun raya dapat menjadi fasilitas Riset untuk mengkaji berbagai jenis tanaman yang relevan dengan kebutuhan sektor pertanian daerah, seperti varietas unggul yang tahan terhadap perubahan iklim.

b. Ekowisata Berbasis Kebun Raya
Mengembangkan ekowisata yang mengintegrasikan kebun raya dengan kegiatan edukasi lingkungan dan penelitian. Kebun raya dapat menawarkan program wisata edukatif yang menarik pengunjung untuk belajar mengenai keanekaragaman hayati lokal, konservasi tanaman, serta praktek pertanian berkelanjutan. Ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian alam sambil mendorong pertumbuhan pariwisata berbasis alam.

8. Sinergi Kebun Raya dengan Sektor Pariwisata dan Pertanian Berkelanjutan
   a. Integrasi Sektor Pariwisata dan Pertanian Berkelanjutan
   Mengembangkan agrowisata yang mengintegrasikan kebun raya dengan praktik pertanian berkelanjutan. Pengunjung bisa belajar langsung dari petani tentang teknik pertanian yang ramah lingkungan, yang juga menjadi sumber pendapatan tambahan bagi petani setempat.
   b. Program Pengembangan Produk Pertanian Berkelanjutan
   Bentuk kemitraan antara kebun raya, lembaga Riset, dan petani lokal untuk mengembangkan produk pertanian ramah lingkungan berbasis Riset ketahanan pangan. Produk ini dapat dipromosikan sebagai bagian dari paket wisata edukatif yang menggabungkan pengalaman wisata dan pemahaman tentang pertanian berkelanjutan.

9. Pengembangan Branding Kota (*City Branding*)
   a. Sukabumi sebagai Pusat Ekonomi Kreatif
   Kebijakan untuk mengembangkan branding Kota Sukabumi secara spesifik sebagai pusat ekonomi kreatif guna menarik minat investor, wisatawan, dan pelaku industri kreatif. Fokus pengembangan ekonomi kreatif pada subsektor seperti kuliner, musik, seni pertunjukan dan kriya.
   b. Identitas "Kota Santri" dan Kreativitas
   Branding diarahkan untuk tetap mempertahankan citra sebagai kota santri yang terintegrasi dengan aspek modernitas, kreativitas, dan Inovasi masyarakat.

10. Pengembangan Pemasaran dan *BRANDING* Produk Unggulan Daerah
   a. Pemasaran dan Pengembangan Pasar
   Menggunakan data Riset pasar untuk menciptakan strategi pemasaran efektif bagi produk unggulan daerah, baik nasional maupun internasional. Selain menggunakan *e-commerce*, inisiasi kolaborasi dengan *MARKETPLACE INTERNASIONAL*, partisipasi dalam pameran dagang global, serta promosi melalui media sosial dapat memperluas jangkauan pasar.
   b. *BRANDING* dan Identitas Produk: Mengembangkan identitas kuat untuk produk unggulan daerah dengan memanfaatkan hasil Riset dan keunikan budaya lokal. Pembangunan merek (*BRANDING*) ini dapat mencakup penciptaan logo, kemasan, serta promosi yang menonjolkan nilai-nilai keberlanjutan, Inovasi, dan kualitas produk lokal. Identitas visual melalui kemasan yang ramah lingkungan juga menambah daya tarik di pasar global.

11. Membangun Infrastruktur Pendukung untuk Logistik dan Aksesibilitas Pasar
   a. Peningkatan Infrastruktur Transportasi untuk Distribusi Produk
   Optimalisasi jaringan transportasi lokal untuk distribusi produk dari petani ke pasar, menjaga kualitas dan kesegaran produk. Infrastruktur logistik yang baik memungkinkan distribusi lebih cepat dan efisien.
   b. Pengembangan Pusat Distribusi dan Gudang Logistik Daerah
   Membangun pusat distribusi dengan fasilitas penyimpanan dingin untuk produk perikanan dan beras, sehingga distribusi lebih terorganisir dan kualitas produk terjaga.

12. Penguatan Aspek Hukum dan Sertifikasi untuk PUD
    a. Sertifikasi Produk Pertanian dan Perikanan
       Mendukung sertifikasi produk seperti sertifikasi organik untuk beras atau sertifikasi BPOM dan halal untuk produk ikan olahan. Ini memperkuat daya saing produk di pasar modern.
    b. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis
       Mendaftarkan produk khas Sukabumi dengan indikasi geografis untuk melindungi identitas produk dan memberikan keunikan yang diakui secara hukum, menarik konsumen yang menginginkan produk asli daerah.

13. Membangun Jaringan Kerjasama dengan Konsumen Internasional
    a. Ekspor Produk Unggulan
       Targetkan ekspor produk berkualitas tinggi seperti beras organik dan ikan beku dengan bantuan konsultan ekspor untuk memenuhi standar negara tujuan.
    b. Promosi di Pusat Kebudayaan dan Kedutaan Besar
       Promosikan produk unggulan Sukabumi di pusat kebudayaan dan kedutaan Indonesia di luar negeri untuk menarik konsumen internasional.
    c. Kolaborasi dengan Diaspora Indonesia
       Jalin komunikasi dengan komunitas diaspora untuk memperkenalkan produk unggulan Sukabumi di negara tempat tinggal mereka, menjadikan diaspora agen atau distributor produk lokal.

Dengan mengintegrasikan strategi pengembangan Riset dan Inovasi dalam ekosistem produk unggulan daerah, Kota Sukabumi dapat menciptakan sinergi antara kebijakan, Riset, teknologi, dan kolaborasi antar-sektor untuk mengembangkan produk unggulan yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Fokus pada sektor- sektor utama seperti pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, dan pariwisata akan mendorong peningkatan daya saing, kesejahteraan masyarakat, dan pencapaian tujuan pembangunan yang lebih inklusif.

5.3 Strategi Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi

Untuk mengatasi tantangan prioritas di Kota Sukabumi, termasuk daya saing manusia, pengembangan ekonomi lokal, keberlanjutan lingkungan, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan, strategi-strategi berikut harus diprioritaskan:

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berbasis Inovasi
    a. Pelatihan Vokasi melalui Optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK)
       eningkatkan kualitas infrastruktur, sarana prasarana, dan kurikulum yang diperbaharui sesuai kebutuhan industri terkini. Tujuannya agar lulusan vokasi dapat bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif.
        1) Bekerja sama dengan universitas dan pusat Riset untuk merancang kurikulum vokasi dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan sektor unggulan daerah. Selain itu, kerjasama dalam hal Riset di bidang agribisnis, ekonomi kreatif, pariwisata dan teknologi, serta realisasi program beasiswa sarjana berbasis kewilayahan.
        2) Melibatkan ahli dan praktisi Riset dalam kegiatan pelatihan dan monitoring dengan para ahli dan pelaku industri untuk membantu pengembangan bisnis dan keterampilan individu, baik secara teknis maupun dalam aspek Inovasi manajerial dan digitalisasi.

    b. Pusat Inovasi dan Inkubator untuk Mendorong Riset dan Wirausaha Lokal
        1) Membangun pusat Inovasi dan inkubator bisnis yang dilengkapi fasilitas Riset dan Pengembangan guna mendukung pengusaha muda dalam mengembangkan produk unggulan berbasis Riset pasar dan teknologi. Hal ini sesuai dengan target capaian rasio wirausaha pemuda hingga mencapai 30% pada Tahun 2030.

2) Menyediakan dukungan mentor berbasis penelitian dan Inovasi, serta akses ke pembiayaan dan jaringan bisnis, untuk meningkatkan daya saing wirausaha lokal dalam memasuki pasar yang lebih luas. Selain itu, perlu menyediakan pusat kreatif dan inkubator yang menyediakan sumber daya bagi pengusaha kreatif.

2. Penguatan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan Riset dan Teknologi
   a. Riset Pasar dan Teknologi Produk Lokal
      1) Melakukan Riset pasar dan analisis tren untuk mengetahui preferensi konsumen di pasar domestik dan internasional terhadap produk lokal unggulan, seperti padi, ikan nila, kerajinan, kuliner, dan pariwisata, sehingga dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien.
      2) Mendorong hilirisasi pengolahan produk mentah menjadi barang jadi untuk meningkatkan nilai tambah sebelum dipasarkan.
      3) Pengembangan teknologi produksi dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan berbasis Riset untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan daya tahan produk yang akan memperluas pasar UMKM lokal. Hal ini diperlukan mengingat tingginya angka alih fungsi lahan pertanian di Kota Sukabumi. Usulan teknologi produksi yang efisien sejalan dengan strategi intensifikasi lahan dan *urban farming*.

   b. Pusat Riset dan Teknologi Ekonomi Kreatif
      1) Mengembangkan pusat Riset khusus ekonomi kreatif untuk mendukung Inovasi desain produk lokal, teknik produksi yang efisien, dan eksplorasi material lokal yang unik dan ramah lingkungan.
      2) Kolaborasi dengan akademisi dan praktisi ekonomi kreatif untuk memberikan pelatihan berbasis Riset kepada pelaku ekonomi kreatif lokal, serta memfasilitasi pemasaran produk melalui platform digital dan pameran dagang nasional dan internasional.

3. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Berbasis Teknologi dan Riset
   a. Riset dan Inovasi dalam Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan
      1) Kualitas lingkungan hidup cenderung stabil di angka 60 sepanjang 5 tahun terakhir sehingga perlu mengoptimalkan tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Strateginya melalui pembentukan tim Riset lingkungan yang terdiri dari akademisi, ahli konservasi, dan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi teknologi pengelolaan limbah, irigasi hemat air, dan energi terbarukan yang sesuai untuk diterapkan di Sukabumi.
      2) Menggunakan Riset dalam pengembangan sistem pengolahan limbah yang ramah lingkungan di sektor perikanan dan pertanian, serta memperkenalkan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam.

   b. Pembangunan Infrastruktur Ramah Lingkungan Berbasis Inovasi
      1) Membangun infrastruktur publik dengan teknologi ramah lingkungan, seperti jalan berpaving porus untuk meningkatkan resapan air, serta ruang terbuka hijau yang didukung dengan teknologi pemeliharaan otomatis.
      2) Mengadakan program Riset dan pengembangan teknologi untuk menciptakan sistem energi terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Cikundul dan Cisarua, serta Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Karang Tengah.

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Didukung Riset dan Teknologi
   a. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Data (*Data-Driven Governance*)
      Implementasi misi penguatan tata kelola pemerintah untuk pelayanan publik berkualitas melalui program Sukabumi Menyala sebagai bagian dari konsep *SMART city*. Program ini difokuskan pada integrasi pelayanan publik agar memudahkan akses dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung transformasi digital nasional. Sistem terintegrasi harus berbasis penelitian dalam membantu pengambilan keputusan yang efektif dan efisien, termasuk data mengenai pertumbuhan ekonomi lokal, efektivitas program sosial, serta kebutuhan infrastruktur dan lingkungan.

   b. Riset dan Inovasi untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik
      1) Berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga Riset untuk melakukan studi dan evaluasi berkala terkait kualitas layanan publik. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk merancang perbaikan layanan berbasis Inovasi teknologi. Layanan publik harus mampu memecahkan masalah publik, menjawab kebutuhan publik, dan mengenalkan nilai-nilai publik baru.
      2) Mengimplementasikan sistem pelayanan publik berbasis *E-GOVERNANCE* yang didukung Riset pengguna, seperti aplikasi layanan satu pintu untuk perizinan, pengaduan masyarakat, dan pelayanan administratif lainnya.

5. Pengembangan Ekosistem Inovasi untuk Mendukung Semua Sektor
   a. Pembentukan Ekosistem Riset dan Inovasi yang Terintegrasi
      1) Indeks Inovasi dan daya saing pemanfaatan iptek melalui *INNOVATIONS-driven development*, Kota Sukabumi termasuk sangat inovatif. Pertumbuhan ini perlu didukung dengan membangun ekosistem Inovasi yang melibatkan akademisi, sektor swasta, lembaga Riset, media, dan terutama Pemerintah Daerah untuk saling mendukung melalui berbagi pengetahuan, sumber daya, dan teknologi dalam pengembangan produk unggulan daerah.
      2) Mendirikan forum Riset dan Inovasi tahunan di Kota Sukabumi untuk menampilkan kemajuan Riset Inovasi di berbagai sektor unggulan, seperti ekonomi kreatif, pariwisata, pertanian, dan perikanan. Serta dengan menjalin hubungan antar-pemangku kepentingan dalam rangka mempercepat implementasi hasil Riset ke dalam kebijakan dan praktik ekonomi daerah.

Dengan memasukkan elemen Riset dan Inovasi ke dalam setiap strategi, Kota Sukabumi dapat menciptakan ekosistem yang mendorong daya saing, berkelanjutan, dan keberhasilan produk unggulan daerah di pasar nasional maupun global. Hal ini juga memungkinkan setiap sektor berkembang secara terukur, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daya dukung lingkungan.

BAB VI
PETA JALAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Penyusunan RIPJPID Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dan terukur dalam mengembangkan produk unggulan daerah dan menangani permasalahan prioritas daerah melalui penguatan seluruh elemen Ekosistem Riset dan Inovasi. Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, serta memantau kegiatan Riset, teknologi, dan Inovasi yang mendukung sektor-sektor unggulan, termasuk pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, dan pariwisata, yang berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan. Peta Jalan yang disusun mencakup sasaran strategis yang harus dicapai pada akhir periode 2029, dengan sasaran antara yang ditetapkan untuk setiap tahunnya guna memastikan pencapaian yang optimal. Peta Jalan ini juga akan menjadi landasan bagi penyusunan program dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, perbaikan kualitas lingkungan hidup, pengembangan infrastruktur perkotaan, serta penguatan tata kelola pemerintahan Kota Sukabumi.

6.1 Sasaran Strategis *EVIDENCE-BASED Policy*

Berikut adalah sasaran strategis untuk penguatan Riset dan Inovasi berbasis bukti di Kota Sukabumi dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan yang berlandaskan bukti (*evidence-based policy*). Pembuatan kebijakan yang berbasis bukti merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh Pemerintah Daerah tidak hanya didasarkan pada asumsi atau prediksi, tetapi pada data dan hasil Riset yang akurat dan relevan. Pendekatan ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien, serta dapat memberikan solusi yang lebih tepat terhadap permasalahan yang dihadapi daerah.

Sasaran strategis ini disusun untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang mencakup berbagai kategori kebijakan terkait Riset dan Inovasi, mulai dari kebijakan daerah, kebijakan infrastruktur Riset, hingga kebijakan kemitraan dan keterpaduan Riset. Tujuan utama dari sasaran-sasaran ini adalah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung Inovasi berkelanjutan, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi yang relevan dengan kebutuhan daerah serta perkembangan global. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mendukung pengembangan produk unggulan daerah, serta memperkuat daya saing ekonomi lokal.

Tabel 19. Sasaran strategis *EVIDENCE-BASED policy* Kota Sukabumi Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis dan Fokus	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Kebijakan Daerah	Menyusun kebijakan daerah berbasis bukti yang fokus pada peningkatan daya saing produk unggulan daerah.	Implementasi kebijakan berbasis bukti untuk sektor unggulan yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.	Evaluasi dan revisi kebijakan berdasarkan capaian Riset dan kebutuhan pasar untuk pengembangan PUD yang lebih berkelanjutan.	Menyempurnakan kebijakan yang telah diterapkan, dengan penekanan pada keberlanjutan dan adaptasi perubahan iklim.	Pencapaian kebijakan berbasis bukti yang memberikan dampak signifikan terhadap daya saing dan pengembangan ekonomi lokal.
Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Membangun platform digital terintegrasi untuk pengumpulan data Riset pada sektor unggulan daerah (pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, pariwisata).	Penyempurnaan infrastruktur digital untuk memfasilitasi Riset berbasis data secara lebih efisien dan aman.	Penguatan infrastruktur Riset dengan penggunaan teknologi IoT dan AI untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti.	Memastikan akses terbuka dan mudah bagi masyarakat dan sektor swasta terhadap data Riset yang telah dihasilkan.	Penyempurnaan sistem digital yang terintegrasi dan berbasis teknologi canggih, yang mendukung Riset berkelanjutan dan keputusan kebijakan berbasis bukti.
Kebijakan Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Membangun forum kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta.	Pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM pemerintah terkait Riset dan analisis data berbasis bukti.	Meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga Riset untuk mendukung pengembangan produk unggulan daerah yang lebih terintegrasi.	Pembentukan lembaga Riset dan Inovasi daerah yang berfungsi sebagai pusat pengembangan Riset dan implementasi hasil Riset.	Penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi dengan fokus pada pengembangan ekosistem yang berkelanjutan dan mampu bersaing ditingkat global.

Kebijakan Kemitraan Riset dan Inovasi	Menjalin kemitraan dengan universitas dan sektor swasta untuk melakukan Riset kolaboratif yang aplikatif.	Pembentukan konsorsium Riset yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta untuk pengembangan sektor unggulan daerah.	Meningkatkan kolaborasi Riset dengan fokus pada produk unggulan daerah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.	Melakukan Riset bersama untuk implementasi solusi praktis di sektor pertanian dan perikanan berkelanjutan yang meningkatkan daya saing.	Peningkatan kolaborasi Riset dengan lembaga internasional untuk transfer teknologi dan peningkatan kapasitas Riset lokal.
Kebijakan Budaya Riset dan Inovasi	Meningkatkan budaya Inovasi dengan mengadakan kompetisi dan penghargaan untuk Inovasi lokal.	Memperkuat literasi digital di kalangan masyarakat dan aparatur pemerintah melalui pelatihan terfokus.	Pengembangan ekosistem Inovasi di masyarakat dengan penekanan pada Riset terapan dalam memecahkan masalah daerah.	Mendorong adopsi teknologi baru oleh UMKM dan masyarakat untuk mendukung perkembangan produk unggulan berbasis Riset.	Menjadi kota yang dikenal dengan budaya Riset dan Inovasi yang mendorong pengembangan produk lokal berkelanjutan dan berdaya saing di pasar global.
Kebijakan Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Mengintegrasikan hasil Riset dalam kebijakan daerah yang sesuai dengan permasalahan lokal di sektor unggulan (pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, pariwisata).	Membentuk mekanisme evaluasi kebijakan berbasis Riset yang berjalan efektif dan terukur untuk memastikan implementasi kebijakan yang lebih terarah.	Menyusun kebijakan berbasis bukti yang lebih spesifik pada sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif.	Memastikan keberlanjutan kebijakan Riset dengan menerapkan mekanisme evaluasi dan penyesuaian kebijakan sesuai perkembangan hasil Riset dan kebutuhan lokal.	Menyusun rencana strategis untuk keberlanjutan kebijakan Riset berbasis bukti di masa depan dengan keterpaduan yang lebih luas antara sektor dan *stakeholders*.
Kebijakan Penyelarasan dengan Perkembangan Global	Menyelaraskan kebijakan daerah dengan teknologi hijau dan energi terbarukan yang mendukung keberlanjutan PUD.	Meningkatkan kerja sama internasional dalam Riset untuk teknologi terbaru yang mendukung pengembangan produk unggulan daerah.	Menyusun kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi global dan perubahan iklim yang berpengaruh pada sektor unggulan daerah.	Memperkuat kolaborasi internasional dengan fokus pada teknologi hijau dan Inovasi yang berkelanjutan untuk produk unggulan daerah.	Menjadi pusat Riset dan Inovasi berkelanjutan yang berkolaborasi secara global untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional dalam Riset.

6.2 Sasaran Strategis Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Untuk mencapai pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi yang optimal di daerah, perlu disusun sasaran strategis yang jelas dan terukur. Sasaran-sasaran ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat kemitraan Riset, serta mendukung kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan Daerah dan perkembangan global. Penekanan pada sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, dan pariwisata menjadi fokus utama dalam setiap upaya yang dilaksanakan. Dalam rangka mendukung hal tersebut, berikut adalah rencana strategis yang mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kebijakan infrastruktur Riset, penguatan kolaborasi, hingga pengembangan kemitraan internasional yang akan mendukung daya saing produk unggulan daerah.

Tabel 20. Sasaran strategis pengembangan PUD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis dan Fokus	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Kebijakan infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah					
a. Penataan basis data Riset dan Inovasi	Menyusun rencana strategis dan platform digital untuk pengumpulan dan pengelolaan data Riset dan Inovasi, dengan fokus pada sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, dan pariwisata.	Membangun sistem basis data terintegrasi yang memfasilitasi pengumpulan dan penyebaran informasi Riset, serta mendukung kolaborasi antara lembaga Riset dan sektor industri.	Melakukan pelatihan bagi pelaku Riset dan masyarakat terkait penggunaan basis data Riset untuk pengembangan produk unggulan.	Mengoptimalkan akses dan penggunaan basis data secara terbuka bagi pemangku kepentingan terkait (pemerintah, akademisi, industri, masyarakat).	Penyempurnaan sistem basis data dengan pembaruan dan peningkatan sistem keamanan data serta perluasan fitur yang memungkinkan analisis data untuk Riset lebih lanjut dan peningkatan keamanan siber.

b. Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi, pusat Inovasi dan inkubasi	Melakukan studi kelayakan untuk pembangunan pusat Riset dan Inovasi yang mendukung sektor unggulan daerah seperti pertanian (padi), perikanan (nila, lele), ekonomi kreatif, dan pariwisata.	Membangun fasilitas Riset dasar dan pusat inkubasi, termasuk laboratorium pertanian, ruang kreatif untuk ekonomi kreatif, dan fasilitas Riset untuk pariwisata.	Mengembangkan program inkubasi bagi startup dan usaha kecil berbasis Riset yang berkaitan dengan produk unggulan daerah.	Memperluas jaringan pusat Inovasi dan inkubasi dengan melibatkan sektor produk unggulan daerah. swasta untuk memberikan akses teknologi dan pendanaan bagi Riset dan Inovasi.	Mengoptimalkan infrastruktur yang ada dan memperkuat kemampuan pusat Inovasi dengan dukungan teknologi terbaru, serta memperluas kapasitas inkubasi untuk produk unggulan dengan jangkauan nasional dan internasional.
c. Pengelolaan kebun raya daerah	Melakukan inventarisasi dan pemetaan kebun raya daerah untuk mendukung Riset terkait keanekaragaman hayati dan produk pertanian.	Membangun fasilitas penunjang di kebun raya yang mendukung Riset sektor pertanian dan pariwisata, serta mengembangkan program penelitian tanaman unggulan.	Meningkatkan kerja sama dengan lembaga Riset untuk pengembangan produk berbasis keanekaragaman hayati dan pertanian lokal.	Mengembangkan rencana keberlanjutan kebun raya sebagai pusat Riset dan edukasi bagi masyarakat terkait pertanian berkelanjutan dan pariwisata berbasis alam.	Memperluas kebun raya dengan kolaborasi internasional untuk Riset bersama dan promosi produk unggulan daerah yang berbasis pada keragaman hayati lokal.
d. Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Penetapan anggaran awal untuk Riset sektor unggulan, termasuk penyusunan skema pendanaan dari sektor swasta dan donor.	Meningkatkan anggaran untuk Riset dan Inovasi berbasis produk unggulan daerah dan melakukan evaluasi terhadap program yang ada.	Mengembangkan sistem pendanaan berbasis hasil Riset yang berfokus pada sektor unggulan, dengan transparansi dan akuntabilitas.	Menyusun model pendanaan berkelanjutan untuk Riset dan Inovasi sektor unggulan yang dapat mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga Riset.	Penyempurnaan mekanisme pendanaan yang berbasis dampak ekonomi dan hasil Riset, serta evaluasi sistem pendanaan untuk peningkatan hasil Riset dan Inovasi.

e. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Sosialisasi KI untuk Riset produk unggulan, khususnya untuk pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif.	Meningkatkan jumlah pendaftaran KI untuk produk lokal dan Inovasi yang berasal dari Riset sektor unggulan daerah.	Menyusun kebijakan perlindungan KI yang lebih komprehensif untuk sektor unggulan, termasuk peraturan yang mendukung pengembangan dan perlindungan Inovasi lokal.	Melakukan pemantauan terhadap kebijakan perlindungan KI untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas, serta memperkuat kesadaran akan perlindungan KI di kalangan pelaku Inovasi.	Mengembangkan program kemitraan antara lembaga pemerintah dan industri untuk pemanfaatan KI dalam pengembangan produk baru, serta memperluas akses pasar internasional melalui lisensi dan perjanjian kerja sama.
Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah					
a. Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Membentuk forum kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, universitas, lembaga Riset, sektor swasta, dan masyarakat) untuk mengidentifikasi kebutuhan Riset berbasis bukti dan pengembangan produk unggulan daerah.	Mengembangkan mekanisme kolaborasi yang terintegrasi antara pemangku kepentingan untuk mendukung Riset bersama dan transfer teknologi dalam sektor unggulan daerah (pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, dll).	Meningkatkan frekuensi dan kualitas kolaborasi dengan menyelenggarakan workshop, seminar, dan forum kolaborasi untuk berbagi hasil Riset dan Inovasi yang telah dilaksanakan.	Memperkuat kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan dengan menghasilkan Inovasi yang siap diterapkan secara luas dan memberikan dampak signifikan terhadap sektor unggulan daerah.	Evaluasi dan penguatan kolaborasi Riset dengan analisis dampak dan efektivitas Riset serta perluasan kolaborasi internasional.

b. Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Melakukan analisis kebutuhan sarana Riset dan Inovasi berdasarkan potensi dan kemampuan daerah, serta mengidentifikasi fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pengembangan produk unggulan daerah.	Membangun sarana pendukung Riset yang sesuai dengan sektor unggulan daerah, termasuk laboratorium Riset, ruang Inovasi, dan pusat pengembangan teknologi yang terintegrasi.	Mengembangkan infrastruktur digital dan fisik yang memadai untuk mendukung Riset dan Inovasi, seperti jaringan internet cepat, akses data Riset, dan fasilitas pengujian produk unggulan.	Mengoptimalkan penggunaan sarana pendukung Riset yang telah ada dengan menyediakan fasilitas pelatihan, pendampingan, dan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Riset dan Inovasi.	Penyempurnaan sarana Riset dan Inovasi dengan memperkenalkan teknologi baru yang dapat mempercepat pengembangan produk unggulan daerah, serta meningkatkan aksesibilitas bagi semua pihak terkait.
Kemitraan Riset dan Inovasi					
a. Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Mengidentifikasi potensi lembaga-lembaga Riset, universitas, sektor swasta, dan pemerintah yang relevan untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan, guna mendukung pengembangan Riset berbasis produk unggulan daerah.	Membangun dan menyusun kesepakatan kerja sama antara lembaga-lembaga Riset, universitas, pemerintah, dan sektor industri untuk mendukung Riset terapan yang fokus pada kebutuhan sektor unggulan daerah.	Mengimplemen-tasikan program kolaboratif yang mendukung pengem-bangan teknologi dan produk unggulan daerah melalui sinergi antar lembaga (universitas, lembaga Riset, pemerintah, dan sektor swasta).	Memperkuat kemitraan dengan memperluas cakupan kolaborasi, termasuk mengikutsertakan lembaga internasional dan sektor swasta, untuk mempercepat Inovasi dan komersialisasi hasil Riset.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan memperkuat sinergi antar lembaga untuk memastikan keberlanjutan Riset dan Inovasi serta pemanfaatan teknologi yang mendukung pengembangan produk unggulan daerah.

b. Peningkatan difusi Inovasi	Meningkatkan kesadaran di kalangan pelaku usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan tentang pentingnya Inovasi untuk daya saing produk unggulan daerah melalui berbagai media dan kegiatan promosi.	Mengembangkan platform komunikasi dan promosi yang efektif untuk difusi Inovasi, dengan melibatkan sektor industri, akademisi, dan pemerintah untuk memudahkan adopsi teknologi dan Inovasi produk unggulan.	Menyelenggarakan kegiatan atau acara tahunan seperti pameran, seminar, dan *workshop* untuk memperkenalkan hasil Inovasi Riset kepada masyarakat luas dan pelaku industri terkait, serta mengintegrasikan Inovasi dalam strategi bisnis dan pemasaran produk unggulan.	Mendorong kolaborasi lebih lanjut dalam difusi inovasi, dengan fokus pada pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha lokal agar dapat mengimplementasikan teknologi dan Inovasi yang diperoleh dari Riset.	Evaluasi dan perbaikan sistem difusi Inovasi untuk memperluas jangkauan dampaknya, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, guna meningkatkan daya saing produk unggulan daerah.
c. Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku Inovasi.	Mengidentifikasi dan mendokumentasikan praktik baik dalam Riset dan Inovasi yang relevan dengan sektor unggulan, serta menyusun pedoman yang dapat diterapkan oleh pelaku Inovasi daerah.	Membangun dan meluncurkan platform digital interaktif untuk memfasilitasi diseminasi praktik baik dan hasil Riset kepada pelaku Inovasi di berbagai sektor.	Mengadakan *workshop*, seminar, dan pelatihan untuk mempromosikan praktik baik dan hasil Riset kepada pelaku Inovasi di sektor unggulan, serta meningkatkan kapasitas SDM terkait.	Mengintegrasikan praktik baik dan hasil Riset dalam kebijakan daerah serta memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta untuk penerapan hasil Riset pada produk unggulan.	Melakukan evaluasi sistem diseminasi yang sudah berjalan serta memperluas jaringan kolaborasi pada tingkat nasional dan internasional untuk mendukung Inovasi berkelanjutan dan daya saing daerah.

Budaya Riset dan Inovasi Daerah					
a. Promosi dan kampanye Inovasi	Menyusun dan meluncurkan platform promosi Inovasi berbasis produk unggulan daerah untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat, pelaku usaha, serta pemerintah terhadap hasil Riset dan Inovasi lokal.	Menyelenggarakan kampanye Inovasi melalui media sosial, pameran, dan seminar untuk memperkenalkan hasil Inovasi di sektor unggulan (pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, dan pariwisata).	Mengintegrasikan kampanye Inovasi dalam kegiatan pembangunan daerah, termasuk dengan melibatkan masyarakat dan sektor industri untuk mendukung penerapan teknologi baru di sektor unggulan.	Mengoptimalkan kampanye Inovasi melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan lembaga Riset untuk menciptakan ekosistem Inovasi yang inklusif dan berkelanjutan.	Menyusun strategi evaluasi kampanye Inovasi untuk memperluas dampaknya, memastikan adopsi teknologi baru oleh masyarakat dan pelaku industri, dan menciptakan budaya Inovasi yang berkelanjutan di Kota Sukabumi.
b. Apresiasi prestasi Inovasi	Menyusun sistem penghargaan untuk Inovasi terbaik di sektor unggulan daerah yang melibatkan sektor publik, swasta, akademisi, dan masyarakat.	Menyelenggarakan penghargaan Inovasi pertama untuk sektor unggulan dengan menilai keberhasilan Riset dan teknologi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan daya saing produk daerah.	Meningkatkan apresiasi terhadap inovator lokal dengan memberikan penghargaan dan fasilitas pendukung bagi hasil Inovasi yang berpotensi untuk dikembangkan dan dipasarkan lebih lanjut.	Menjadi tuan rumah acara tahunan untuk menghargai prestasi Inovasi dan membangun jejaring antar inovator, pemerintah, dan industri untuk mempercepat implementasi Riset dan teknologi.	Menjadi pusat Inovasi dengan penghargaan yang diakui secara nasional dan internasional untuk Inovasi berkelanjutan, serta mendorong perkembangan perusahaan berbasis Riset.

c. **Pengembangan perusahaan pemula berbasis Riset**	Mengidentifikasi perusahaan pemula potensial dan mengembangkan ekosistem pendukung berbasis Riset dengan fokus pada produk unggulan daerah.	Menyediakan program inkubasi dan pendampingan teknis bagi perusahaan pemula untuk meningkatkan kualitas produk dan kapasitas manajerial yang berbasis Riset.	Memfasilitasi akses ke sumber pendanaan dan memperluas jaringan pemasaran bagi perusahaan pemula yang berhasil menunjukkan hasil Riset dan Inovasi.	Mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta dan institusi akademik untuk mendukung pengembangan skala bisnis dan pengaplikasian hasil Riset pada produk komersial.	Mengembangkan ekosistem startup berbasis Riset yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan sektor unggulan daerah, dengan penciptaan peluang kerja dan pengembangan ekonomi Inovasi.
d. **Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.**	Mengidentifikasi dan mendokumentasikan pengetahuan dan teknologi tradisional masyarakat yang relevan dengan sektor unggulan daerah (pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif).	Melakukan Riset dan Inovasi untuk mengembangkan pengetahuan tradisional menjadi teknologi atau praktik yang lebih efisien dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.	Memfasilitasi pendaftaran HKI untuk melindungi pengetahuan dan teknologi masyarakat, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan HKI.	Mendorong adopsi pengetahuan dan teknologi lokal yang telah dikembangkan di berbagai sektor, khususnya di UMKM dan industri lokal.	Mengevaluasi keberhasilan perlindungan dan pengembangan pengetahuan lokal, serta memperkuat kebijakan untuk keberlanjutan Inovasi berbasis pengetahuan masyarakat.
Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah					
a. **Pengembangan Riset dan Inovasi di daerah** **berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah**	Melakukan identifikasi kebutuhan Riset dan Inovasi yang relevan dengan produk unggulan daerah berdasarkan analisis sektor potensial (pertanian, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif) untuk meningkatkan daya saing produk lokal.	Mengembangkan proyek Riset berbasis kebutuhan daerah untuk mengidentifikasi solusi teknologi yang dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas produk unggulan daerah.	Menerapkan hasil Riset untuk pengembangan produk unggulan daerah dengan fokus pada peningkatan nilai tambah dan daya saing produk di pasar lokal dan global.	Menyusun strategi promosi produk unggulan daerah berbasis Riset dan Inovasi yang melibatkan stakeholder daerah (pemerintah, masyarakat, industri) untuk memperkenalkan produk unggulan ke pasar yang lebih luas.	Mengevaluasi dampak promosi produk unggulan daerah yang berbasis Riset dan Inovasi, serta memperluas jaringan pasar domestik dan internasional untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

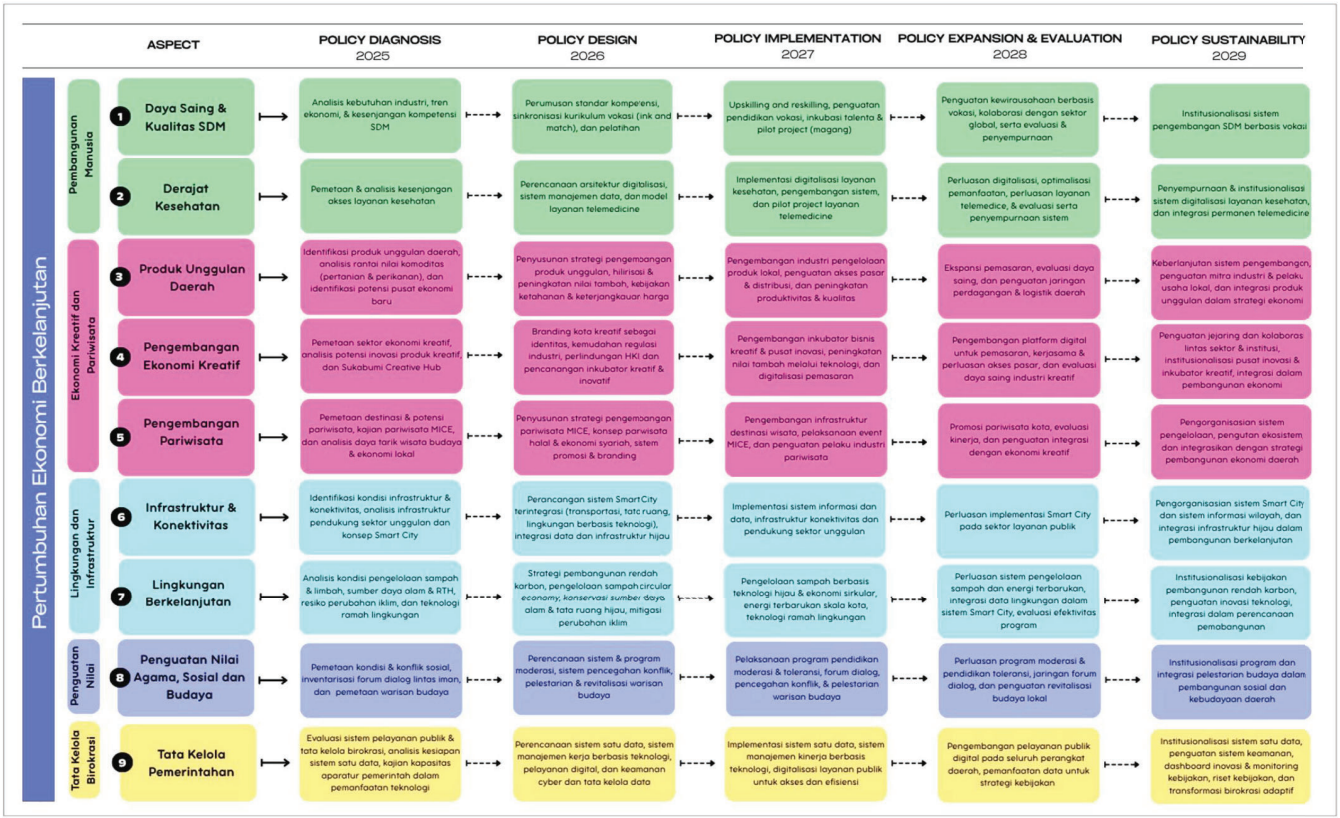
b. Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah	Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi klaster di sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, dan pariwisata, termasuk pemetaan aktor utama (pemerintah, akademisi, dan industri).	Membentuk klaster Inovasi berbasis sektor unggulan dengan melibatkan aktor lintas sektor untuk menciptakan jaringan kolaboratif dalam pengembangan produk unggulan daerah.	Memperkuat klaster dengan melibatkan universitas, pelaku industri, dan komunitas masyarakat, serta membangun program pelatihan dan pendampingan Inovasi untuk meningkatkan produktivitas.	Menyempurnakan struktur klaster dengan menyediakan dukungan Riset, fasilitas uji coba, dan akses pasar untuk memastikan Inovasi sesuai dengan kebutuhan lokal dan memperkuat daya saing produk unggulan daerah.	Meningkatkan kapasitas dan jangkauan klaster untuk skala nasional, melalui kerja sama dengan lembaga Riset nasional dan internasional untuk memperluas potensi ekspor dan daya tarik investasi.
c. Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Mengidentifikasi dan memetakan kebijakan pusat yang relevan dengan produk unggulan daerah untuk menentukan peluang harmonisasi kebijakan di tingkat daerah.	Mengembangkan forum komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk membahas sinkronisasi kebijakan, khususnya pada sektor pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, dan pariwisata.	Melakukan penyesuaian kebijakan daerah berdasarkan hasil forum dan masukan dari pemerintah pusat agar sejalan dengan program nasional, termasuk adaptasi terhadap perubahan kebijakan nasional.	Mengintegrasikan kebijakan pusat dan daerah dalam bentuk program bersama yang mendukung pengembangan produk unggulan daerah dan memperkuat daya saing daerah di pasar domestik dan global.	Mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diselaraskan serta dampaknya terhadap sektor unggulan, dan mengembangkan rekomendasi untuk kebijakan daerah yang lebih adaptif dan berkelanjutan dengan sinergi pusat-daerah.

Penyelarasan RID dengan perkembangan global					
a. Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Melakukan kajian dan pemetaan terhadap isu-isu internasional yang berpengaruh terhadap pengembangan Riset dan Inovasi di daerah, termasuk isu perubahan iklim, teknologi hijau, dan perkembangan ekonomi global.	Menyelenggarakan seminar dan workshop internasional untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan di daerah tentang dampak isu global terhadap Riset dan Inovasi, serta pentingnya adaptasi terhadap tren internasional.	Meningkatkan kolaborasi dengan lembaga internasional untuk berbagi pengetahuan dan informasi terkait isu-isu Riset dan Inovasi yang berdampak pada pengembangan produk unggulan daerah.	Menyusun kebijakan daerah yang responsif terhadap isu-isu internasional, seperti perubahan iklim dan teknologi terkini, untuk mendukung ekosistem Riset dan Inovasi yang berkelanjutan dan relevan dengan perkembangan global.	Mengevaluasi dan memperkuat program-program yang mendukung kesadaran isu internasional di kalangan pemangku kepentingan daerah, dengan fokus pada peningkatan kapasitas Riset yang terhubung dengan tren global dan tantangan internasional.
b. Penguatan Kerjasama internasional	Menjalin hubungan awal dengan mitra internasional di sektor Riset dan Inovasi untuk sektor unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, dan pariwisata, melalui partisipasi dalam forum internasional.	Membuat kesepakatan kemitraan awal dengan lembaga internasional untuk program Riset bersama yang berfokus pada transfer teknologi dan peningkatan kapasitas lokal.	Mengembangkan program pertukaran pengetahuan dan tenaga ahli dengan mitra internasional di bidang Riset dan Inovasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan implementasi teknologi.	Meluncurkan proyek Riset kolaboratif antara pemerintah daerah, mitra internasional, dan akademisi, yang berfokus pada Inovasi berkelanjutan dan penerapan teknologi hijau di sektor unggulan.	Mengembangkan jaringan kemitraan internasional yang kuat dan berkelanjutan untuk memperluas peluang investasi, Riset lanjutan, dan pemasaran global bagi produk unggulan daerah.

6.3 Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah

Peta Jalan Riset dan Inovasi Kota Sukabumi 2025-2029 merupakan langkah strategis yang disusun sebagai panduan pengembangan dan penguatan ekosistem Riset dan Inovasi daerah, dengan fokus utama pada pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) yakni pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, dan pariwisata serta penyelesaian permasalahan daerah, yakni daya saing manusia, ekonomi lokal, lingkungan dan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan. Dokumen ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pendekatan berbasis Riset dan Inovasi yang terintegrasi dalam berbagai aspek pembangunan. Melalui implementasi peta jalan ini, diharapkan Kota Sukabumi dapat mengoptimalkan potensi daerahnya dan menciptakan solusi inovatif bagi tantangan pembangunan, sehingga mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Fokus tahun pertama adalah pembentukan pondasi bagi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi daerah, dimulai dengan penyusunan kebijakan Riset dan Inovasi di bidang pengembangan produk unggulan daerah. Tahun kedua adalah penguatan kapasitas Lembaga dan daya dukung melalui proses pelatihan dan penguatan akses pasar. Tahun ketiga adalah optimalisasi elemen dengan meningkatkan kualitas dan distribusi hasil Riset melalui kemitraan serta peningkatan budaya Riset melalui edukasi dan pelatihan. Selanjutnya, tahun keempat berfokus pada optimalisasi dan evaluasi dari sistem yang berjalan. Tahun kelima adalah keberlanjutan dan adaptasi terhadap perubahan global. Hasil Riset yang berkelanjutan akan dipadukan dan diintegrasikan ke dalam praktik pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, dan pariwisata yang adaptif dan ramah lingkungan. Selain itu, infrastruktur yang mendukung ekosistem Riset dan Inovasi daerah juga dikembangkan secara kontinu. Adopsi teknologi dan informasi dalam proses pengembangan produk unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan prioritas daerah juga dikembangkan. Berikut merupakan peta jalan pada kegiatan penguatan Riset dan Inovasi daerah dalam pengembangan PUD dan penyelesaian permasalahan prioritas daerah.


Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
ASPECT
POLICY DIAGNOSIS 2025
POLICY DESIGN 2026
POLICY IMPLEMENTATION 2027
POLICY EXPANSION & EVALUATION 2028
POLICY SUSTAINABILITY 2029
Pembangunan Manusia
1 Daya Saing & Kualitas SDM
Analisis kebutuhan industri, tren ekonomi, & kesenjangan kompetensi SDM
Perumusan standar kompetensi, sinkronisasi kurikulum vokasi (link and match), dan pelatihan
Upskilling and reskilling, penguatan pendidikan vokasi, inkubasi talenta & pilot project (magang)
Penguatan kewirausahaan berbasis vokasi, kolaborasi dengan sektor global, serta evaluasi & penyempurnaan
Institusionalisasi sistem pengembangan SDM berbasis vokasi
2 Derajat Kesehatan
Pemetaan & analisis kesenjangan akses layanan kesehatan
Perencanaan arsitektur digitalisasi, sistem manajemen data, dan model layanan telemedicine
Implementasi digitalisasi layanan kesehatan, pengembangan sistem, dan pilot project layanan telemedicine
Perluasan digitalisasi, optimalisasi pemanfaatan, perluasan layanan telemedice, & evaluasi serta penyempurnaan sistem
Penyempurnaan & institusionalisasi sistem digitalisasi layanan kesehatan, dan integrasi permanen telemedicine
Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
3 Produk Unggulan Daerah
Identifikasi produk unggulan daerah, analisis rantai nilai komoditas (pertanian & perikanan), dan identifikasi potensi pusat ekonomi baru
Penyusunan strategi pengemoangan produk unggulan, hilirisasi & peningkatan nilai tambah, kebijakan ketahanan & keterjangkauar harga
Pengembangan industri pengelolaan produk lokal, penguatan akses pasar & distribusi, dan peningkatan produktivitas & kualitas
Ekspansi pemasaran, evaluasi daya saing, dan penguatan jaringan perdagangan & logistik daerah
Keberlanjutan sistem pengembangan, penguatan mitra industri & pelaku usaha lokal, dan integrasi produk unggulan dalam strategi ekonomi
4 Pengembangan Ekonomi Kreatif
Pemetaan sektor ekonomi kreatif, analisis potensi inovasi produk kreatif, dan Sukabumi Creative Hub
Branding kota kreatif sebagai identitas, kemudahan regulasi industri, perlindungan HKI dan pencanangan inkubator kreatif & inovatif
Pengembangan inkubator bisnis kreatif & pusat inovasi, peningkatan nilai tambah melalui teknologi, dan digitalisasi pemasaran
Pengembangan platform digital untuk pemasaran, kerjasama & perluasan akses pasar, dan evaluasi daya saing industri kreatif
Penguatan jejaring dan kolaborasi lintas sektor & institusi, institusionalisasi pusat inovasi & inkubator kreatif, integrasi dalam pembangunan ekonomi
5 Pengembangan Pariwisata
Pemetaan destinasi & potensi pariwisata, kajian pariwisata MICE, dan analisis daya tarik wisata budaya & ekonomi lokal
Penyusunan strategi pengemoangan pariwisata MICE, konsep pariwisata halal & ekonomi syariah, sistem promosi & branding
Pengembangan infrastruktur destinasi wisata, pelaksanaan event MICE, dan penguatan pelaku industri pariwisata
Promosi pariwisata kota, evaluasi kinerja, dan penguatan integrasi dengan ekonomi kreatif
Pengorganisasian sistem pengelolaan, pengutan ekosistem dan integrasikan dengan strategi pembangunan ekonomi daerah
Lingkungan dan Infrastruktur
6 Infrastruktur & Konektivitas
Identifikasi kondisi infrastruktur & konektivitas, analisis infrastruktur pendukung sektor unggulan dan konsep Smart City
Perancangan sistem SmartCity terintegrasi (transportasi, tata ruang, lingkungan berbasis teknologi), integrasi data dan infrastruktur hijau
Implementasi sistem informasi dan data, infrastruktur konektivitas dan pendukung sektor unggulan
Perluasan implementasi Smart City pada sektor layanan publik
Pengorganisasian sistem Smart City dan sistem informasi wilayah, dan integrasi infrastruktur hijau dalam pembangunan berkelanjutan
7 Lingkungan Berkelanjutan
Analisis kondisi pengelolaan sampah & limbah, sumber daya alam & RTH, resiko perubahan iklim, dan teknologi ramah lingkungan
Strategi pembangunan rendah karbon, pengelolaan sampah circular economy, konservasi sumber daya alam & tata ruang hijau, mitigasi perubahan iklim
Pengelolaan sampah berbasis teknologi hijau & ekonomi sirkular, energi terbarukan skala kota, teknologi ramah lingkungan
Perluasan sistem pengelolaan sampah dan energi terbarukan, integrasi data lingkungan dalam sistem Smart City, evaluasi efektivitas program
Institusionalisasi kebijakan pembangunan rendah karbon, penguatan inovasi teknologi, integrasi dalam perencanaan pembangunan
Penguatan Nilai
8 Penguatan Nilai Agama, Sosial dan Budaya
Pemetaan kondisi & konflik sosial, inventarisasi forum dialog lintas iman, dan pemetaan warisan budaya
Perencanaan sistem & program moderasi, sistem pencegahan konflik, pelestarian & revitalisasi warisan budaya
Pelaksanaan program pendidikan moderasi & toleransi, forum dialog, pencegahan konflik, & pelestarian warisan budaya
Perluasan program moderasi & pendidikan toleransi, jaringan forum dialog, dan penguatan revitalisasi budaya lokal
Institusionalisasi program dan integrasi pelestarian budaya dalam pembangunan sosial dan kebudayaan daerah
Tata Kelola Birokrasi
9 Tata Kelola Pemerintahan
Evaluasi sistem pelayanan publik & tata kelola birokrasi, analisis kesiapan sistem satu data, kajian kapasitas aparatur pemerintah dalam pemanfaatan teknologi
Perencanaan sistem satu data, sistem manajemen kerja berbasis teknologi, pelayanan digital, dan keamanan cyber dan tata kelola data
Implementasi sistem satu data, sistem manajemen kinerja berbasis teknologi, digitalisasi layanan publik untuk akses dan efisiensi
Pengembangan pelayanan publik digital pada seluruh perangkat daerah, pemanfaatan data untuk strategi kebijakan
Institusionalisasi sistem satu data, penguatan sistem keamanan, dashboard inovasi & monitoring kebijakan, riset kebijakan, dan transformasi birokrasi adaptif

BAB VII
PENUTUP

Sebagai penutup, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen strategis yang menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan Riset dan Inovasi di Kota Sukabumi. Dokumen ini bersifat fleksibel dan dapat disusun baik sebelum maupun sesudah perencanaan strategis daerah, untuk menjamin keterpaduan dan keselarasan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Badan Riset dan Inovasi Daerah atau dalam hal ini Bappeda memainkan peran penting sebagai koordinator dalam pelaksanaan kegiatan Riset dan Inovasi lintas Perangkat Daerah. Peran ini bertujuan untuk memastikan adanya sinergi antar program Riset serta optimalisasi sumber daya Riset di seluruh jajaran pemerintahan Daerah.

Lebih dari itu, dokumen ini juga dapat menjadi acuan bagi penyelenggaraan Riset yang melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak baik di tingkat daerah maupun nasional, sehingga mendorong terbentuknya ekosistem Riset yang efektif dan terintegrasi. Melalui mekanisme Riset dan Inovasi yang konsisten, diharapkan terjadi peningkatan kinerja pemerintah Kota Sukabumi yang signifikan serta dampak positif pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, terutama pada program unggulan atau program prioritas untuk periode Tahun 2025-2029.

Dengan demikian, pelaksanaan Riset yang terpadu dan berkesinambungan akan menjadi pendorong utama dalam akselerasi pembangunan Kota Sukabumi, menciptakan Inovasi yang berkelanjutan dan adaptif untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI